

# ARSIP

MEDIA KEARSIPAN NASIONAL

**ANRI**  
ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



## 51 TAHUN KEARSIPAN INDONESIA SINERGI KEARSIPAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA

TERTIB ARSIP, TRANSFORMASI DIGITAL KEARSIPAN, MEMORI KOLEKTIF BANGSA

### LAPORAN UTAMA

51 TAHUN KEARSIPAN INDONESIA  
SINERGI KEARSIPAN  
UNTUK KEMAJUAN BANGSA

### MANCANEGERA

MENGENAL MUNICH CENTRAL COLLECTIVE POINT  
DEPO PENYIMPANAN ARSIP  
PERANG DUNIA II

### HUKUM

MELIHAT PROYEKSI URUSAN KEARSIPAN  
DALAM RANCANGAN PERATURAN  
PELAKSANAAN UU IKN

ARTIKEL LAPORAN UTAMA | KHAZANAH | PROFIL | PRESERVASI | DAERAH  
TEKNOLOGI | VARIA | CERITA KITA | LIPUTAN



EDISI 81 | TAHUN 2022



*Terima kasih  
atas kerja sama semua pihak*

**ARSIP NASIONAL RI**

*Kembali dinobatkan sebagai Badan Publik*

**INFORMATIF**

*oleh* **KOMISI INFORMASI PUSAT RI**



# RUBRIK

04 DARI REDAKSI

10 ARTIKEL LAPORAN UTAMA  
TRANSFORMASI DIGITAL KEARSIPAN UNTUK  
SMART GOVERNMENT DI IKN NUSANTARA

14 KHAZANAH  
REKAM JEJAK PERAN INDONESIA DI ASEAN

17 PROFIL  
DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.  
SOSOK POLITISI PENGAWAL KONSTITUSI

26 DAERAH  
DIORAMA ARSIP JOGJA:  
PERJALANAN EMPAT ABAD SEJARAH JOGJA

30 MANCANEGERA  
MENGENAL MUNICH CENTRAL  
COLLECTIVE POINT,  
DEPO PENYIMPANAN ARSIP PERANG DUNIA II

38 HUKUM  
MELIHAT PROYEKSI URUSAN KEARSIPAN  
DALAM RANCANGAN PERATURAN  
PELAKSANAAN UU IKN

42 VARIA  
MEWUJUDKAN TERTIB ARSIP  
MELALUI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PARA ARSIPARIS DENGAN *LEARNING 5.1*  
MENUJU *SOCIETY 5.0*

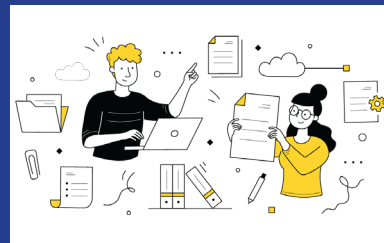
46 CERITA KITA  
SURAT EMAS DARI TEPI BRANTAS

49 LIPUTAN



## LAPORAN UTAMA 05

51 TAHUN KEARSIPAN INDONESIA:  
SINERGI KEARSIPAN  
UNTUK KEMAJUAN BANGSA



## PRESERVASI 20

PERENCANAAN METODE PELAKSANAAN  
KEGIATAN ALIH MEDIA ARSIP STATIS



## TEKNOLOGI 34

KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE) PADA PENGOLAHAN  
ARSIP FOTO



Desain sampul : Aswin Budiarto  
Ilustrasi : freepik.com

**Pembina :**  
Kepala ANRI,  
Sekretaris Utama,  
Deputi Bidang Konservasi Arsip,  
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,  
Deputi Bidang Informasi dan  
Pengembangan Sistem Kearsipan

**Penanggung Jawab :**  
Florentinus Kristiartono

**Pemimpin Redaksi :**  
Suminarsih

**Dewan Redaksi :**  
Hilman Rosmana  
Azmi  
Bambang Parjono Widodo  
M. Ihwan

**Redaktur :**  
Susanti  
Aria Maulana  
Isanto  
Intan Lidwina  
Tiara Kharisma  
Mudanto Pamungkas  
Jajang Nurjaman  
Erika Nurlidya Utami

**Editor :**  
Rayi Darmagara  
Dimas Pratama Yuda  
Bobby A. Dwiputra N.  
Sitty Annisaa  
Sari Agustin W.  
Yosa Wisnu W.  
Yuanita Utami

**Desain Grafis :**  
Hendri E. Zulkarnain  
Aswin Budiarto  
Wahyu Setyo Budi  
Rani Rizki Amalia

**Fotografer :**  
Muhamad Dullah  
Lukman Nul Hakim

**Sekretariat :**  
Krestiana Evelyn  
Putri Iswayanti  
Ridha Sari Maulida Pratiwi

 [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), email: [humas@anri.go.id](mailto:humas@anri.go.id)

## DARI REDAKSI

**M**enjalani 51 tahun kearsipan di Indonesia, insan kearsipan terus berupaya untuk bersinergi agar penyelenggaraan kearsipan di Indonesia semakin berperan penting demi kemajuan bangsa.

Perkembangan teknologi pada bidang kearsipan terus disinkronkan dengan pelestarian dan diseminasi informasi budaya bangsa yang dikemas sebagai memori kolektif bangsa. Oleh karena itu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional menggelar peringatan Hari Kearsipan ke-51 dengan tema Sinergi Kearsipan untuk Kemajuan Bangsa: Tertib Arsip, Transformasi Digital Kearsipan, Memori Kolektif Bangsa.

Melalui peringatan tersebut, diharapkan tidak hanya seluruh unsur yang tergabung dalam Komunitas Kearsipan tetapi mencakup seluruh unsur dalam pemerintahan (unsur strategis dan unsur praktis) dan masyarakat umum juga dapat ikut serta dalam meningkatkan kualitas peran dan manfaat kearsipan.

Sejalan dengan momentum tersebut, Majalah ARSIP Edisi 81 ini mengangkat tema Sinergi Kearsipan untuk Kemajuan Bangsa: Tertib Arsip, Transformasi Digital Kearsipan, Memori Kolektif Bangsa. Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Daerah, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Varia, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Semoga sajian informasi di edisi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh kritik dan saran untuk perbaikan edisi selanjutnya.

*Salam Redaksi*



# 51 TAHUN KEARSIPAN INDONESIA: SINERGI KEARSIPAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA

(TERTIB ARSIP, TRANSFORMASI DIGITAL KEARSIPAN, MEMORI KOLEKTIF BANGSA)

**P**ada tahun ini Hari Kearsipan di Indonesia yang diselenggarakan setiap tanggal 18 Mei, berusia 51 Tahun. Adapun Hari Kearsipan Ke-51 mengusung tema Sinergi Kearsipan untuk Kemajuan Bangsa: Tertib Arsip, Transformasi Digital Kearsipan, Memori Kolektif Bangsa. Adapun bertindak sebagai tuan rumah Hari Kearsipan pada tahun ini Provinsi Riau.

“Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat hadir dalam acara peringatan Hari Kearsipan ke-51 dan Rakornas kearsipan di provinsi Riau. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kepala Arsip Nasional RI yang telah memilih provinsi Riau dan kota Pekanbaru sebagai tempat penyelenggaraan hari Kearsipan Nasional ke-51 tahun 2022 dan Rapat Kerja Nasional Kearsipan. Hal ini merupakan kehormatan dan marwah bagi masyarakat melayu dan pemerintah provinsi Riau”, ungkap Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutan pada peringatan Hari Kearsipan Ke-51.

Penyelenggaraan Hari Kearsipan Nasional di Provinsi Riau telah disepakati oleh Arsip Nasional RI dan Pemerintah Provinsi Riau



Gubernur Riau, Syamsuar

sejak tahun 2020, namun karena pandemi Covid-19 sehingga baru dapat terlaksana pada tahun 2022. Sebagai tempat penyelenggaraan event nasional, tentunya Provinsi Riau berupaya memberikan pelayanan yang terbaik selaku tuan rumah kepada semua tamu undangan yang hadir pada acara ini terutama bagi peserta dari provinsi dan kabupaten, kota seluruh Indonesia. “Pemerintah provinsi Riau, berkomitmen dan konsen terhadap event kearsipan dikarenakan kami sadar bahwa penyelenggara pemerintah yang baik tentu harus didukung dengan tata Kelola kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban administrasi yang harus disiapkan pada setiap

teknis pemerintahan”, tambah.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional terus menggalakan tertib arsip mulai dari tertib arsip desa sampai dengan pemerintah di tingkat pusat. Tertib Arsip yang meliputi tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip dan tertib pendanaan kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.

“Saya berterima kasih bahwa di usia ke-51 Arsip Nasional sebagai mitra kerja Kemenpanrb dan kepada mendagri yang telah memberikan

## LAPORAN UTAMA

surat edaran kepada seluruh jajaran mulai dari Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Desa Kelurahan untuk perlunya menghimpun adanya arsip daerah sampai arsip kelurahan desa”, ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada Hari Kearsipan Ke-51 di Pekanbaru.

Penyelenggaraan kearsipan dari waktu ke waktu terus bertransformasi. transformasi digital di bidang kearsipan yang merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam penyelenggaraan kearsipan nasional yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh.

Adapun Sasaran tranformasi digital kearsipan terdiri atas: Pertama, Peningkatan kapabilitas instansi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan digital. Kedua, Peningkatan ketersediaan arsip dalam format digital yang autentik, utuh, dan terpercaya serta peningkatan pelayanan informasi kearsipan secara digital.

Salah satu Upaya dalam mewujudkan transformasi digital kearsipan yakni dengan penerapan aplikasi bagi pakai bidang kearsipan, SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Selain itu, untuk menghadapi persiapan pemindahan ibu kota negara, ANRI sedang mempersiapkan transformasi digital kearsipan dan percepatan digitalisasi kearsipan.

Selain Tertib Arsip dan Transformasi Digital Kearsipan, ANRI juga memiliki Program Nasional Memori Kolektif Bangsa (MKB) sebagai warisan dokumenter yang mencerminkan jati diri bangsa. Program MKB, merupakan salah



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  
Tjahjo Kumolo

satu program unggulan ANRI, yang meliputi rangkaian proses mitigasi, penilaian, penyelamatan, pelestarian, dan pelayanan serta registrasi arsip sebagai MKB. Program ini merupakan program kolaborasi yang bersifat nasional dan internasional, baik antar pemerintah, pemerintah dengan lembaga swasta, pemerintah dengan dunia usaha, dan pemerintah dengan masyarakat atau perseorangan. Out come dari program ini adalah terwujudnya arsip sebagai identitas dan jatidiri bangsa yang kuat.

Tertib Arsip, Transformasi Digital Kearsipan, Memori Kolektif Bangsa menjadi bahasan utama yang diangkat dalam memperingati Hari Kearsipan Ke-51.

### Tertib Arsip

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan

kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal, harus bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang kuat dari berbagai kalangan, terutama di kalangan penyelenggara negara.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan.

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ANRI menyusun Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang disusun berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal

yang tertuang dalam Laporan Audit Kearsipan Eksternal maupun Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan pada seluruh obyek pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal yang diterima dari objek pengawasan.

LHPKN ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi ANRI dan obyek pengawasan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan instansi pencipta arsip tingkat pusat.

Pada peringatan Hari Kearsipan Ke-51, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan mengenai hasil pengawasan kearsipan tahun 2021. Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2021, capaian target kinerja kearsipan dengan kondisi “Baik” diperoleh gambaran sebagai berikut: Kementerian/Lembaga, 91,18% berkinerja Baik/lebih, LPNK, 88,46% berkinerja baik/lebih, LTN & LNS, 61,29% berkinerja baik/lebih, Pemprov, 55,88% berkinerja baik/lebih, Pemkab/Kot, 14,96% berkinerja baik/lebih. Hasil tersebut menggambarkan bahwa kinerja kearsipan di lingkungan Kab/Kota masih membutuhkan perjuangan yang lebih kuat lagi, sehingga pada tahun 2024 seluruh Kab/kota dapat mencapai kinerja Baik.

Salah satu yang menjadi faktor utama rendahnya kinerja kearsipan di daerah, khususnya Kab/Kota adalah dukungan dari Kepala Daerah yang masih relatif rendah. Hal itu dibuktikan dengan data alokasi anggaran kearsipan di tahun 2022 untuk urusan kearsipan di Lingkungan Pemprov dan Kab/Kota hanya dialokasikan 0,05 % dari total anggaran urusan daerah sebanyak 1.170.81 Triliun. Rendahnya anggaran ini tentu saja menyulitkan Lembaga kearsipan daerah untuk



Kepala ANRI, Imam Gunarto

meningkatkan kinerja secara cepat. “Kami sangat ingin memberikan bantuan dan fasilitasi kepada penyelenggaraan kearsipan di daerah, dan kami tetap akan berupaya untuk membantu semaksimal mungkin agar penyelenggaraan kearsipan di daerah, khususnya dapat dioptimalkan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak agar para pimpinan Lembaga kearsipan daerah lebih berinovasi untuk mengembangkan berbagai strategi, baik di bidang penganggaran, SDM, Sarana prasarana, Sistem dan lain-lain”, terang Imam.

Tertib arsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Arsip yang terkelola dengan baik mencerminkan birokrasi modern serta dapat mempercepat proses perizinan dan pelayanan publik. “Bicara masalah arsip hari ini, itu bagian dari reformasi birokrasi yang merupakan salah satunya visi misi dari Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin yang menyangkut reformasi birokrasi. Singkatnya bagaimana pemerintah pusat dan daerah mempercepat proses perizinan dan mempercepat proses layanan masyarakat di semua

tingkatan. Kearsipan memang memiliki peranan penting sebagai bagian dari sumber informasi yang terekam dan objektif. Dan sekarang arsip kita terhimpun data-data mulai daerah dan kesejarahan dari seluruh peristiwa-peristiwa yang ada baik di negara kita atau lainnya. Seperti masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi”, tutur Tjahjo Kumolo.

Lebih lanjut Tjahjo Kumolo menambahkan sesuai dengan arahan Presiden bahwa kemampuan Indonesia dalam mengelola arsip harus semakin baik, karena arsip merupakan landasan untuk membuat kebijakan yang cepat dan tetap. “Memang, penyelenggaraan kearsipan sangat tergantung dari sinergitas dan kesinambungan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan serta pengelolaan arsip yang harus didukung oleh sumber daya manusia. Hal ini tidak bisa biasa-biasa saja, harus dengan kecepatan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan total. Tugas arsip adalah mendokumentasikan segala peristiwa yang ada. ANRI juga harus mampu berperan dalam meningkatkan kesadaran terkait pentingnya arsip

## LAPORAN UTAMA

dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik”, tambahnya. Dengan demikian arsip juga berperan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Arsip dapat menjadi bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena setiap rekaman dari aktivitas, arsip menjadi alat bukti kinerja pemerintahan dan bukti kesejarahan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tertib arsip dapat mencerminkan tata kelola pemerintahan yang modern dan menjadi langkah awal dalam bertransformasi dari pengelolaan arsip konvensional menuju pengelolaan arsip berbasis digital.

### Transformasi Digital Kearsipan

Dalam peringatan Hari Kearsipan Ke-50 Tahun 2021 Presiden Jokowi mengamanatkan kepada kita semua untuk meninggalkan cara-cara lama yang tidak efisien dalam mengelola arsip, menggunakan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan TIK. Cara-cara baru tersebut dilaksanakan melalui : (1) Sistem Informasi Kearsipan Dinas Terintegrasi (SRIKANDI), (2) cara melacak dan identifikasi arsip secara tepat, (3) registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunikasi, dan (4) sistem pengamanan arsip jangka panjang yang dipindahkan secara otomatis dari tempat penyimpanan. Sehingga, hasil yang diperoleh adalah: (1) kearsipan lebih terintegrasi, efisien, dan efektif; (2) lembaga pemerintah pusat dan daerah tidak membangun aplikasinya sendiri-sendiri; (3) arsip menjadi landasan dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat; (4) arsip sangat penting sebagai lompatan kemajuan; (5) arsip menjadi rujukan di dalam negeri maupun internasional untuk berkontribusi besar bagi kemajuan negara; dan (6) dokumentasi kekayaan seni budaya dan penyajian yang menarik untuk membangun kecintaan generasi muda pada budaya bangsanya.



Yudho Giri Sucahyo,  
Pakar teknologi informasi dan komunikasi

Pada aspek transformasi digital, maka Implementasi Srikandi menjadi satu komitmen pemerintah untuk menerapkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Aplikasi Srikandi sendiri telah diluncurkan oleh Menkopolkam pada akhir tahun 2020.

“Implementasi Srikandi walaupun mengalami banyak tantangan dapat kami laporkan bahwa aplikasi ini telah diimplementasikan oleh 25 Instansi Pusat, 18 Pemerintah Daerah dengan Jumlah pengguna 61.802 user dengan jumlah arsip sebanyak 706.265 yang tersimpan dalam storage dengan kapasitas 300 GB. Sedangkan untuk portal SIKN/JIKN hingga saat ini telah mencapai 340 simpul jaringan (Pemerintah Pusat & Daerah). Kemudian untuk akses terhadap arsip-arsip VoC dan Hindia Belanda dikembangkan pula portal sejarah nusantara dan website kelembagaan ANRI. Diharapkan portal-portal ini menjadi Big Data Kearsipan Nasional yang merupakan bagian dari 1 Data Indonesia”, ungkap Imam Gunarto.

Sementara itu, pakar teknologi informasi dan komunikasi, Yudho Giri Sucahyo berharap dengan adanya aplikasi Srikandi diharapkan dapat

terus dikembangkan. “Ada banyak fitur yang kemudian bisa kita masukan, akan ada Srikandi versi 3 4 5 6 dan seterusnya dengan kekayaan fitur yang terus bertambah”, ungkap Yudho Giri saat menjadi narasumber dalam acara Hari Kearsipan Ke-51 di Riau.

Dalam konteks perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara, diharapkan aplikasi Srikandi juga dapat digunakan oleh Lembaga Negara yang ikut pindah ke IKN sehingga dapat diakses secara daring. Pemindahan IKN dapat dimanfaatkan pencipta arsip dan ANRI untuk menjadi momentum akselerasi digitasi dan transformasi digital kearsipan. Pemanfaatan aplikasi Srikandi dalam pengelolaan arsip tidak lepas dari upaya penyelamatan memori kolektif bangsa dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

### Memori Kolektif Bangsa

Arsip sejarah perjalanan bangsa merupakan memori kolektif bangsa yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa, sehingga diperlukan kehadiran negara sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia. Sebagai upaya perlindungan dari ancaman faktor alamiah dan manusia, optimalisasi aksesibilitas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arsip sebagai memori kolektif bangsa, perlu langkah strategis dalam pendokumentasian warisan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia.

Bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pendokumentasian arsip sebagai warisan dokumenter berbagai karya budaya, kejadian penting, pemikiran, penemuan baru, dan segala bentuk peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia, perlu pengaturan mengenai registrasi arsip



sebagai memori kolektif bangsa.

Pada tahun ini, registrasi MKB diluncurkan dan terdapat 5 koleksi yang dinominasikan yakni Arsip UNESCO Global Geopark (UGG) Ciletuh-Palabuhanratu, Khazanah Arsip Rehabilitasi Centrum Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Tahun 1950-1980, Arsip Kamp Pengungsi Pulau Galang “Wajah Humanisme Indonesia”, Khazanah Arsip Konservasi dan Pembangunan Kawasan Segara Anakan Cilacap-Jawa Tengah Tahun 1996-2000, dan Arsip Selokan Mataram sebagai Memori Kolektif Bangsa.

“Kali ini saya ingin menunjukkan tuah dari arsip yaitu 5 komponen kinerja yang mendapat penilaian hari ini, bertepatan dengan Hari Kearsipan Nasional. yang pertama adalah arsip Unesco Global Geopark dari Ciletuh Pelabuhan Ratu, Geopark Ciletuh ini adalah satu Geopark yang sudah mendunia dan mendapatkan pengakuan oleh Unesco dan kali ini diajukan arsip yang tertata rapih dan dikerjakan dengan baik oleh para arsiparis kita di Jawa barat sebagai memori kolektif bangsa”, ungkap Dewan Pakar MKB, Mukhlis PaEni.

Mukhlis PaEni menambahkan bahwa khazanah arsip kedua adalah arsip khazanah rehabilitasi sentrum Profesor Suharso Surakarta, rumah sakit ini adalah pertama dibangun untuk merehabilitasi penderita korban perang atau cacat hasil perang di waktu kemerdekaan. Hal tersebut dapat menjadi rumah sakit percontohan rehabilitasi terbesar di Asia Tenggara hingga sekarang. Ketiga, arsip camp pengungsi Pulau Galang sebagai wajah humanisme Indonesia, arsip ini adalah satu kumpulan yang menceritakan bagaimana Indonesia memberikan sisi humanisme terhadap manusia yang terombang ambing dilaut kemudian merehabilitasinya di suatu kawasan dan memberikan kepercayaan pada



Mukhlis PaEni  
Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa

diri sebagai manusia dan masyarakat dunia.

“Keempat, khazanah konservasi pembangunan Kawasan Segara Anakan di Cilacap, ini adalah salah

satu kawasan konservasi Mangrove terbesar di Asia Tenggara, sekalipun tahun demi tahun mengalami penyusutan namun dapat menjadi satu kebanggaan yang kita miliki. Kelima, arsip Selokan Mataram, arsip ini memperlihatkan satu cerita bagaimana seorang raja yaitu Sri Sultan Hamengkubowono memberikan dan memperlihatkan satu talenta yang luar biasa menjaga rakyatnya dan tidak menjadi budak pada Romusha. Keputusan ini diambil oleh para pakar memori kolektif bangsa”, terang Mukhlis PaEni.

Guna mewujudkan tertib arsip, transformasi digital kearsipan, serta penyelamatan memori kolektif bangsa dibutuhkan sinergitas antar pemangku kepentingan. Sinergi yang dapat memberikan energi positif dalam penyelenggaraan kearsipan. Sinergi Kearsipan untuk Kemajuan Bangsa !!!!

A memorial banner with a dark blue background and gold floral patterns. At the top center is the ANRI logo. Below it is the text "Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Roji'un" in white script. The main title is "Keluarga Besar Arsip Nasional Republik Indonesia" in bold yellow and white, followed by "Turut Berduka Cita yang Mendalam atas Berpulangnyanya" in white. In the center is a circular portrait of a man with glasses, surrounded by a wreath of colorful flowers. Below the portrait is the name "BAPAK TJAHJO KUMOLO" in bold yellow, and "Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi" in white. At the bottom, there is a prayer in white: "Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan." followed by "Amin" in white script. The footer contains the website "www.anri.go.id", social media icons, and the handle "@ArsipNasionalRI". On the right, there is a logo for "BerAKHLAK" with the tagline "berpangku kearifan bangsa".

# TRANSFORMASI DIGITAL KEARSIPAN UNTUK SMART GOVERNMENT DI IKN NUSANTARA

Sejak Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan pada 18 Januari 2022 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemindahan IKN dari Jakarta ke pulau Kalimantan sudah bukan menjadi sebuah wacana atau keraguan. Meski pro dan kontra publik terhadap pemindahan IKN tidak dapat dihindarkan, namun tentunya pemerintah sudah menganalisis dan memiliki pertimbangan untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Nainggolan (2022) menyatakan beberapa urgensi pemindahan IKN ini, pertama, menghadapi tantangan masa depan yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN (misalnya terlihat dari kepadatan penduduk dan kendaraan, serta permasalahan lingkungan dan geologi).

Memindahkan ibu kota ke Nusantara tentu tak hanya sekadar

memindahkan pegawai atau kantor-kantor pemerintahan ke Nusantara. Selain terkait dengan pembiayaan dan infrastruktur pembangunan IKN, konsep penyelenggaraan pemerintah dengan berbagai persiapannya perlu dikawal dan disiapkan, sehingga Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan kota yang menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia bukan saja sebuah mimpi.

## Pemerintahan Digital dan Pemindahan IKN

Konsep pemerintahan digital atau elektronik sebenarnya sudah digaungkan sejak tahun 2003 dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Bahkan keseriusan pemerintah untuk menyukseskan pemerintahan digital diperkuat dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya regulasi tentang SPBE ini bukan berarti

selama rentang waktu 2003 s.d 2018 tidak ada “sentuhan” digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada rentang waktu tersebut, sebenarnya sudah terlihat banyak aksi dan inovasi yang dilakukan instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi digital dalam mekanisme kerja birokrasi dan pelayanan terhadap publik. Meski harus diakui pada beberapa hal diperlukan perbaikan atau penyempurnaan fitur dan layanan, seiring dengan dinamisnya perkembangan teknologi serta berkembangnya kebutuhan publik dan pemerintah.

Lahirnya SPBE ini menjadi penguat bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital sudah seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri. Keterpaduan, integrasi, efektif, efisien, konektivitas dan kolaborasi menjadi bagian prinsip dalam menjalankan SPBE. Ekosistem digital sudah tidak mungkin dielakkan dalam mekanisme kerja birokrasi pemerintah maupun dalam pelayanan publik. Namun, penerapan pemerintahan digital yang utuh dan menyeluruh pada instansi pemerintah tingkat pusat

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional  
Lihat berdasarkan

- Deskripsi kearsipan
- Informasi pencipta arsip
- Repositori
- Fungsi
- Struktur
- Tujuan
- Organisasi

Populer di minisusu

- **Persiapan pemindahan IKN ke Nusantara** sejatinya dapat menjadi salah satu tonggak untuk semakin mematangkan pemerintahan digital. Pada Rapat Kerja Pengelolaan Arsip dalam rangka Pemindahan Lembaga Negara ke Ibu Kota Nusantara (29/3/2022) yang diselenggarakan Kedeputusan Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Cahyono Tri Birowo juga mengungkapkan bahwa pemindahan IKN dapat menjadi momentum untuk menerapkan pemerintahan yang adaptif kolaboratif, efektif, efisien yang di dalamnya membutuhkan upaya simplifikasi proses bisnis, pemerintahan digital, penguatan dan koordinasi serta penataan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan digital yang sesuai dengan arsitektur SPBE nasional sudah seharusnya menjadi program dan komitmen bersama untuk diimplementasikan oleh instansi pemerintah daerah dan pusat. Sebagai contoh sederhana, misalnya dengan memulai pada tahap uji coba, adaptasi dan implementasi aplikasi umum SBPE yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB untuk digunakan pemerintah pusat dan daerah. Adapun aplikasi umum SPBE yang saat ini telah dirilis di antaranya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

### Pemindahan IKN dan Kearsipan

Pemindahan IKN juga akan turut diikuti dengan pemindahan kelembagaan lembaga negara yang terbagi menjadi 5 klaster. Rencananya, pemindahan tersebut dilakukan bertahap dan akan dilakukan pada 2024. Berkaca pada data yang dirilis pemerintah, tidak semua lembaga negara akan turut pindah berkantor di IKN Nusantara. ANRI menjadi salah satu lembaga yang saat ini tidak masuk pada kategori kelembagaan yang belum diprioritaskan dipindahkan ke IKN Nusantara. Lantas, apakah hal ini menjadikan kearsipan sebagai bidang yang digawangi ANRI tak turut bersiap diri untuk menyukseskan smart government di IKN Nusantara?

Ketika kita berbicara tata kelola pemerintahan yang baik, identitas nasional dan ketahanan budaya bangsa yang erat kaitannya dengan visi pembangunan IKN, sejatinya bidang kearsipan turut menyertai hal tersebut. Sebagai contoh, suatu program atau kegiatan pemerintahan yang dijalankan akan beriringan dengan terciptanya arsip dinamis dari kegiatan tersebut sebagai bukti akuntabilitas kinerja atas program atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan. Dengan demikian, informasi tata kelola pemerintahan yang dapat mencerminkan pelaksanaan pekerjaan pada birokrasi pemerintah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Azmi, 2009) dapat terlihat dan dibuktikan dari ketersediaan arsip dinamis yang autentik, utuh dan terpercaya pada setiap pencipta arsip. Selain itu, arsip statis juga memiliki keterkaitan erat dengan identitas nasional dan ketahanan budaya bangsa. Arsip statis dapat

menjadi repositori memori yang dapat memberikan bukti terpercaya untuk mengetahui dan mempelajari budaya leluhur bangsa Indonesia.

Pada konteks pengelolaan arsip dalam rangka pemindahan IKN, ada beberapa hal yang turut menjadi perhatian ANRI sebagai regulator dan pembina kearsipan, di antaranya ANRI hadir sebagai "penerang" bagi pencipta arsip untuk melahirkan kebijakan, merumuskan strategi dan pedoman teknis, serta mengawal pengelolaan arsip dalam rangka pemindahan IKN. Kebijakan dan strategi tersebut dapat membantu pencipta arsip dan ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional untuk menentukan langkah dan skala prioritas serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada pengelolaan arsip dalam rangka pemindahan IKN. Dengan demikian, jaminan ketersediaan dan keutuhan arsip dinamis (utamanya yang masih bersifat analog) pada lembaga negara yang akan pindah ke IKN tetap dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan sejalan dengan prinsip pemerintahan digital. Diharapkan pencipta arsip tidak harus memindahkan arsip dinamisnya secara fisik yang bersifat analog/non-elektronik ke IKN Nusantara. Namun, pencipta arsip tetap dapat mengakses arsip dinamis tersebut tanpa dibatasi ruang dan waktu,



## ARTIKEL LAPORAN UTAMA

baik untuk bahan pengambilan kebijakan, alat bukti yang sah, akuntabilitas kinerja maupun melindungi hak keperdataan rakyat dan aset nasional.

Sampai saat ini, arsip yang diciptakan oleh pencipta arsip di instansi pemerintah terdiri dari berbagai bentuk, seperti halnya arsip tekstual, peta, kearsitektuan, foto, video, rekaman suara yang terekam dalam berbagai bentuk dan media. Arsip tersebut ada yang sudah terlahir secara digital, namun tak jarang masih banyak arsip dinamis yang disimpan dalam bentuk analog/non-elektronik di pencipta arsip. Ini artinya, untuk mewujudkan pemerintahan digital pada sektor pengelolaan arsip tentu tidak hanya fokus pada satu titik, berkaitan dengan adaptasi dan implementasi SRIKANDI pada pencipta arsip. Ada banyak hal yang dapat menjadi pertimbangan, di antaranya identifikasi arsip yang disimpan pencipta arsip, proses digitasi dan digitalisasi terhadap arsip dinamis, identifikasi terhadap arsip dinamis yang telah habis masa retensinya, sehingga dapat disusutkan, baik dengan melakukan pemusnahan arsip sesuai dengan prosedur atau diserahkan kepada ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional. Selain itu, ANRI didukung pencipta arsip juga perlu menyiapkan sumber daya kearsipan, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta ketersediaan anggaran untuk turut menyukseskan pengelolaan arsip pada instansi pemerintah pusat dalam rangka pemindahan IKN.

### Realita dan Harapan

Jika merujuk pada indeks penyelenggaraan kearsipan tahun 2021, pada instansi pemerintah tingkat pusat nilai yang dicapai ialah sebesar 71,82 (kategori Sangat Baik). Nilai tersebut diperoleh dari nilai rata-rata hasil pengawasan kearsipan pada instansi pemerintah tingkat pusat. Ini dapat dijadikan modal bahwa pencipta

arsip pada instansi pemerintah tingkat pusat sudah memiliki perhatian dan mulai serius melaksanakan pengelolaan arsip. Meskipun nilai tersebut belum tentu dapat menjadi garansi atas ketersediaan arsip dan pelaksanaan transformasi digital kearsipan pada instansi pemerintah tingkat pusat.

Merujuk pada hasil identifikasi Direktorat Kearsipan Pusat ANRI, berikut adalah kondisi saat ini dan kondisi ideal kearsipan (ketika sudah berkantor di IKN Nusantara) pada instansi pemerintah tingkat pusat:

Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan dan fungsi arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas kinerja/pertanggungjawaban, dan memori kolektif bangsa belum sepenuhnya melindungi kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat;</li><li>- Arsip belum berada di garda depan dalam pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta identitas nasional dan ketahanan budaya bangsa;</li><li>- Pada umumnya arsip Lembaga Negara masih dalam format analog/non-elektronik dan dikelola secara manual serta belum sepenuhnya tertata sesuai NSPK kearsipan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arsip tertib, dikelola secara elektronik sesuai NSPK kearsipan sehingga lebih efektif dan efisien mendukung pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta identitas nasional dan ketahanan budaya bangsa</li><li>- Arsip pada Lembaga Negara yang pindah ke IKN tidak terbengkalai baik pada saat persiapan, proses, dan setelah pemindahan Lembaga Negara ke IKN Nusantara;</li><li>- Lembaga Negara yang pindah ke Ibu IKN pada saat mulai menyelenggarakan aktivitas perkantoran di IKN sudah mengelola arsipnya secara elektronik, menggunakan aplikasi SPBE SRIKANDI dan arsip yang tercipta sebelum Lembaga Negara pindah ke IKN telah tertib dan dapat diakses secara daring.</li></ul>

Sumber: Direktorat Kearsipan Pusat ANRI, 2022 (Disampaikan pada Raker Pengelolaan Arsip dalam Rangka Pemindahan IKN, 29/3/2022).

Memperbaiki kondisi kearsipan saat ini pada Lembaga Negara seharusnya bisa linier seiring dengan meningkatnya indeks penyelenggaraan kearsipan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan kearsipan. Capaian nilai yang diraih bukan hanya menjadi prestasi, tetapi dapat mencerminkan ketersediaan arsip dinamis dan transformasi digital kearsipan pada pencipta arsip benar-benar telah dijalankan dan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Selain itu, melalui kegiatan pengawasan kearsipan, ANRI pun dapat memotret berapa banyak arsip dinamis yang dikelola oleh Lembaga Negara, khususnya yang akan berpindah kelembagaan ke IKN Nusantara. Data tersebut seharusnya

dapat tercermin dari jumlah volume arsip yang dilaporkan oleh pencipta arsip, pada setiap kegiatan pengawasan kearsipan (dapat dilihat pada data umum formulir Audit Sistem Kearsipan Eksternal yang diisi secara mandiri oleh pencipta arsip). Data tersebut dapat menjadi modal awal bagi ANRI, misalnya untuk mengidentifikasi dan memetakan arsip dinamis apa saja yang diprioritaskan untuk didigitasi, arsip dinamis mana saja yang sudah terlahir dalam format elektronik namun belum terintegrasi dalam aplikasi SRIKANDI, serta mengintegrasikannya dalam suatu

kerangka Sistem Kearsipan Nasional yang ditetapkan ANRI, sehingga pencipta arsip dapat dengan mudah mengakses arsip saat berkantor di IKN.

### Akselerasi Digitasi dan Transformasi Digital Kearsipan

Pemindahan IKN dapat pula dimanfaatkan pencipta arsip dan ANRI untuk menjadi momentum akselerasi digitasi dan transformasi digital kearsipan di tiap instansi. Menurut Penasehat ANRI Bidang Transformasi Digital Kearsipan, Prof. Yudho Giri Suchyo saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang kearsipan di Provinsi Riau (17/5/2022) mengemukakan bahwa saat ini dunia kearsipan dihadapkan pada beberapa

kondisi, di mana sebelumnya masih pada dunia analog, ketika suatu arsip masih tercipta dalam format analog/non-elektronik dan berikutnya adalah dunia digital di mana dokumen atau arsip itu sudah terlahir digital, serta tentu saja irisan untuk keduanya, beberapa dokumen analog dialihmediakan menjadi digital.

Arsip dinamis yang telah tercipta dalam format analog/non-elektronik pada pencipta arsip yang akan pindah ke IKN menjadi salah satu fokus untuk didigitasi sesuai dengan kaidah kearsipan, sehingga dapat dengan mudah diakses dari IKN Nusantara. Namun, apakah kondisi ini berlaku pada seluruh arsip non-elektronik yang berada pada pencipta arsip? Di sinilah diperlukan identifikasi atau pemetaan terhadap arsip dinamis yang ada di pencipta arsip, sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang mencerminkan skala prioritas arsip mana saja yang memiliki urgensi untuk didigitasi atau yang sudah habis masa retensinya sehingga dapat dimusnahkan atau diserahkan kepada ANRI.

Rangkaian proses pengelolaan arsip pada instansi pemerintah pusat dalam rangka pemindahan IKN tentunya membutuhkan waktu dan kolaborasi dengan berbagai sektor (tidak hanya pencipta arsip dan ANRI). Dukungan para pemangku kepentingan lain seperti lembaga legislatif maupun eksekutif tentu diperlukan. Bahkan, mungkin saja menggandeng pihak swasta yang bergerak dalam bidang jasa kearsipan, untuk beberapa pekerjaan yang dimungkinkan sektor swasta terlibat. Namun perlu digarisbawahi, ANRI tetap harus hadir mengawal rangkaian proses tersebut agar hasil pekerjaan yang dilakukan tetap dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan menyelamatkan arsip yang bernilai guna sejarah. Ini tentunya menjadi pekerjaan besar bersama untuk pengelolaan arsip

pada instansi pemerintah yang akan pindah ke IKN Nusantara agar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan, sehingga berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital di IKN.

Selain persoalan digitasi arsip dalam format analog, unsur yang tak kalah penting dalam penyiapan pemerintahan digital, khususnya dalam bidang kearsipan adalah transformasi digital kearsipan. Mengingat kembali amanat Presiden Joko Widodo terhadap komunitas kearsipan pada saat perayaan tahun emas kearsipan pada 2021, Presiden Jokowi menginstruksikan agar dalam pengelolaan arsip harus meninggalkan cara-cara lama. Artinya adaptasi terhadap budaya pengarsipan digital bukan suatu hal yang dapat ditawar. Namun, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pada konteks transformasi digital bukan hanya terkait sarana atau prasarana yang sudah digital, di dalamnya turut terlibat adopsi teknologi dan budaya kerja digital sebagai bagian penting dalam menyelesaikan adaptasi dan adopsi teknologi dalam kegiatan pengelolaan arsip. Oleh karenanya diperlukan sikap penerimaan dan pembiasaan terhadap budaya kerja digital, baik terhadap pengelolaan arsip dinamis pada pencipta arsip maupun pada pengelolaan arsip statis di lembaga kearsipan.

Dalam hal pengelolaan arsip dinamis, saat ini pencipta arsip sudah seharusnya membuka diri untuk menggunakan aplikasi SRIKANDI, sehingga arsip yang diciptakan terekam secara terintegrasi dalam suatu database nasional. Namun, terdapat unsur penting lain dalam menyelesaikan transformasi digital kearsipan ini. Menurut Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Dwi Anggono pada Rapat Kerja Pengelolaan Arsip dalam Rangka Pemindahan

IKN menyampaikan bahwa dalam membangun budaya kerja berbasis elektronik kepemimpinan (leadership) menjadi kunci keberhasilan atas transformasi digital di pemerintahan. Dengan demikian, komitmen pimpinan pencipta arsip (bukan hanya pimpinan unit kearsipan) berkontribusi besar untuk melaksanakan tertib arsip dan menerapkan aplikasi SRIKANDI pada tiap instansi.

Berdasarkan ulasan di atas, menjadi bagian aktif dalam tertib arsip dan transformasi digital kearsipan merupakan salah satu wujud kontribusi komunitas kearsipan untuk turut menyelesaikan pemerintahan digital, menuju smart government di IKN Nusantara. Menjadi bagian entitas dalam mewujudkan mimpi smart government tentu menjadi sebuah pengabdian dan torehan sejarah, sejauhmana kita dapat berperan untuk turut meraih mimpi, jika di IKN Nusantara nanti aktivitas pemerintahan pemerintahan sudah sepenuhnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SPBE yang tak hanya terintegrasi tetapi mampu terkoneksi antarlembaga negara. Repositori memori kolektif yang merekam identitas bangsa pun dapat tersaji apik secara daring dalam kerangka Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan tentunya bukti kinerja yang terekam dalam arsip berformat non-elektronik tetap terawat dengan baik, tetapi dapat menjadi bagian dalam pengarsipan digital yang dapat diakses oleh internal pemerintah maupun publik sesuai kewenangannya. (tk)

Achmad Dedi Faozi

# REKAM JEJAK

# PERAN INDONESIA DI ASEAN

(ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS)

DALAM GUIDE ARSIP TEMATIS PRESIDEN RI: SOEHARTO 1967-1998

Pernahkah pembaca mendengar julukan bagi salah satu tokoh besar Indonesia dengan sebutan "The Smiling General"? Julukan tersebut pernah menjadi judul buku biografi hasil dari penulis asal Jerman, O.G Roeder. Julukan ini juga yang menjadi sangat populer di dunia internasional, beliau adalah salah satu tokoh yang merupakan seorang Jenderal Besar. Sosok Jenderal Besar yang satu ini memang dikenal dengan raut mukanya yang selalu tersenyum. Jenderal yang mengambil alih kekuasaan dari Presiden pertama RI Sukarno, dan resmi menjadi presiden kedua Indonesia pada tahun 1968, yaitu Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahannya, ia juga dijuluki dengan sebutan "Bapak Pembangunan" yang telah berhasil membangun negara Indonesia yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur selama 31 tahun. Sepak terjang pemerintahan beliau terangkum dalam Guide Arsip Tematis Presiden RI: Soeharto 1967-1998.

Guide arsip ini merupakan hasil penelusuran dari beragam jenis arsip yang memudahkan pengguna arsip untuk mengakses semua arsip terkait peran Presiden Soeharto mengenai berbagai macam informasi peristiwa dan kebijakan pada masa pemerintahannya periode 1967-1998 dalam bentuk berbagai media

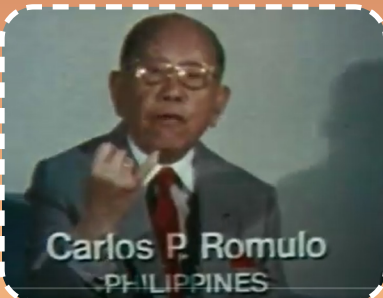
yang terdiri dari arsip tekstual, foto, film, dan video yang telah diolah sebelumnya, sehingga telah memiliki sarana bantu penemuan kembali arsip (Daftar dan Inventaris Arsip Statis) yang tersedia di unit layanan baca Arsip Nasional RI. Arsip tekstual yang ditelusur berisi informasi tentang peristiwa penting pada pemerintahan Presiden Soeharto berjumlah 353 nomor. Informasi mengenai peristiwa penting pada masa pemerintahan Presiden Soeharto berupa arsip foto berjumlah 396 nomor. Informasi mengenai peristiwa penting pada masa pemerintahan Presiden Soeharto berupa arsip film dan video berjumlah 239 nomor.

Informasi dalam guide arsip ini dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) tema besar yang didasarkan pada peristiwa penting secara garis besar yang terjadi selama pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu Presiden Soeharto dan Politik; Presiden Soeharto dan Pertahanan-Keamanan; Presiden Soeharto dan Ekonomi; Presiden Soeharto dan Pendidikan Kebudayaan (Dikbud); Presiden Soeharto dan Pemuda Olahraga; Presiden Soeharto dan Sosial; Presiden Soeharto dan Hukum serta Presiden Soeharto dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK).

Masa pemerintahan Presiden Soeharto lebih dikenal sebagai Orde Baru, yaitu masa sebelum Reformasi

dan masa sesudah Orde Lama. Orde baru yang di pimpin oleh Presiden Soeharto selama 31 tahun terdapat banyak kebijakan yang memiliki pengaruh besar, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Salah satu kebijakan politik Presiden Soeharto yang menjadi warisan dari politik luar negeri atau diplomasi sampai sekarang adalah pemberian usulan tentang pembentukan sebuah hubungan persahabatan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara dengan memelopori berdirinya ASEAN serta pembentukan sekretariat tetap ASEAN di Jakarta.

ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan PERBARA atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Dalam sejarahnya ASEAN didirikan ketika Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina ialah Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul razak (Malaysia), Narcisco Ramos (Filipina), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand) menyelesaikan negosiasi Deklarasi ASEAN 1967 yang juga dikenal sebagai Deklarasi Bangkok dengan latar belakang Perang Dingin dan transisi penuh gejolak menuju kemerdekaan yang terjadi di banyak negara Asia Tenggara.



■ Wawancara Para pendiri ASEAN (Ket: Tun Abdul Razak dari Malaysia diwakili oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj dan Narcisco Ramos dari Filipina diwakili oleh Carlos P Romulo)

Sumber: Cuplikan Gambar dari arsip video TVRI I nomor 148 yang berjudul "Lahirnya ASEAN", Daftar Koleksi TVRI Kelompok C13-C18 Tahun 1981-1986 (FL 23) dan (FL 24), ANRI

Deklarasi ASEAN 1967 merupakan inisiatif untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara melalui komitmen untuk bekerja sama dan menangani perbedaan secara damai.

Tujuan terbentuknya ASEAN pada pendiriannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya di kawasan tersebut melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Negara-negara anggota berharap untuk membentuk blok independen di Asia Tenggara, yang tidak akan didominasi atau dieksploitasi oleh kekuatan eksternal. Saat ini, gagasan tentang kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan non-intervensi di antara negara-negara anggota tetap menjadi prinsip utama persatuan dan kerja sama di ASEAN.

Adapun arsip mengenai ASEAN yang tercantum dalam Guide Arsip ini salah satunya adalah arsip video TVRI I nomor 148 yang berjudul "Lahirnya ASEAN", video yang berdurasi selama 38.34 menit ini ada dalam dalam Daftar Arsip Kelompok Koleksi Video TVRI Tahun 1982, Daftar Arsip Kelompok Koleksi Video TVRI Tahun 1982, Daftar Koleksi TVRI Kelompok C13-C18 Tahun 1981-1986 (FL 23), Daftar Koleksi TVRI Kelompok C13-C18 Tahun 1981-1986 (FL 24), Daftar Arsip Video TVRI Seri: Liputan Tahun 1982 (FL.27, ANRI 2009). Dalam arsip video tersebut menjelaskan bahwa dalam hubungan setiap negara anggota ASEAN satu sama lain,

harus patuh pada prinsip-prinsip dasar dari ASEAN antara lain: Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa; Hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan; Tidak ikut campur dalam urusan internal satu sama lain; Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai; Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan dan Kerjasama yang efektif di antara seluruh negara anggota.

Terdapat juga arsip kertas mengenai kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi dalam bentuk stensilan dengan tingkat perkembangan Asli dan Tembusan dengan periode dari tanggal 8 Agustus 1967 sampai dengan 16 Januari 1970, yang terdapat dalam Inventaris Arsip Sekretariat Kabinet Periode 1966-1971 dengan nomor arsip 71. Ditambah juga adanya arsip mengenai pembentukan sekretariat tetap berupa Gedung sekretariat ASEAN yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. Arsip-arsip tersebut berupa surat dari Presiden RI kepada ketua DPR RI mengenai pengesahan persetujuan pembentukan sekretariat tetap Asean, disertai lampiran mengenai *The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* atau Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara yang ditandatangani pada KTT ASEAN Pertama pada tanggal 24 Februari-31 Maret 1976, yang terdapat dalam Inventaris Arsip Sekretariat Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX 1973-1978, nomor arsip 208 serta arsip naskah

pidato pada upacara peresmian gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1981, yang terdapat dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara: Pidato Presiden Soeharto 1966- 1998 (Jilid I 1-760), Nomor arsip 347.

Selain arsip video dan kertas terdapat juga arsip foto mengenai pelaksanaan pertemuan ASEAN Summit 1987: Meeting of the Asian Heads of Government di kota Manila,

Filipina yang dijelaskan dalam foto tampak para pemimpin negara ASEAN yaitu Raja Brunai Darusalam, Bolkiah, Presiden Soeharto, PM. Mahathir Mohamad, Presiden Corozon Aquino, PM. Lee Kwan Yew, dan PM. Thailand Premtinsulaninda pada tanggal 14 Desember 1987, yang terdapat dalam Inventaris Arsip Foto Sekretariat Negara RI Tahun 1966-1989 nomor 38.

Melihat dari arsip-arsip yang

terdapat dalam khazanah Guide arsip Presiden Soeharto tersebut telah menunjukkan bahwa peran Indonesia di ASEAN cukup besar yaitu sebagai salah satu pendiri ASEAN, salah satu pemimpin di ASEAN, sering menjadi tuan rumah KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN, aktif dalam bidang kemanusiaan dan selalu berperan aktif dalam menjaga keamanan antara negara di wilayah Asia Tenggara.

Diplomasi menjadi salah satu



■ Logo ASEAN

Sumber: Cuplikan Gambar dari arsip video TVRI I nomor 148 yang berjudul "Lahirnya ASEAN". Daftar Koleksi TVRI Kelompok C13-C18 Tahun 1981-1986 (FL 23) dan (FL 24). ANRI

bagian yang tak terpisahkan dalam hubungan internasional. Melalui diplomasi ini Negara saling berebut pengaruh untuk meraih ataupun mempertahankan kepentingan nasional dikancah dunia internasional. Hal ini berkaitan erat dengan kepentingan nasional Indonesia pada saat itu, yaitu untuk menciptakan stabilitas nasional dari

segi ekonomi dan politik. Pada era Orde Lama politik luar negeri lebih fokus pada ranah global, maka pada era Orde Baru fokus politik luar negeri secara bertahap bergerak dari ranah regional kemudian ke ranah global. Pada tahap itu, Indonesia secara konsisten dan dengan tenang menunjukkan kemajuan yang pesat dalam segi ekonomi dan

pembangunan. ASEAN telah menjadi warisan atas periode kepemimpinan Soeharto yang berharga bagi politik luar negeri Indonesia dan masih bisa dirasakan pengaruhnya hingga kini serta menjadi sokoguru politik luar negeri Indonesia baik sekarang maupun ke depannya.



## DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H. SOSOK POLITISI PENGAWAL KONSTITUSI

**H**amdan Zoelva merupakan salah satu putra terbaik NTB yang berkiprah di dunia politik dan hukum. Beliau dilahirkan di Bima pada tanggal 21 Juni 1962 dari pasangan T.G. K.H. Muhammad Hasan, B.A. dan Hj. Siti Zaenab. Seperti anak kampung lainnya di Bima, Hamdan Zoelva sejak kecil juga dekat dengan madrasah dan sawah. Kedekatannya dengan madrasah tidak lepas pola asuh dari ayahnya yang seorang ulama dan juga guru sekolah. Sedangkan sawah merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat di desanya, karena desa Parado merupakan salah satu lumbung beras di Bima. Hamdan dan juga saudara-saudaranya sejak anak-anak diberi tanggung jawab oleh ayahnya untuk masing-masing mengelola satu petak sawah. Mereka kemudian berkompetisi untuk menunjukkan sawahnyalah yang paling subur dan menghasilkan banyak gabah. Secara tidak langsung hal itulah yang menumbuhkan sikap kerja keras dan tanggung jawab pada diri Hamdan Zoelva.

Sebagai putra seorang ulama, Hamdan Zoelva menempuh pendidikan madrasah ibtidaiyah di desanya. Namun ketika sang

ayah pindah tugas di Bima maka beliau bersekolah di sekolah dasar. Namun saat kembali ke desanya mengikuti sang ibu, Hamdan Zoelva kemudian melanjutkan di madrasah ibtidaiyah. Pada saat itu berpindah-pindah sekolah masih sangat mudah. Proses berpindah-pindah sekolah dijalani dari kelas 1 – 4. Setelah menginjak kelas 5 baru menetap di Bima hingga lulus sekolah dasar. Hamdan kemudian melanjutkan pendidikan di madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah di kota Bima. Setelah lulus sekolah, Hamdan Zoelva melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Fakultas Syariah IAIN Alaudin di Makassar. Minatnya sebenarnya menekuni bidang ilmu hukum, namun demi menyenangkan hati orang tua dan meneruskan tradisi keluarga ulama maka Hamdan Zoelva menempuh pendidikan di IAIN Alaudin. Selama kuliah beliau aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti lembaga pers mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bahkan di organisasi ini beliau dipercaya sebagai Ketua Badan Koordinasi HMI Indonesia Timur. Sebagai aktivis kampus beliau sempat mengorganisir demonstrasi mahasiswa dan sempat diburu



oleh aparat keamanan, “...satu hal yang justru tidak pernah saya lupa karena dikejar di situ oleh tentara gitu saya lari ke Universitas Muslim tidak jauh juga sekitar 2 kilo dari situ. Nah ketika di Universitas Muslim di depan kampus itu diangkut satu-satu ke truk militer, tapi saya tidak mau diangkut saya lari masuk sembunyi di jamban masyarakat, 3 jam saya sembunyi!” Kesibukan kuliah dan berorganisasi telah menyita waktu dan energinya, pada satu titik Hamdan Zoelva harus memutuskan untuk fokus di mana. Ia kemudian memilih untuk fokus di ilmu hukum dan melepas kuliah agama di IAIN. Padahal saat itu Hamdan Zoelva sudah hampir memperoleh gelar sarjana muda.

Setelah lulus kuliah pada tahun

## PROFIL

1986, Hamdan Zoelva sempat bekerja sebagai asisten dosen di Fakultas Hukum Unhas, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dan IAIN. Namun ketika dilakukan rekrutmen dosen beliau tidak lulus. Atas saran dari salah satu dosen pembimbingnya maka Hamdan Zoelva merantau ke Jakarta dan memulai karir sebagai seorang pengacara. Pertama kali beliau bergabung di kantor pengacara O.C. Kaligis & Associate pada tahun 1987. Kasus pertama yang ditangani adalah sengketa perburuhan antara Pertamina dengan mantan karyawannya. Setelah dua setengah tahun bekerja di bawah naungan pengacara senior O.C. Kaligis, Hamdan Zoelva dan beberapa pengacara muda bersepakat mendirikan kantor pengacara sendiri. Kantor pengacara itu kemudian diberi nama SPJH&J Law Firm yang tidak lain dari akronim para pendirinya, yaitu Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, Hamdan Zoelva, dan Januardi S. Haribowo. Pada tahun 1997 beliau meninggalkan law firm itu dan mendirikan kantor pengacara bernama Hamdan Zoelva, Sujana, Januardi & Partner (HSJ & Partner). Pada

tahun 2004, beliau bersama Januardi S. Haribowo mendirikan kantor pengacara yang diberi nama Hamdan & Januardi Law Firm.

### Karir Politik

Selain sibuk meniti karir sebagai pengacara profesional, Hamdan Zoelva juga aktif di berbagai organisasi keagamaan, beberapa di antaranya Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) bersama Egy Sujana. Pada saat itu, beliau juga mendirikan Asosiasi Pengacara Islam (API) ikut mendampingi korban Peristiwa Tanjung Priok. Pada awal era reformasi beliau dan tokoh umat Islam lainnya mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Pembentukan PBB merupakan hasil kompromi dari 22 ormas Islam. Secara ideologis, PBB merupakan reinkarnasi dari Partai Masyumi yang telah ada pada masa Orde Lama. Hamdan Zoelva kemudian diberi amanat menjadi Wakil Sekjen PBB. Ketika Pemilu 1999 berlangsung, Hamdan terpilih sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PBB mewakili daerah pemilihan NTB. Karena memiliki latar belakang di bidang hukum maka Hamdan Zoelva

ditempatkan di Komisi II yang membidangi urusan hukum dan politik. Beliau kemudian ditunjuk menjadi Wakil Komisi II dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Karir politik Hamdan Zoelva di PBB boleh dibilang moncer hal itu ditandai dengan didudukinya berbagai jabatan penting seperti Ketua DPP PBB, kemudian Wakil Ketua Umum PBB. Setelah mundur dari PBB, Hamdan Zoelva kemudian mendirikan dan menjadi Ketua Umum Partai Bintang Bulan. Partai ini berfungsi sebagai sekoci apabila PBB tidak lolos Pemilu 2004.

Selama menjadi anggota DPR, Hamdan Zoelva terlibat dalam berbagai peristiwa penting termasuk lobi-lobi politik dalam rangka pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, “saya hitung 7 bulan ya setiap malam rapat di tempatnya Arifin untuk evaluasi situasi...” Selain itu juga menjadi Panitia Ad Hoc I (PAH I) MPR yang bertugas melakukan amendemen UUD 1945. Tindak lanjut dari perubahan konstitusi tersebut adalah lahirnya lembaga tinggi negara yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Hamdan Zoelva kemudian juga terlibat dalam penyusunan



Rancangan Undang-undang MK. Sebagai legislator yang membidani RUU MK maka secara otomatis beliau juga terlibat dalam penyusunan organisasi maupun aturan hukum beracara di MK. Bahkan terlibat pula sebagai panitia fit and proper test dari DPR untuk calon hakim MK periode pertama

### **Kiprah di MK**

Setelah MK terbentuk, Hamdan Zoelva juga aktif dalam Forum Konstitusi sebagai sekretaris. Forum Konstitusi sendiri merupakan wadah dari para mantan anggota PAH I dan III MPR. Tujuan forum ini adalah untuk memelihara, menyediakan penelitian, dan sosialisasi hasil amendemen konstitusi sehingga diharapkan dapat secara aktif memasyarakatkan UUD 1945. Salah satu upaya memasyarakatkan UUD 1945 adalah dengan penerbitan beberapa buku seperti Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara RI 1945 dan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk siswa tingkat SD/madrasah ibtidaiyah, SMP/madrasah tsanawiyah, dan SMA/madrasah aliyah.

Tidak disadari keterlibatan Hamdan dalam membidani lahirnya MK terus berlanjut, bahkan tidak hanya membidani namun turut membesarkan MK. Hal itu ditandai dengan kehadirannya dalam sidang-sidang MK baik sebagai wakil DPR dalam sidang pengujian

undang-undang, wakil pemerintah mendampingi Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara dalam kasus sengketa hasil pemilu maupun pengujian undang-undang, sebagai pemohon atau kuasa pemohon, bahkan sebagai saksi ahli.

Pada tahun 2010, Hamdan Zoelva mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi dan berhasil terpilih. Hal itu bukanlah hal yang mengejutkan, sebagai orang yang pernah turut merumuskan UU MK, penguji calon hakim MK, dan pernah beracara di MK tentunya paham segala aspek tentang MK. Semua pertanyaan dari panitia seleksi dapat diantisipasi dan dijawab dengan baik oleh Hamdan Zoelva. Setelah menjabat sebagai hakim konstitusi termuda di usia 47 tahun, Hamdan secara bijak berhenti dari profesi pengacara dan meninggalkan seluruh aktivitas politiknya. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Pada bulan Oktober 2013, Ketua MK M. Akil Mochtar ditangkap oleh KPK karena kasus suap gugatan pemilukada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Dengan demikian terjadi kekosongan Ketua MK, Hamdan Zoelva yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua MK memimpin pemilihan internal di antara delapan hakim konstitusi. Dalam voting putaran pertama Hamdan Zoelva memperoleh 4 suara, Arief Hidayat 3 suara,

dan Ahmad Fadhil Suadi 1 suara. Karena tidak ada yang memperoleh 5 suara maka diadakan putaran kedua dengan hasil Hamdan Zoelva memperoleh 5 suara dan Arief Hidayat 3 suara. Dengan demikian Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua MK untuk periode 2013 - 2015.

Tantangan terbesar Hamdan Zoelva selama dua tahun memimpin MK ada dua. Tantangan pertama adalah mengembalikan marwah MK pasca penangkapan terhadap Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. Bagaimanapun citra MK sebagai lembaga penegak hukum harus tetap bersih di mata masyarakat. Tujuannya agar semua keputusan hukum yang dihasilkan MK memiliki legitimasi di mata masyarakat. Tantangan kedua adalah penyelesaian sengketa Pilpres 2014 yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Kedua tantangan tersebut berhasil diselesaikan dengan baik oleh Hamdan Zoelva selama dua tahun menjabat Ketua MK.



*Hamdan Zoelva saat menjadi Anggota DPR RI Periode 1999-2004  
Sumber: Arsip DPR MPR Tahun 2002*



Parno Nusantara

## PERENCANAAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN **ALIH MEDIA** ARSIP STATIS

**A**lih media arsip statis merupakan bagian dari kegiatan preservasi arsip statis secara preventif yang bertujuan dalam rangka pelestarian informasi arsip. Secara umum terdapat dua jenis alih media yaitu alih media dari format analog ke analog dan alih media dari format analog ke digital atau sebaliknya. Alih media arsip kertas ke microfilm/microfiche atau arsip foto negatif ke foto positif merupakan contoh alih media format analog ke analog sedangkan contoh alih media dari format analog ke digital adalah seperti arsip kertas ke format JPEG/PDF atau sebaliknya misalkan dari Arsip format Image (PDF/JPEG) di alihmedia ke dalam format microfilm, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi, maka kegiatan alih media arsip analog ke analog sudah jarang dilakukan kecuali

untuk kebutuhan *backup* fisik arsip, sedangkan kebutuhan alih media arsip ke dalam format digital menjadi sesuatu yang dibutuhkan saat ini dalam rangka penyediaan arsip digital untuk keperluan akses para pengguna.

Lembaga kearsipan sebagai pelaksana kegiatan alih media arsip statis harus senantiasa mempunyai kemampuan yang memadai dalam melaksanakan alih media sehingga arsip-arsip yang dilestarikan dapat terselamatkan informasinya dari kerusakan fisik arsip. Sebagaimana kita ketahui, sebuah media simpan arsip pasti akan mengalami kerusakan meskipun kegiatan preservasi dilakukan. Hal ini disebabkan karena kegiatan preservasi preventif hanya bersifat menunda waktu kerusakan bukan untuk menghilangkan kerusakan yang terjadi. Oleh

karena itu, apabila alih media tidak dilakukan dengan segera, maka ancaman kehilangan informasi akibat kerusakan fisiknya semakin nyata.

Selain itu, seiring dengan perubahan perkembangan media rekam arsip yang semakin cepat, tidak jarang ditemukan bahwa sebuah arsip tidak dapat dibuka informasinya terutama untuk jenis arsip audiovisual. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya peralatan alih media maupun tidak dimilikinya SDM yang mampu melakukan kegiatan tersebut. Ketidaktersediaannya peralatan alih media tersebut terjadi harganya yang mahal maupun sudah *obsolete* (tidak tersedia di pasaran).

### **Metode Pelaksanaan Alih Media**

Secara umum metode alih media terbagi menjadi tiga yaitu *copying*, migrasi, dan konversi. Berdasarkan

Peraturan ANRI No.2 Tahun 2021 tentang alih media arsip statis dengan metode konversi disebutkan bahwa secara umum terdapat tiga tahapan dalam melakukan alih media yaitu pra alih media, pelaksanaan alih media dan pasca alih media. Selain itu dari ketiga tahapan pelaksanaan tersebut, setidaknya terdapat 3 metode/strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan alih media yaitu:

1. Swakelola atau mandiri

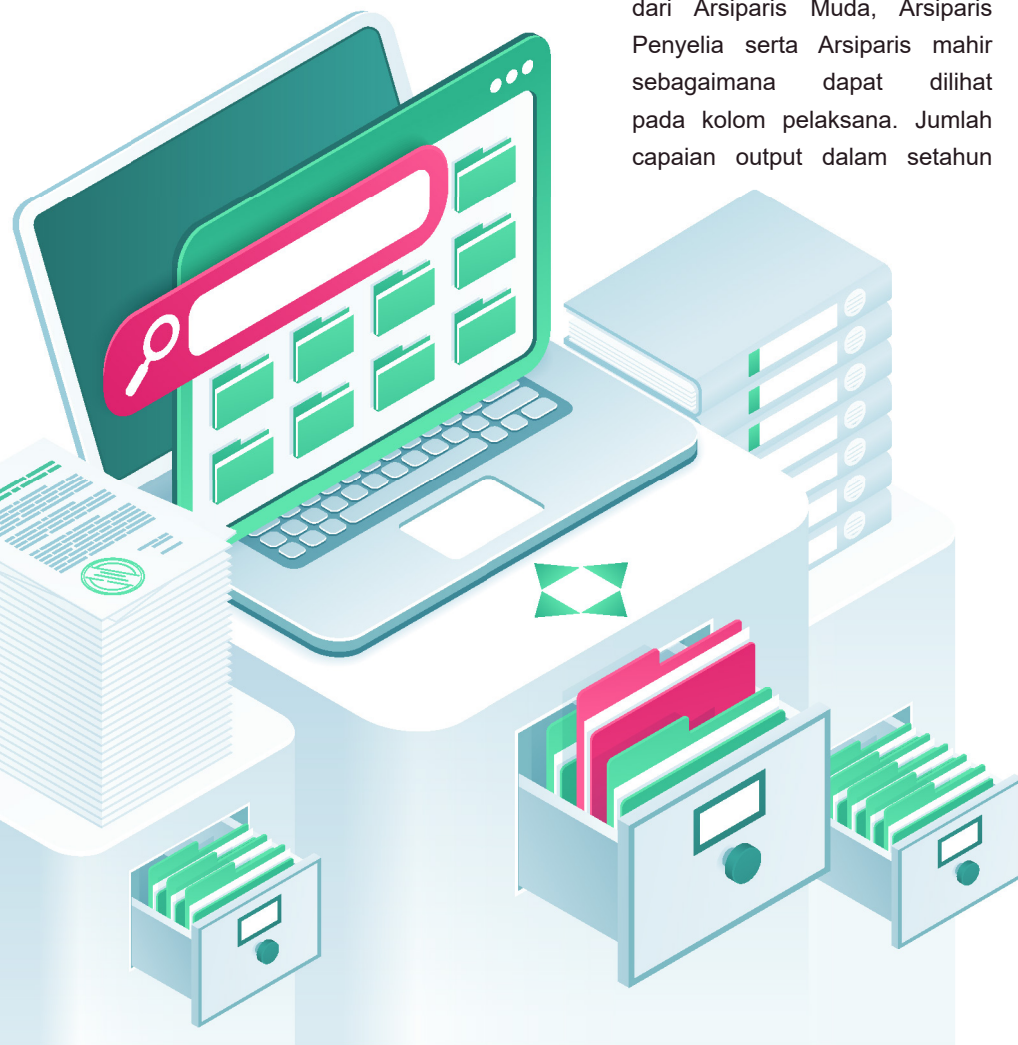
Komponen utama yang diperlukan untuk melakukan alih media arsip statis secara mandiri adalah Sumber Daya Manusia, baik fungsional arsiparis maupun fungsional lainnya yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dibidang alih media. Dengan adanya SDM tersebut, maka perencanaan kegiatan alih media dapat dilakukan, mulai dari sarana prasarana, legalisasi dan

otentikasi serta perencanaan kebutuhan anggaran mulai dari tahapan pra alih media, pelaksanaan serta pasca alih media sebagaimana PerANRI No.2 Tahun 2021. Dengan metode pelaksanaan swakelola ini, maka jumlah output yang dihasilkan akan bergantung kepada SDM pelaksana serta ketersediaan sarana prasarana mulai dari alat pemindai, *storage server*, *power system* sampai dengan *networking* untuk menyimpan hasil alih medianya. Sebagai contoh, berdasarkan SOP AP Direktorat Preservasi No. 101 Tahun 2020 tentang alih media arsip konvensional/ kertas ke Digital (Gambar 1) jumlah output yang dihasilkan dalam setahun sebanyak 20.000 image digital yang melibatkan 3 orang pelaksana yang terdiri dari Arsiparis Muda, Arsiparis Penyelia serta Arsiparis mahir sebagaimana dapat dilihat pada kolom pelaksana. Jumlah capaian output dalam setahun

tersebut, pada kenyataannya lebih besar dari jumlah tersebut karena ditambah dengan jumlah permintaan alih media dari pihak lain seperti permintaan khusus dari layanan ruang baca, penerbitan naskah sumber dan pameran serta pengguna lainnya. Pelaksanaan alih media secara swakelola/mandiri memiliki keuntungan diantaranya lebih terjaminnya kualitas hasil alih media yang dihasilkan, kemudahan dalam kontrol keamanan fisik arsip baik sebelum dan sesudah alih media, penanganan (*handling*) terhadap arsip serta keamanan arsip hasil alih medianya. Adapun kekurangan dari pelaksanaan alih media secara swakelola/mandiri adalah jumlah output yang dihasilkan tergantung pada ketersediaan SDM serta peralatan. Pada prinsipnya meskipun peralatan ditambah, namun SDMnya tetap maka jumlah outputnya tidak akan bertambah secara signifikan sehingga dalam hal ini diperlukan penambahan yang linier antara SDM dengan peralatan.

2. Jasa pihak ketiga

Sebagaimana metode pelaksanaan alih media secara mandiri, kegiatan alih media ke digital (digitisasi) dengan menggunakan jasa pihak ketiga merupakan suatu hal yang umum dilakukan. Beberapa lembaga kearsipan negara lain yang pernah melakukan hal tersebut diantaranya Malaysia, Singapura dan Korea Selatan. Kegiatan alih media yang dilakukan oleh pihak ketiga, pada umumnya dilakukan karena tidak dimilikinya SDM



pelaksana, keterbatasan peralatan alih media maupun dalam rangka percepatan digitalisasi arsip. Lembaga kearsipan tidak perlu menyediakan SDM maupun peralatannya, namun perlu menyusun aturan pelaksanaannya mulai dari standar kualitas hasil, penanganan fisik arsip, keamanan SDM, fisik arsip dan hasilnya, metode penyimpanan, metode backup, penyusunan daftar hasil

alih media, dan hal lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan dari Lembaga tersebut. Tahapan alih media arsip statis sebagaimana Peraturan ANRI No.2 Tahun 2021 mulai dari pra, proses dan pasca alih media pada dasarnya dapat dilakukan oleh pihak ketiga secara langsung namun bisa juga dilakukan kolaborasi dengan SDM Lembaga. Sebagai contoh jasa pihak ketiga hanya pada tahap

pelaksanaan sampai dengan pasca alih media, sedangkan tahapan pra alih media dilakukan oleh SDM Lembaga, atau tahapan lainnya tergantung dari ketentuan aturan yang telah disepakati. Kelebihan dari metode alih media dengan jasa pihak ketiga adalah tidak diperlukannya pengadaan peralatan secara mandiri dengan anggaran yang besar apalagi bila jumlah arsipnya harus dapat

No	Tahap Kegiatan	Pelibatan					Mata Daku			Keterangan
		Direktur Preservasi	Anggota Badan Koordinasi Represkasi dan Digitalisasi Arsip	Anggota Muda	Anggota Paripale	Anggota Muda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan arahan untuk melakukan kegiatan reproduksi dan digitalisasi arsip konvensional						Program Kerja	30 menit	Surat Perintah	
2	Melakukan identifikasi rencana arsip konvensional yang akan didigitalisasi melalui inventaris fisik asli, akses program yang bisa serta melihat file arsip pada setiap tahap arsip						Surat Perintah	120 menit	Laporan Identifikasi Rencana Arsip Konvensional	
3	Melakukan kontrol untuk memastikan akses pengendalian arsip konvensional ke sistem telah digital secara konduktif sebelum Pengiriman Arsip Baru Memeriksa arsip konvensional yang akan didigitalisasi						Surat Perintah, Laporan Identifikasi Rencana Arsip Konvensional	60 menit	Arsip konvensional yang akan didigitalisasi	
4	Mengidentifikasi media alihmedia dan menyiapkan standar hasil alihmedia arsip konvensional yang akan dilakukan Memastikan setiap tindakan yang arsip digital arsip konvensional yang akan didigitalisasi Menyusun dan menetapkan arsip dari hasil identifikasi yang akan dilakukan						Laporan Identifikasi Media arsip konvensional yang akan didigitalisasi	315 menit	Laporan media arsip konvensional yang akan didigitalisasi	
5	Melakukan identifikasi media arsip konvensional yang akan didigitalisasi melalui jumlah arsip, kesesuaian objek dengan formatnya serta kondisi file arsip Memastikan arsip yang akan didigitalisasi dengan membuka bundle dan mengecek arsip per lembar Memastikan media pemrosesan/transfer arsip yang akan didigitalisasi						Arsip konvensional yang akan didigitalisasi	6000 menit	Laporan identifikasi media arsip konvensional yang akan didigitalisasi dan Arsip Konvensional yang akan didigitalisasi	
6	Mempersiapkan peralatan pendukung Menyiapkan peralatan server yang diperlukan untuk digitalisasi, peralatan yang diperlukan untuk arsip yang akan didigitalisasi Memastikan kapasitas arsip hasil alihmedia						Survei, Matrik Reproduksi, Laporan Identifikasi	400 menit	Peralatan alihmedia arsip digitalisasi	
7	Melakukan pendataan arsip konvensional arsip per tahap						Arsip konvensional, Peralatan alihmedia arsip konvensional yang digitalisasi	6000 menit	File digital arsip konvensional hasil alihmedia	

No	Tahap Kegiatan	Pelibatan					Mata Daku			Keterangan
		Direktur Preservasi	Anggota Badan Koordinasi Represkasi dan Digitalisasi Arsip	Anggota Muda	Anggota Paripale	Anggota Muda	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Melakukan digitalisasi arsip konvensional yang akan didigitalisasi (gagal) ke dalam format alihmedia									
9	Melakukan Quality Control terhadap arsip hasil alihmedia melalui pemeriksaan hasil alihmedia dengan arsip fisik asli, format file, tanggal, metadata, transfer, arsip pemrosesan file									
10	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
11	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
12	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
13	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia ke DVD									
14	Melakukan format baru arsip pelaksanaan digitalisasi arsip konvensional dan format kompresi penyimpanan alihmedia arsip alihmedia									
15	Menggunakan media penyimpanan digitalisasi arsip konvensional									
16	Melakukan penyediaan alihmedia arsip hasil alihmedia									
17	Melakukan digitalisasi media arsip konvensional yang akan didigitalisasi ke server melalui arsip konvensional hasil alihmedia, Daftar Arsip hasil alihmedia, Daftar Arsip dan Perencanaan Aplikasi Manajemen Arsip Server									
18	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
19	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
20	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
21	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
22	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
23	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
24	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
25	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
26	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
27	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
28	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
29	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
30	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
31	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
32	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
33	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
34	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
35	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
36	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
37	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
38	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
39	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
40	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
41	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
42	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
43	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
44	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
45	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
46	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
47	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
48	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
49	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
50	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
51	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
52	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
53	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
54	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
55	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
56	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
57	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
58	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
59	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
60	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
61	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
62	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
63	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
64	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
65	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
66	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
67	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
68	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
69	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
70	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
71	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
72	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
73	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
74	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
75	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
76	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
77	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
78	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
79	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
80	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
81	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
82	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
83	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
84	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
85	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
86	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
87	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
88	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
89	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
90	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
91	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
92	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
93	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
94	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
95	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
96	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
97	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
98	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
99	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									
100	Melakukan digitalisasi arsip konvensional hasil alihmedia									

■ Standar Operasional Prosedur tentang Alihmedia Arsip Konvensional ke Digital / SOPAP Direktorat Preservasi No. 101 Tahun 2020 tentang alih media arsip konvensional/kertas ke Digital

diselesaikan dalam 2 atau 3 tahun. Selain itu, jumlah output arsip yang dialihmediakan bisa lebih banyak tergantung dengan kebutuhan dan biaya yang dimiliki. Akan tetapi terdapat kekurangan dari metode ini yaitu kualitas hasil alih media yang diragukan apabila pelaksana pihak ketiga bukan profesional dibidangnya, diperlukan pengamanan dan monitoring yang sangat ketat pada saat pelaksanaannya supaya tidak ada fisik arsip yang menjadi rusak karena proses alih media serta hasil alih media (file digital) tidak terbawa keluar.

3. Jasa tenaga alih media (outsourcing)  
Berbeda halnya dengan jasa pihak ketiga, metode jasa tenaga alih media dilakukan dengan merekrut SDM pelaksana *capturingnya* saja. Dalam hal ini, peralatan alih media sudah tersedia di lembaga kearsipan namun keterbatasan SDM pelaksana sedangkan jumlah output yang ditetapkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan pengerjaan

alih media yang dilakukan secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, metode jasa tenaga alih media hanya akan melakukan kegiatannya pada tahap kedua alih media sebagaimana PerANRI No.2 Tahun 2021 yaitu pada tahap pelaksanaan alih media, sedangkan tahap pra dan pasca alih media akan dilakukan oleh SDM Lembaga. Keuntungan dari jasa tenaga alih media ini adalah jumlah output yang dihasilkan dapat lebih banyak dibandingkan

metode alih media yang dilakukan secara swakelola/mandiri. Selain itu, dari aspek keamanan dapat lebih terjamin dibanding metode alih media arsip oleh pihak ketiga karena monitoring dan pengawasan langsung dilakukan oleh SDM Lembaga. Namun terdapat kekurangan dalam metode dengan jasa tenaga alih media yaitu cara ini tergantung dari ketersediaan peralatan yang dimiliki. Meskipun pengadaan jasa tenaga alih media ditambah jumlahnya, namun bila jumlah peralatannya tetap, maka jumlah outputnya tidak dapat diperbanyak. Keterbatasan peralatan ini terjadi terutama pada arsip-arsip audio visual dengan format tertentu, karena keterbatasan pemutar yang sudah tidak diproduksi lagi di pasaran.

#### **Contoh Perhitungan perencanaan pelaksanaan alih media arsip**

Berikut ini adalah ilustrasi dari strategi percepatan alih media yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode pelaksanaan alih media yang telah diuraikan.

Sebuah lembaga kearsipan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel.1, Tahun 2021 memiliki kemampuan melakukan alih media arsip statis secara mandiri selama setahun sebanyak 25.000 image/nomor/file digital dengan rincian 20.000 arsip kertas, 2500 arsip foto dan 2500 arsip peta. Jumlah output tersebut dihasilkan dari ketersediaan SDM pelaksana serta jumlah peralatan yang dimiliki di Tahun 2021. Pada Tahun 2021, lembaga tersebut menambah jumlah peralatan yang dimiliki, dan telah menetapkan jumlah output sebanyak 80.000 image/file

digital yang terdiri dari 60.000 arsip kertas, 10.000 arsip foto dan 10.000 arsip peta. Dengan kondisi Existing sebagaimana pada Tabel 1, SDM pelaksana melakukan kegiatan alih media secara keseluruhan, mulai dari pra alih media, proses *capturing* (pelaksanaan) sampai dengan pasca alih media sebagaimana perANRI No.2 Tahun 2021. Dengan adanya penambahan target di Tahun 2022, maka rencana yang paling memungkinkan adalah menambah SDM pelaksana. Penambahan SDM pelaksana alih media dapat dilakukan melalui penambahan SDM *existing* lembaga tersebut atau mengadakan jasa tenaga alih media (*outsourcing*) yang berkompeten. Apabila dilakukan penambahan SDM *existing* dari Lembaga tersebut, harus dapat dipastikan bahwa SDM tersebut telah mempunyai kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan sebagaimana SDM *existing* yang ada. Maka jumlah SDM tambahan yang dibutuhkan sebanyak 9 orang sebagaimana tertera pada Tabel 1 yaitu kolom alat yang belum ada SDM.

Namun strategi lain dapat dilakukan yaitu pengadaan jasa tenaga alih media (*outsourcing*) untuk memenuhi jumlah output target yang ditetapkan Tahun 2022. Jasa tenaga alih media hanya akan melakukan proses *capturing* secara terus menerus untuk memaksimalkan peralatan yang dimiliki dengan jumlah arsip seperti pada kolom target di Tabel 2, sedangkan SDM kegiatan pra dan pasca alih media akan dilakukan oleh SDM *existing*. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas hasil alih media yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dimana terjadinya *quality*

*control* terhadap fisik arsip sebelum dilakukan alih media serta *quality control* terhadap arsip hasil alih mediana. Berdasarkan perhitungan maka jumlah tenaga *outsourcing* yang dibutuhkan sebanyak 14 orang untuk melakukan proses *capturing* 80.000 image/nomor/file digital sebagaimana Tabel 2 pada kolom *capturing*. Jumlah tenaga alih media akan lebih banyak tergantung dari lamanya waktu kontrak yang ditetapkan. Jumlah yang tertera pada kolom *capturing* di Tabel.2 merupakan jumlah maximal yang dibutuhkan, dengan asumsi pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada bulan keempat di tahun berjalan.

Sementara itu contoh perhitungan terkait jasa alih media oleh pihak ketiga, dapat direncanakan tergantung dari kebutuhan dan kemampuan Lembaga tersebut untuk menyelesaikan lamanya alih media dilakukan. Adapun ilustrasinya sebagai berikut:

Sebuah Lembaga kearsipan memiliki khasanah arsip statis yang terdiri dari arsip kertas, arsip foto, peta, arsip film dan arsip video seperti terlihat pada Tabel 3. Dari 2 perhitungan sebelumnya, maka dapat dikalkulasikan berapa lama arsip statis yang dimiliki akan selesai dilakukan alihmedia dengan rumusan membagi jumlah khasanah arsip dengan target sehingga diketahui berapa lama waktu penyelesaiannya sebagaimana dapat dilihat pada kolom waktu penyelesaian pada Tabel 3 tersebut.

1 ML diasumsikan sebanyak 70.000 image/halaman arsip. Hal ini diperoleh dari perhitungan bahwa 1 ML terdiri dari 5 boks arsip ukuran 20 cm dimana masing-masing boks terdiri dari 700 lembar arsip, sehingga dalam 1 ML terdiri dari 3500 lembar/7000

Tabel.1 Kondisi Existing Alih Media 2021 dan perencanaan 2022

KONDISI EXISTING TAHUN 2021				KONDISI TAHUN 2022		
Arsip	Jumlah Alat	Target/ Tahun	SDM Existing	Tambahan Alat 2021	SDM yang Kurang	Jumlah arsip ditargetkan
Kertas	2	20.000	3	4	3	60.000
Foto	1	2.500	1	3	3	10.000
Peta	1	2.500	1	3	3	10.000

Tabel 2. Contoh ilustrasi jasa tenaga (outsourcing) alih media

Jenis Arsip	Target/ Tahun	Jumlah Alat	SDM Existing	Kebutuhan SDM kegiatan Alih media		
				Pra	Capturing	Pasca
Kertas	6	3	3	3	6	3
Foto	4	1	1	1	4	1
Peta	4	2	1	1	4	1

Tabel 3. Estimasi waktu penyelesaian alih media mandiri dan outsourcing

Jenis Arsip	Satuan	Jumlah Khazanah	Mandiri		Jasa Tenaga (Outsourcing)	
			Target/ Tahun	Waktu Penyelesaian	Target/ Tahun	Waktu Penyelesaian
Kertas	ML	10.000	20.000	3.500 Tahun	60.000	1.167 Tahun
Foto	Lembar	2.000.000	2.500	800 Tahun	10.000	200 Tahun
Peta	Lembar	1.000.000	2.500	400 Tahun	10.000	100 Tahun
Video	Kaset	200.000	200	1.000 Tahun	-	-
Film	Reel	500.000	500	1.000 Tahun	-	-

halaman. Bila alih media dilakukan secara mandiri sebagaimana target/ tahun yang telah ditetapkan, maka untuk menyelesaikan arsip kertas dibutuhkan waktu selama 3.500 tahun, arsip Foto 800 tahun, dan arsip peta 400 tahun. Sementara itu, apabila target output yang ditargetkan dengan menggunakan jasa tenaga alihmedia sebagaimana target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka waktu penyelesaian teralih mediakannya seluruh khazanah arsip statis tersebut adalah 1.167 tahun

untuk arsip kertas, 200 tahun untuk arsip Foto dan 100 tahun untuk arsip peta. Untuk arsip Video dan Film tidak dapat dilakukan perhitungan karena tidak ada penambahan peralatan untuk kedua jenis arsip tersebut. Semakin banyak jumlah output yang dialihmediakan maka waktu penyelesaian kegiatan alih media semakin cepat, demikian juga sebaliknya.

Dari jumlah khazanah tersebut, maka dapat dibuat sebuah perencanaan berapa lama arsip

tersebut akan selesai dialihmediakan tergantung target jumlah arsip per tahunnya. Tabel 4 berikut mensimulasikan berapa banyak arsip yang harus dialihmediakan setiap tahunnya apabila kegiatan alihmedia ingin diselesaikan dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, waktu untuk menyelesaikan alihmedia arsip kertas dengan jumlah 10.000ML, apabila ingin diselesaikan dalam waktu 5 tahun maka jumlah arsip yang harus dialihmediakan setiap tahunnya sebanyak 14.000.000



Tabel 4. Simulasi perhitungan selesainya (tahun pelaksanaan) waktu alih media dilakukan

Jenis Arsip	Satuan	Jumlah Khazanah	Estimasi Lamanya waktu (Tahun) Alih Media					
			50 Tahun	40 Tahun	30 Tahun	20 Tahun	10 Tahun	5 Tahun
Kertas	ML	10.000	1.400.000	1.750.000	2.333.334	3.500.000	7.000.000	14.000.000
Foto	Lembar	2.000.000	40.000	50.000	66.667	100.000	200.000	400.000
Peta	Lembar	1.000.000	20.000	25.000	33.333	50.000	100.000	200.000
Video	Kaset	200.000	4.000	5.000	6.667	10.000	20.000	40.000
Film	Reel	500.000	10.000	12.500	16.667	25.000	50.000	100.000

image, sedangkan apabila kemampuan penyelesaian output setiap tahunnya hanya 1.400.000 image, maka waktu penyelesaiannya selama 50 tahun. Demikian juga halnya dengan arsip lainnya, sebagai contoh arsip video dengan jumlah 200.000 kaset. Bila dalam setahun bisa menyelesaikan alihmedia arsip video sebanyak 40.000 kaset, maka semua khazanah arsip tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun, namun bila dalam setahun berhasil menyelesaikan arsip sebanyak 4.000 kaset maka, arsip tersebut dapat terselesaikan dalam waktu 50 tahun.

Dari simulasi tersebut, dapat diketahui semakin banyak jumlah output yang dialihmediakan, maka semakin cepat waktu penyelesaian teralihmediakannya arsip tersebut, demikian juga sebaliknya. Namun demikian, semakin lama alihmedia dilakukan, maka terancamnya kehilangan informasi pada arsip terutama audio visual, semakin cepat seiring dengan ketersediaan alat baca dari arsip tersebut. Beberapa pakar audio visual sudah memberikan informasi bahwa Tahun 2025 *player* arsip video terutama kaset pita

magnetik akan hilang dipasaran, sehingga diperlukan percepatan penyelamatan informasinya.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa metode untuk melakukan percepatan alih media dapat dipilih sesuai dengan kemampuan pemilik/pelestari arsip terutama di Lembaga Kearsipan. Dalam memilih metode percepatan alih media tersebut, hendaknya memperhatikan kebutuhan kualitas dari *output file* yang dibutuhkan sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bagian dari longterm *preservation*. Metode pelaksanaan alih media arsip dapat dipilih satu diantara ketiga metode yang telah diuraikan maupun gabungan antara dua atau ketiga metode tersebut. Selain itu, satu hal yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah kegiatan alih media adalah *quality control* untuk memastikan bahwa hasil alih media baik yang dilakukan secara swakelola, *outsourcing* maupun pihak ketiga telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan akselerasi alihmedia bukan hanya berbicara mengenai pelaksanaan *capturingnya* saja namun yang terpenting adalah hasil

dari proses tersebut sesuai dengan kualitas yang telah di kontrol dari mulai pra alihmedia sampai pasca alihmedia. Dengan demikian, maka ketika target output Tahun 2022 telah ditetapkan seperti pada uraian Tabel 1, untuk mencapai target tersebut diperlukan penambahan SDM yang berkualitas dengan jumlah tertentu apabila dilakukan secara metode swakelola, *outsourcing* maupun pihak ketiga untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan tetap menjaga kualitas hasil alih media yang sesuai dengan standar.



MENGENAL

# MUNICH CENTRAL COLLECTIVE POINT

Depo Penyimpanan Arsip Perang Dunia II

Dharwis W.U. Yacob

Munich adalah kota terbesar di negara bagian Bayern di Jerman. Munich merupakan kota berpenduduk terbesar ketiga di Jerman setelah Berlin dan Hamburg. Kota ini terletak di sungai Isar, bagian utara dari Bavarian Alps. Kota ini juga merupakan kota penyelenggara Olimpiade Tahun 1972 serta selaku tuan rumah Piala Dunia Tahun 1974 dan 2006. Munich adalah rumah bagi beberapa tim sepak bola profesional termasuk Bayern Munich, klub sepakbola paling sukses di Jerman dan beberapa pemenang Liga Champions UEFA.

Kota ini terdiri dari beragam macam bangunan mulai dari gedung

bersejarah sampai gedung-gedung modern impresif, karena kota ini berusaha merekonstruksi bangunan bersejarah mereka tetapi juga membuat bangunan baru yang bisa menjadi simbol kota. Munich memiliki kekuatan ekonomi di atas kota-kota lainnya di Jerman dengan tingkat pengangguran terendah (5.4%). Kota ini juga merupakan pusat ekonomi di kawasan Jerman Selatan. Kota ini juga menjadi kantor pusat dari beberapa perusahaan besar seperti Siemens AG (elektronik), BMW (mobil), MAN AG (produsen truk), Linde (gas), Allianz (asuransi), Munich Re (*re-insurance*), dan Rohde

& Schwarz (elektronik).

Kota ini memiliki perpaduan eklektik antara arsitektur bersejarah dan modern karena bangunan bersejarah yang hancur dalam Perang Dunia II dibangun kembali, dan landmark baru



Suasana Pusat Kota Munich, April 2019



Suasana Kota Munich, 2022



# Allianz Arena

Stadion olahraga di Kota Munich, April 2019

FOTO: PENULIS

terus dibangun. Di pusat kota dikenal dengan nama Marienplatz yaitu alun-alun terbuka besar dengan bangunan utama yaitu Balai Kota Lama dan Baru

Munich berasal bahasa Jerman Kuno yang berarti “para biarawan”. Seorang biarawan juga digambarkan di lambang kota Munich. Nama dalam bahasa Jerman modern adalah München, tetapi ini telah diterjemahkan secara beragam dalam bahasa yang berbeda: dalam bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan berbagai bahasa lainnya sebagai “Munich”, dalam bahasa Italia sebagai “Monaco di Baviera”, dalam bahasa Portugis sebagai “Munique”.

Munich, atau München didirikan oleh para biarawan dari biara Benediktin di Tegernsee, yang didirikan pada 750 M. Pada tahun 1157, Heinrich the Lion, pemimpin Bavaria, memberikan hak kepada para biarawan untuk mendirikan wilayah dari Salzburg menuju Sungai Isar. Para biarawan mendirikan wilayah tersebut dengan nama Munichen dan pada tahun 1158 serta setengah abad kemudian diberikan status sebagai kota dan dibuatlah benteng. Pada awalnya, Otto dari Wittelsbach dan Heinrich the Lion berseteru

memperebutkan kota tersebut. Pada tahun 1180, dengan dijatuhkannya sanksi kepada Heinrich the Lion, Otto dari Wittelsbach menjadi pemimpin Bayern. Dinasti Wittelsbach kemudian menguasai Bayern sampai tahun 1918. Pada tahun 1255, Kekaisaran Bayern dibagi menjadi dua dan Munich menjadi bagian dari Residen Bayern Hulu. Pada tahun 1327, seluruh kota dilalap api, namun berhasil dibangun kembali beberapa tahun kemudian oleh Ludwig IV yang merupakan Kaisar Romawi pada waktu itu. Pada tahun 1632, kota tersebut dikuasai oleh Gustav II Adolf dari Swedia pada Perang Tigapuluh Tahun. Pada tahun 1705, kota tersebut dapat direbut kembali dan dimasukkan ke dalam wilayah Habsburg.

Louis I, Raja Bavaria, memimpin Munich dari tahun 1825 hingga 1848. Louis I merencanakan dan menciptakan Munich modern dengan membayar para arsitek ulung. Para arsiteknya membuat ciri khusus khas kota Munich di gedung-gedung publik yang mereka rancang. Abad ke-19 adalah periode pertumbuhan dan perkembangan terbesar Munich. Penduduk kota yang pada awalnya berjumlah 100.000 jiwa pada tahun

1854 tumbuh menjadi 500.000 jiwa pada tahun 1900. Dinasti Wittelsbach mengakhiri kekuasaannya di wilayah Munich dengan diasingkannya Louis III pada bulan November 1918. Saat itu pula, Adolf Hitler bergabung dengan Partai Nazi dan menjadi pemimpinnya.

Setelah pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, kehidupan di Munich menjadi sangat sulit, karena blokade Sekutu terhadap Jerman menyebabkan kekurangan makanan dan bahan bakar. Selama serangan udara Prancis pada tahun 1916, tiga bom jatuh di Munich. Setelah Perang Dunia I, kota ini menjadi pusat kerusuhan politik. Setelah pembunuhan Perdana Menteri Republik Pertama Bavaria Kurt Eisner pada Februari 1919 oleh Anton Graf von Arco auf Valley, Republik Soviet Bavaria diproklamasikan. Republik Soviet Bavaria dibubarkan pada 3 Mei 1919 oleh Freikorps. Sementara pemerintah republik telah dipulihkan, Munich menjadi sarang politik di antaranya Adolf Hitler dan partai yang dikenal dengan nama Nationalsozialismus (Nazi).

Pada tahun 1923, Adolf Hitler dan para pendukungnya,

yang terkonsentrasi di Munich, melaksanakan kegiatan yang disebut *Beer Hall Putsch*. *Beer Hall Putsch* adalah sebuah upaya untuk menggulingkan Republik dan merebut kekuasaan. P e m b e r o n t a k a n n y a ternyata mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut mengakibatkan penangkapan Adolf Hitler dan melumpuhkan sementara Partai Nazi. Kota ini kembali menjadi penting bagi Partai Nazi ketika mereka mengambil alih kekuasaan di Jerman pada tahun 1933.

Perang Dunia II atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat menjadi PDII atau PD2) adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan yaitu Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer. Ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian

massal warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan, perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah


kematian ini menjadikan Perang Dunia II menjadi konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Munich mengalami rusak berat oleh pemboman Sekutu selama Perang

*Munich Central Collecting Point* adalah depot penyimpanan arsip yang dikhususkan mengenai peristiwa Perang Dunia II. Arsip yang disimpan adalah arsip yang sebelumnya disita oleh Partai Nazi. *Munich Central Collecting Point* memiliki fungsi untuk mengolah, menyimpan, melayani, serta mendistribusikan kembali arsip yang sebelumnya disita oleh partai Nazi yang selama ini disembunyikan di seluruh Jerman dan ditemukan oleh Sekutu pada akhir Perang Dunia II. Arsip-arsip tersebut terutama adalah arsip kertas dan arsip foto seputar dokumentasi visual Perang Dunia II. Tujuan utama *Munich Central Collecting Point* adalah penyelamatan dan pengembalian arsip terkait Perang Dunia II ke negara-negara bersangkutan. Proses pengembalian arsipnya dengan cara yaitu pertama dengan mengidentifikasi objek arsipnya kemudian difoto atau direproduksi dan kemudian diusahakan untuk dikembalikan ke negara asalnya. *Munich Central Collecting Point* sampai saat ini menjadi pusat penelitian tentang Perang Dunia II meskipun secara fisik sejak tahun 1951 sudah tidak mengalami penambahan khazanah arsip.

Jauh sebelum berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat sudah mulai mempertimbangkan bagaimana arsip bisa ditangani setelah perang. *The American Commission for the*



Gedung *Munich Central Collecting Point* Tahun 2022

Classification: <b>Painting</b>	Property Card Art. A. Mun. <b>WIE 6299</b>	
Author: <b>Unknown 20th cent.</b>	Subject: <b>View of a town</b>	Personal Owners:
Measurements: W H <b>23,5 x 9,2cm</b>	Material: <b>Watercolour on paper</b>	Inv. No. Car. No.
Depositor: <b>Museen der Stadt München</b>	Arrival Condition: <b>good - undamaged</b>	
Identifying Marks: <b>122</b>	Description: <b>View of Arabian houses in pale blue colour. Framed under glass</b>	
Bibliography:	FOR OFFICE USE: Claim No. Other Photos: Yes No Neg. No. File No. <b>In shipment 229</b> Remarks:	

Contoh Kartu Deskripsi Arsip di *Munich Central Collecting Point*

Dunia II, dengan 71 serangan udara selama lima tahun. Pasukan Amerika Serikat membebaskan Munich pada 30 April 1945.



Suasana registrasi arsip yang masuk Munich Central Collecting Point sekitar tahun 1945



Suasana reproduksi arsip di Munich Central Collecting Point sekitar tahun 1945



Kedatangan Benito Mussolini, Perdana Menteri Italia, disambut oleh Adolf Hitler dalam rangka mengikuti konferensi di Munich, 28 September 1938. Sumber Arsip: Munich Central Collecting Point, Bundesarchiv Bild 183-H12939 / CC-BY-SA 3.0



Pasukan Jerman tiba di Dam Square, Amsterdam, tahun 1940. Sumber Arsip: Munich Central Collecting Point, Bundesarchiv Bild 183-L23001 / CC-BY-SA 3.0



Prajurit Panzer Jerman beristirahat di Maastricht, 10 Mei 1940. Sumber Arsip: Munich Central Collecting Point, Bundesarchiv Bild 146-1981-084-34 / CC-BY-SA 3.0



Suasana Jalan Clodna, Kota Warsawa, Polandia, 1942. Sumber Arsip: Munich Central Collecting Point, Bundesarchiv Bild 1011-270-0298-14 / Amthor / CC-BY-SA 3.0

*Protection and Salvage of Historic Monuments in War Areas* (Komisi Amerika untuk Perlindungan dan Penyelamatan Monumen Bersejarah di Area Perang) dengan ketuanya Owen J. Roberts mulai memikirkan hal tersebut pada bulan Agustus 1943. Kegiatan awalnya adalah penyusunan daftar arsip sehingga dapat didokumentasikan dan dilindungi jika terjadi serangan militer. Selain itu pula, untuk menghindari penjarahan akibat perang, Sekutu mendirikan *Central Collecting Points*. Setelah Perang Dunia II, Sekutu mendirikan beberapa titik *Central Collecting Points*. Beberapa Gedung Partai Nazi diubah menjadi gedung milik *Central Collecting Points* termasuk yang terdapat di Munich. Jumlah arsip di *Munich Central Collecting Point* diinventarisasi dan dideskripsi

kepada Herbert S. Leonard. Pada tanggal 31 Agustus 1948, Amerika Serikat mengalihkan tugas perwalian, perawatan, pengawasan, dan pemeliharaan arsip di *Munich Central Collecting Point* kepada Pemimpin Bavaria. Pada tanggal 22 Februari 1952, arsip-arsip di bawah kepemimpinan Bavaria dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri Jerman Barat Departemen Kebudayaan. Departemen Kebudayaan membentuk bagian khusus bernama *Treuhandverwaltung von Kulturgut* (Kantor Administrasi Wali Amanat Benda Budaya/ TVK). Arsip-arsip yang berkaitan dengan

dalam sebuah *Munich Central Collecting Point database*. Database ini bisa dicari secara online yaitu dengan membuka situs <http://www.dhm.de/datenbank/ccp/>. Database sampai saat ini terdiri dari 170.000 entri dan sekitar 300.000 deskripsi foto.

Craig Hugh Smyth merupakan pendiri dari *Munich Central Collecting Point* pada bulan Juli 1945. Craig Hugh Smyth mengubah bekas kantor Partai Nazi menjadi depot penyimpanan arsip lengkap dengan studio fotografi dan laboratorium konservasi. Seluruh kegiatan di *Munich Central Collecting Point* diserahkan

perlahan-lahan didistribusikan dan disimpan ke Amerika Serikat tepatnya ke Arsip Nasional Amerika Serikat (*National Archives and Record Administration/NARA*). Salinan arsip foto, salinan microfilm, dan sarana bantu penemuan kembali arsip statis diletakkan di Galeri Nasional (*National Gallery of Art*), Washington DC. Craig Hugh Smyth juga telah mengembangkan sistem kearsipan dengan sistem kartu inventaris selama satu tahun lamanya. Sistem tersebut terus digunakan oleh *Munich Central Collecting Point* sampai sekarang. Khazanah arsip terbesarnya adalah khazanah arsip *Bundesarchiv*.

*Munich Central Collecting Point* menjadi contoh bagi dunia internasional bahwa meskipun secara fisik dalam penambahan khazanah arsip sudah terhenti tetapi masih berfungsi sampai sekarang terutama kepada peneliti-peneliti yang terfokus pada peristiwa Perang Dunia II. Bahkan hingga sekarang, *Munich Central Collecting Point* masih melayani kebutuhan pengguna terhadap arsip dengan menggunakan database yang baik dan mampu melayani secara online untuk fasilitas penggunaan arsipnya. Walaupun dalam usaha penyelamatan arsipnya dilakukan oleh NARA tapi *Munich Central Collecting Point* tetap menjadi rujukan penelitian arsip mengenai Perang Dunia II di dunia internasional.

Database on the "Munich Central Collecting Point"

Search

Munich No.

Linz No.

File/Database?

File card/Object Image?

Object/Title?

Object type?

Material/Technique?

Artist?

Society?

Keyword?

Receipt/Issue?

Object date?

Object date (verbal)?

Mu-No.:

Search

Linz-No.:

Search

Pencarian arsip secara online yang terdapat di Munich Central Collecting Point melalui situs <http://www.dhm.de/datenbank/ccp/>.

DIORAMA ARSIP JOGJA:

# PERJALANAN EMPAT ABAD SEJARAH JOGJA

FOTO : dioramaarsip.jogjaprov.go.id

Jika Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, saat ini Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta memiliki Diorama Arsip Jogja yang mengisahkan perjalanan 430 tahun sejarah D.I Yogyakarta. Pada 24 Februari 2022, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I Yogyakarta meresmikan Diorama Arsip Jogja yang terletak di Lantai 1 Gedung Depo Arsip D.I Yogyakarta, Jalan Janti, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Peresmian dilakukan oleh Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan didampingi oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto, serta turut hadir Ketua DPRD D.I Yogyakarta Nuryadi, Deputi II Perpustakaan Nasional RI, Kepala DPAD D.I Yogyakarta, Monika Nur Lastiyani, dan Kepala DPAD se-Indonesia serta jajaran Forkopimda D.I Yogyakarta.

Diorama Arsip Jogja merupakan ungkapan dinamika proses terbentuknya D.I Yogyakarta dari masa ke masa yang ditampilkan melalui perpaduan arsip, seni, dan teknologi. Terdapat arsip berupa foto dan naskah sejarah perjalanan Yogyakarta dari masa kesultanan hingga ditetapkan menjadi D.I. Yogyakarta, serta arsip tokoh dan peristiwa penting di D.I. Yogyakarta.

Gubernur D.I Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa Peresmian Diorama Arsip Jogja merupakan bukti nyata untuk menghidupkan arsip sejarah D.I Yogyakarta. “Arsip merupakan identitas dan harkat sebuah bangsa, karena melalui arsip dapat tergambar perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa. Betapa pentingnya arsip ini, sehingga tingkat keberadaban suatu



bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya. Diorama Kearsipan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang sejarah DIY secara runtut dari masa Panembahan Senopati hingga Keistimewaan DIY,” jelas Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Peresmian Diorama Arsip Jogja juga merupakan upaya dalam mengenalkan sejarah kepada generasi muda dengan cara yang menarik. Masyarakat yang berkunjung dapat membayangkan dan merasakan pengalaman sejarah mendekati seperti yang sebenarnya.



Dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama antara ANRI, Perpustakaan, dan Jaringan Kota Pusaka Indonesia tentang pengembangan arsip, bahan perpustakaan, dan naskah kuno kota berdaya kota berbudaya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I Yogyakarta, Monika Nur Lastiyani menyampaikan proses pembangunan Diorama Arsip Jogja. Dimulai dari menggali arsip yang dimiliki oleh D.I Yogyakarta, membuat alur cerita atau *storyline* yang melibatkan para sejarawan agar masyarakat mendapat pengetahuan secara runtut mengenai sejarah perjalanan Yogyakarta, hingga melibatkan tim teknis yang terdiri dari para ahli dan pakar.



FOTO: dioramaarsip.jogjaprovg.go.id

melakukan lelang yang dikecualikan. Dengan lelang yang dikecualikan ini, maka kami memiliki peluang untuk bisa mengangkat calon-calon penyedia yang kami pandang memang mampu untuk melakukan,” jelas Monika.

delapan belas ruangan yang menggambarkan peristiwa sejarah Yogyakarta mulai dari zaman Panembahan Senopati hingga keistimewaan Jogja, yang disajikan dalam bentuk animasi dan replika peninggalan sejarah, serta dapat dinikmati oleh pengunjung dalam durasi 90 menit.

**“Membangun diorama kearsipan, kami menggali apa saja arsip-arsip yang kami miliki. Kemudian kami coba merangkai menjadi sebuah alur cerita dan sebuah storyline. Storyline tersebut kami susun melibatkan sejarawan-sejarawan yang ada di D.I Yogyakarta, papar Monika.”**

Tim teknis dalam pembangunan diorama ini terdiri dari sejarawan, ahli kearsipan, ahli teknologi informasi atau IT, ahli sinematografi, dan ahli jaringan. Dalam kurun waktu sekitar 10 (sepuluh) bulan, Dinas Perpustakaan

dan Arsip D.I Yogyakarta mampu mewujudkan Diorama Arsip Jogja.

Diorama Arsip Jogja memiliki

Pada periode 1587-1733 tentang Mataram, terdapat dua tema yang diangkat, yakni Kebangkitan dan Kejayaan Mataram yang berada di ruang 1 dan 2, serta tema tentang Prahara Mataram dan Intervensi VOC yang berada di ruang 3, yang berisi animasi tentang adegan sejarah.

Selanjutnya, pengunjung akan dibawa ke periode 1755-1830 tentang Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang terbagi ke dalam empat ruangan, yakni ruang 1 menampilkan arsip tentang Kesultanan Yogyakarta, Ruang 5

Menurut Monica, khazanah arsip yang dimiliki merupakan poin terpenting untuk melengkapi arsip, dan hal tersebut menjadi fokus tim dalam pencarian arsip setelah *storyline* disusun. Lebih lanjut seniman juga turut dilibatkan dalam pembangunan diorama agar sesuai dengan yang diharapkan.

Agar tujuan tersebut dapat terwujud, Monika menyampaikan bahwa pembangunan diorama dilakukan dengan lelang yang dikecualikan. “Kami tidak ingin mendapatkan diorama yang dikerjakan asal-asalan. Akhirnya kami



FOTO: dioramaarsip.jogjaprovg.go.id



menampilkan arsip Peristiwa Geger Sepahi dan adegan penyerbuan yang ditampilkan dalam bentuk animasi, ruang 6 menyajikan sejarah tentang Puro Pakualaman, dan ruang 7 menyajikan Pergolakan Perang Jawa.

Memasuki periode 1830-1942, pengunjung dapat melihat arsip-arsip tentang Perubahan dan Pergerakan yang terbagi dalam dua ruangan. Ruang 8 membahas mengenai Lokomotif Perubahan dan ruang 9 membahas mengenai Kebangkitan Elite-elite Lokal.

Pada periode 1942-1998, terbagi menjadi enam ruangan, di antaranya ruang 10 yang menyajikan arsip tentang Selokan Mataram, ruang 11 dengan tema Yogyakarta Ibu Kota Revolusi, ruang 12 menampilkan sejarah Penataan Pemerintah DIY, ruang 13 menyajikan arsip tentang Yogyakarta Kota Pendidikan, ruang 14 tentang Yogyakarta Kota Kebudayaan, dan ruang 15 mengenai Yogyakarta Kota Pariwisata.

Kemudian, pada periode 1998-2018 pengunjung dapat melihat arsip-arsip tentang Pisowanan Ageng yang ada di ruang 16, arsip tentang



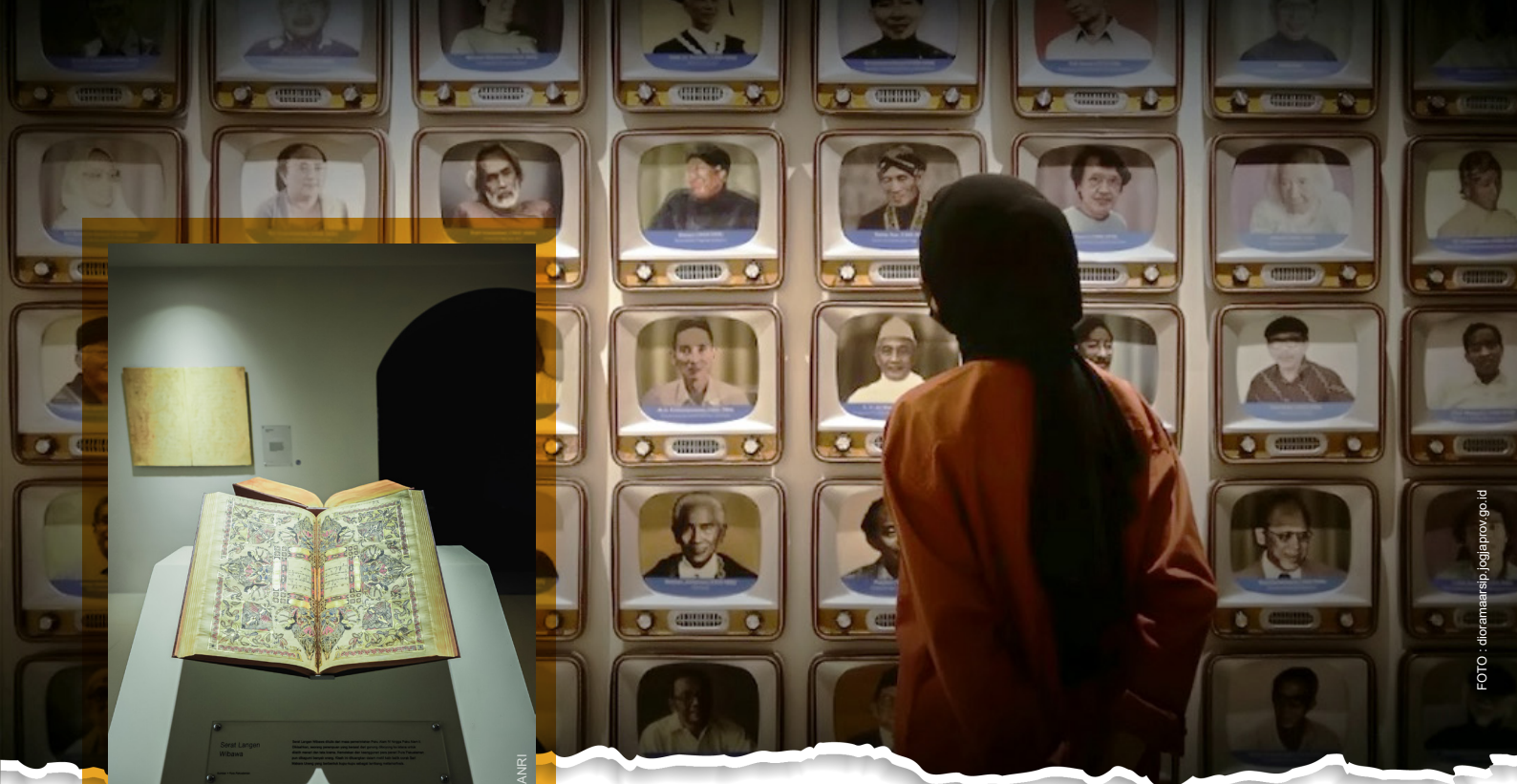


FOTO : DOK ANRI

FOTO : dioramaarsip.jogjaprov.go.id

bencana yang terjadi di Yogyakarta yang terdapat di ruang 17 dengan tema Yogyakarta dan Kebencanaan, dan sampailah di ruang 18 yang menyajikan Keistimewaan Yogyakarta.

Melalui arsip yang disajikan dengan dukungan seni dan teknologi, diharapkan Diorama Arsip Jogja dapat membuat pengunjung membayangkan



FOTO : DOK ANRI



dan merasakan peristiwa sejarah Yogyakarta.

Selain itu, diorama kearsipan ini juga dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa arsip merupakan sumber informasi primer. Lebih lanjut, Pembangunan Diorama Arsip Jogja merupakan bentuk dukungan dan kepedulian Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta untuk mengenalkan perjalanan sejarah D.I Yogyakarta kepada generasi muda.

# KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) PADA PENGOLAHAN ARSIP FOTO

Oleh: Widhi Setyo Putro

TEKNOLOGI



FREPIK.COM

Salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, lembaga kearsipan menggunakan salah satu asas yaitu keantisipatifan. Asas “keantisipatifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan di antaranya adalah perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan.

Perkembangan teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Berkat dorongan inovasi, perkembangan teknologi informasi

diharapkan dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Pada konteks Revolusi Industri 4.0, beberapa perkembangan teknologi informasi yang penting di antaranya adalah *big data*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), *blockchain*, dan teknologi finansial (*tekfin*). Inovasi teknologi informasi ini kemudian mempengaruhi lahirnya inovasi di bidang lain, seperti pemerintahan, transportasi, ekonomi, komunikasi, dan lainnya. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan program *Jakarta Smart City* yang berbasis data, *real-time*, internet, dan algoritma kompleks (Saunders and Baeck, 2015).

Lalu, bagaimana dengan bidang kearsipan? Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan tingkat pusat tentu harus menjadi pionir dalam pengembangan kecerdasan buatan dalam bidang

kearsipan. Beberapa penerapan kecerdasan buatan dalam bidang kearsipan antara lain adalah dalam penentuan klasifikasi, transkripsi (contoh: dari suara ke teks, *optical character recognition*), transliterasi, maupun penyusutan arsip, tentunya dalam konteks arsip digital (Rolan, et.al, 2018). Di luar itu terdapat peluang untuk melakukan pekerjaan kearsipan menggunakan kecerdasan buatan, yaitu pengolahan arsip foto.

### Arsip Foto

Arsip foto menjadi bagian dari khazanah arsip yang dimiliki oleh ANRI selain arsip kertas (konvensional) dan media lainnya. Arsip foto tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pengguna arsip dari berbagai kalangan, baik internal maupun eksternal. Pada penggunaan internal, arsip foto sering digunakan untuk pameran kearsipan (termasuk pameran virtual) dan juga penulisan naskah sumber arsip. Sementara pada penggunaan eksternal, arsip foto sering digunakan untuk penulisan sejarah, profil lembaga, dan biografi. Pada kalangan pers, arsip foto sangat penting penggunaannya dalam pembuatan film dokumenter maupun penyusunan infografis yang disajikan pada media-media elektronik.

Jumlah arsip foto yang tersimpan di ANRI yaitu 3.460.868 lembar. Akan tetapi, dari keseluruhan jumlah tersebut baru 150.043 lembar yang sudah diolah atau sekitar 4,34% (Data Khazanah Direktorat Pengolahan tahun 2021). Tentunya kondisi tersebut menjadi masalah terkait akses dan kebutuhan informasi untuk masyarakat. Karena syarat arsip dapat diakses apabila telah dibuat sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*) sebagai hasil (*output*) dari kegiatan pengolahan arsip statis pada lembaga kearsipan (Peraturan

Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Penemuan Kembali Arsip Statis).

Beberapa kendala dari pengolahan arsip foto adalah kesulitan dalam tahapan deskripsi. Untuk menguraikan informasi deskripsi dalam sebuah foto dibutuhkan pengenalan nama tokoh, peristiwa, tempat, dan waktu kejadian. Dalam hal pengenalan tokoh, selama ini arsiparis melakukannya dengan cara manual, yaitu mencari melalui buku atau internet. Hal ini tentu menyita waktu dalam proses deskripsi arsip. Oleh karena itu, perlu sebuah ide penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu arsiparis mendeskripsi arsip foto khususnya dalam hal mendeteksi identitas tokoh.

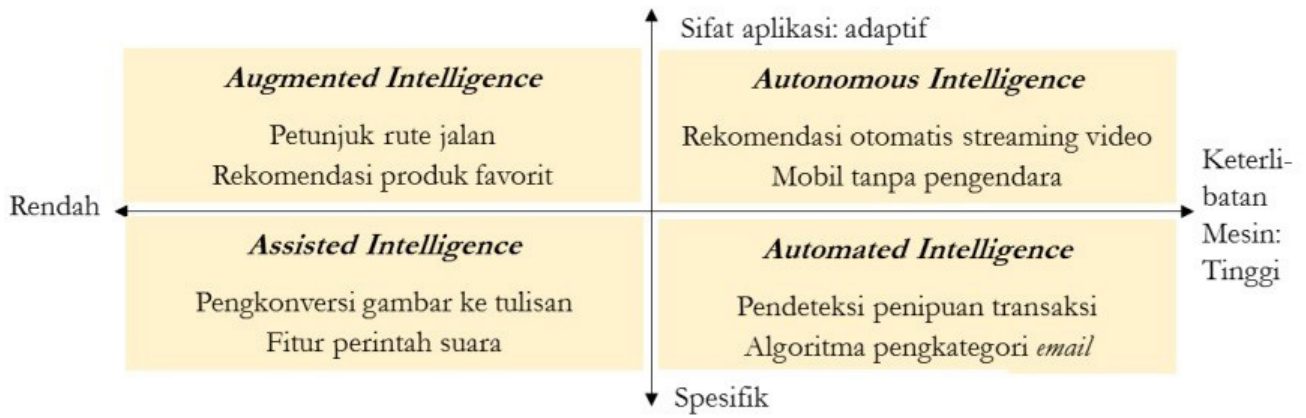
### Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan adalah suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi (Russell and Norvig, 2016). Penelitian kecerdasan buatan telah berkembang sejak tahun 1950-an. Allan Turing dianggap sebagai orang pertama yang mengeluarkan pikiran tentang kecerdasan buatan secara lengkap pada artikelnya yang berjudul "*Computing machinery and Intelligent*". Namun, penerapannya sempat mengalami kelambanan karena berkurangnya ketertarikan pada bidang tersebut. Saat ini, penerapan kecerdasan buatan mengalami kemajuan yang antara lain didorong oleh ketersediaan *big data*. *Big data* telah membuat kecerdasan buatan menjadi lebih 'pintar' dan lebih akurat dalam memberikan hasil. Selain itu perkembangan kecerdasan buatan juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kemampuan komputasi yang meningkat di masyarakat khususnya

generasi muda.

Kecerdasan buatan bekerja menggunakan algoritma dengan *machine learning* dan *deep learning* sebagai dua teknik yang paling populer untuk memproses data menggunakan kecerdasan buatan.

- Algoritma, secara singkat, merujuk pada instruksi komputasi yang tersusun secara berurutan (Knuth, 1998). Algoritma ini yang kemudian menjadi 'resep' bagi program kecerdasan buatan yang menghasilkan prediksi dan luaran (Gillespie, 2014).
- *Machine learning* adalah subset dari kecerdasan buatan. Untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, algoritma *machine learning* pada suatu mesin pertamanya memelajari pemberian data (input) yang dilakukan manusia kepada suatu mesin (Goldberg and Holland, 1988). Berdasarkan masukan data tersebut, mesin kemudian memberikan luaran (*output*) tertentu. Proses pelatihan suatu mesin (*training*) dengan memberi data dan merespon luaran data ini terjadi berulang-ulang sehingga kemudian mesin dapat memprediksi pola umum (*model*) fungsi kecerdasan (*intelligence*) manusia.
- *Deep learning* adalah bidang turunan dari *machine learning*. Dibandingkan *machine learning*, *deep learning* bekerja lebih mandiri (LeCun et al., 2015). Kemandirian ini karena algoritma deep learning melatih mesin dengan data yang jauh lebih banyak dan dengan tingkatan yang berlapis-lapis (*nested hierarchical layers*). Dengan demikian, mesin akan mampu mengenali sendiri pola umum pada suatu data, bahkan tanpa memerlukan bantuan manusia untuk memberikan



Gambar 1. Klasifikasi Penerapan Kecerdasan Buatan (Ramadhan, 2018)

masukan (*input*).

Kecerdasan buatan dapat dilasifikasi menjadi dua kategori yaitu kecerdasan buatan dengan tingkat keterlibatan mesin rendah dan keterlibatan mesin tinggi. Kategori pertama misalnya, pada konversi gambar ke tulisan. Sistem ini memerlukan peran manusia untuk memberikan masukan berupa gambar ke dalam sistem. Sistem ini bersifat spesifik karena hanya ditujukan untuk mengkonversi gambar menjadi tulisan (contoh kasus pada artikel ini). Jenis kecerdasan kategori kedua dapat ditemukan pada sistem pendeteksi penipuan transaksi dan sistem mobil tanpa pengemudi (*autonomous vehicle*).

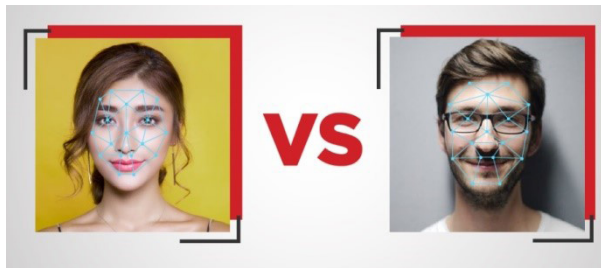
### Kecerdasan Buatan: Pengenalan Wajah (*Face Recognition*)

Seperti yang telah diuraikan di awal, salah satu kendala dalam deskripsi arsip foto adalah penentuan nama tokoh pada setiap foto. Tujuan kecerdasan buatan adalah membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini, kecerdasan buatan dapat membantu arsiparis untuk menentukan nama dalam foto yang akan dideskripsi. Salah satu produk dari kecerdasan buatan adalah yang dikenal dengan

nama pengenalan wajah (*face recognition*).

*Face recognition* adalah salah satu sistem identifikasi biometrik yang sangat efektif dalam menghasilkan informasi. Hal tersebut bisa terjadi karena penggunaan algoritma *neural*

kemudian disimpan untuk dicocokkan dengan hasil pencarian. Hampir sama dengan rekaman sidik jari, *faceprint* adalah sekumpulan karakter yang jika digabungkan akan mampu mengidentifikasi wajah seseorang. (Arfienda, 2018).



Gambar 2. Ilustrasi Algoritma Face Recognition (Arfienda, 2018)

*network* yang berperan penting dalam pengembangan sistem *face recognition*. *Neural network* dibuat berdasarkan model cara kerja otak manusia. Algoritma ini kemudian mencoba meniru proses otak mengenali wajah seseorang. Alam bawah sadar otak akan mencoba mengenali fitur-fitur khusus pada wajah. Seperti jarak antara mata, tinggi dahi, lebar hidung, dan sebagainya. Algoritma *face recognition* kemudian dirancang untuk memetakan fitur wajah seseorang secara matematis. Data fitur wajah yang disebut *faceprint* ini

### Kecerdasan Buatan Pada Deskripsi Arsip Foto

Lalu, bagaimana kemajuan teknologi ini dapat membantu pekerjaan arsiparis dalam mengolah arsip foto, khususnya ketika deskripsi? Ketika mendeskripsi sebuah foto, seorang arsiparis harus memuat uraian informasi setidaknya 4W (*Who, What, Where, When*). *Who* terkait pelaku atau tokoh, *What* terkait kegiatan atau peristiwa, *Where* terkait lokasi peristiwa atau tokoh tersebut berada, dan *When* terkait dengan waktu kejadian peristiwa. Contoh:



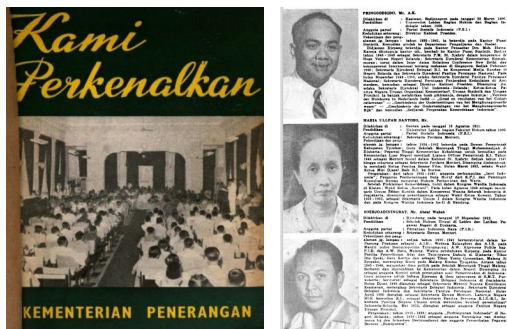
Gambar 3. Contoh Arsip Foto

Deskripsi: Presiden Sukarno berfoto bersama dengan para anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang baru saja dilantik di Istana Negara, Jakarta pada 1 Agustus 1953.

Contoh uraian informasi pada deskripsi tersebut sudah memenuhi unsur 4W, yaitu tokoh adalah Presiden Sukarno, peristiwa adalah foto bersama dengan para anggota kabinet, lokasi adalah di Istana Negara, Jakarta dan waktu adalah 1 Agustus 1953.

Akan tetapi, beberapa tahun ini Direktorat Pengolahan berusaha meningkatkan kualitas deskripsi dengan mencari tokoh-tokoh lain yang ada di dalam setiap foto. Bukan hanya tokoh utama seperti presiden atau wakil presiden melainkan tokoh lainnya seperti para menteri, anggota dewan, pimpinan militer, kepala daerah, ataupun istri dari para tokoh-tokoh tersebut. Jika dilihat pada contoh foto di atas, maka deskripsi dengan kualitas baik adalah dengan menyebutkan nama semua menteri yang ada. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dalam setiap foto.

Untuk mencari tahu identitas para tokoh yang ada, selama ini arsiparis mencari secara manual, di antaranya dengan menggunakan buku yang sezaman, seperti contoh di bawah ini:



Gambar 4. Buku Kami Perkenalkan terbitan Kementerian Penerangan Tahun 1954.

Buku ini menjadi salah satu sumber untuk menentukan nama tokoh ketika mendeskripsi arsip foto periode 1954. Tentunya arsiparis harus berkali-kali membuka buku tersebut. Sebuah pekerjaan yang menyita waktu dan membutuhkan kecermatan tinggi. Selain buku, salah

satu sumber pencarian dan verifikasi nama tokoh adalah menggunakan mesin pencarian di internet.

Pekerjaan deskripsi foto kemudian terkendala dengan lamanya pencarian nama tokoh tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pemanfaatan kecerdasan buatan, dalam hal ini *face recognition* untuk mempercepat proses penemuan nama-nama tokoh. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh seorang arsiparis dalam proses pengembangan kecerdasan buatan *face recognition* ini? Jawabannya adalah menyusun sebuah database identitas tokoh. Jika tidak ada database, *face recognition* tidak akan bisa bekerja. Contoh *database* yang bisa dibuat secara manual:

Menteri Kehakiman	Djody Gondokusumo		Menteri Luar Negeri	Sunario Sastrowardoyo	
Menteri Penerangan	Ferdinand Luban Tobing		Menteri Dalam Negeri	Hazairin (sampai 23 Oktober 1954)	
Menteri Perencanaan	Iskag Tjokroadisurjo (sampai dengan 8 November 1954)		Menteri Dalam Negeri	Zainul Arifin (sampai 23 Oktober s.d. 19 November 1954)	
Menteri Perencanaan	Roeseno Soepahadikoeseono (sejak 8 November 1954)		Menteri Dalam Negeri	R. Sunarjo (sejak 19 November 1954)	

Gambar 5. Contoh Database Tokoh Secara Manual

Semakin banyak contoh foto yang ditampilkan dalam *database*, maka semakin akurat *face recognition* bekerja. Selanjutnya, database nama-nama tokoh yang disusun oleh arsiparis akan masuk dalam ke sebuah sistem dan masuk ke dalam *Big Data*. Perkembangan *Big Data* dapat dimanfaatkan oleh *machine learning* sehingga menjadi faktor kesuksesan pemanfaatan kecerdasan buatan di ranah praktis seperti *face recognition*.

Jika proses ini sudah berjalan, maka arsiparis tidak perlu lagi mencari nama tokoh melalui buku-buku yang ada tetapi cukup melakukan pemindaian foto (jika belum dalam bentuk digital), kemudian mesin yang

bekerja menentukan identitas tokoh yang ada di dalam foto tersebut. Hal ini akan menyingkat waktu pekerjaan dan membuat deskripsi lebih akurat.

## Saran

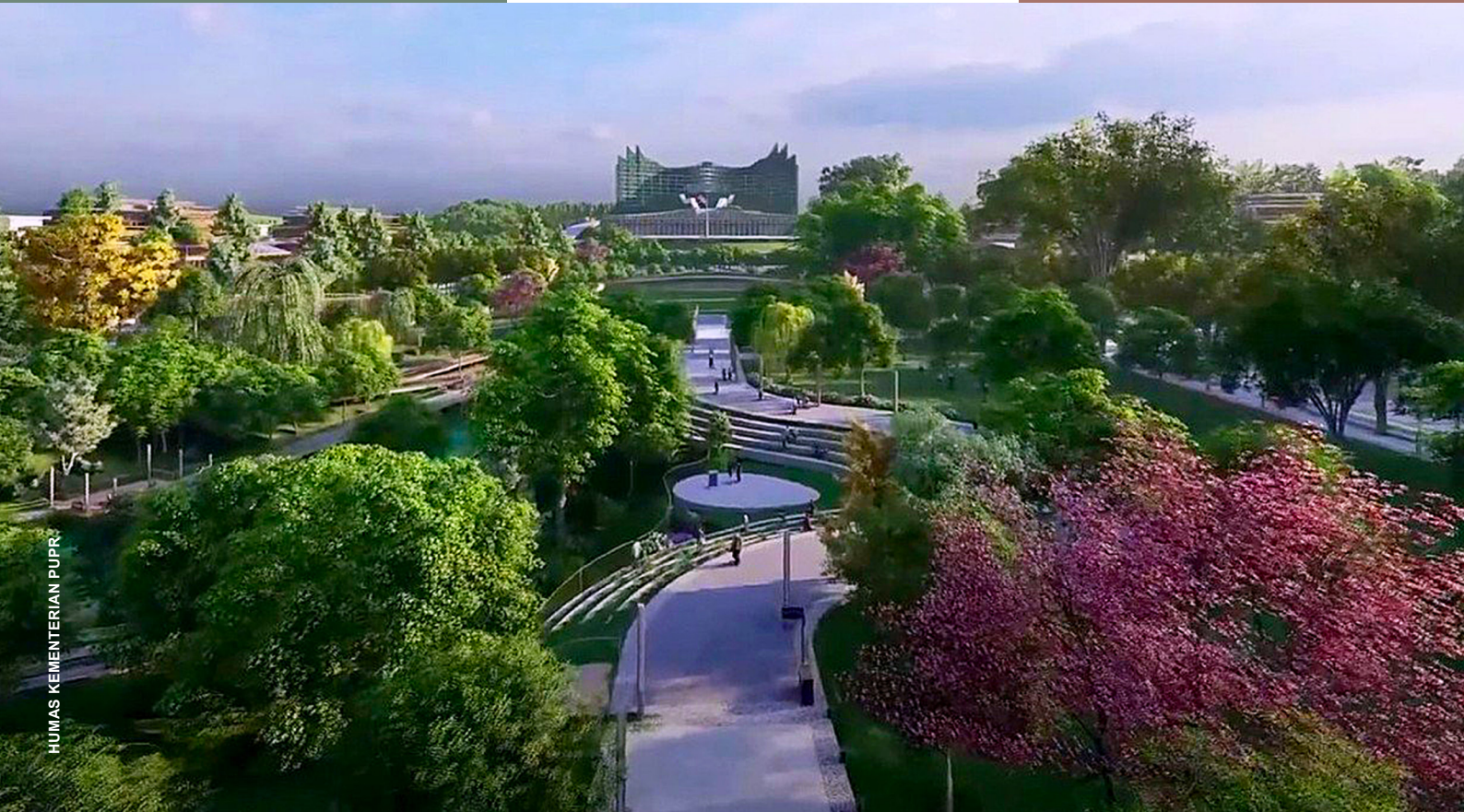
Pengembangan kecerdasan buatan ini memerlukan kerja kolaboratif antar lembaga. Bukan saja ANRI sebagai lembaga kearsipan tetapi juga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang lebih berpengalaman dalam bidang kecerdasan buatan khususnya dalam hal pengembangan *software*. Selain itu ANRI perlu mengajak perguruan tinggi yang mempunyai konsentrasi dalam

kecerdasan buatan untuk membantu pengembangan kecerdasan buatan di bidang kearsipan.

ANRI juga perlu untuk membuat kebijakan khusus terkait pengembangan kecerdasan buatan untuk mendorong lembaga kearsipan pada tingkat daerah dan perguruan tinggi mulai memikirkan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dari kebijakan ini diharapkan pula adanya alokasi anggaran khusus pengembangan kecerdasan buatan. Karena sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Tentu saja kemajuan teknologi ini salah satunya kecerdasan buatan. ■

## MELIHAT PROYEKSI URUSAN KEARSIPAN DALAM RANCANGAN PERATURAN PELAKSANA UU IKN

Oleh: Rayi Darmagara



HUMAS KEMENTERIAN PUPR

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022 merupakan tonggak baru dalam sejarah Indonesia karena merupakan peristiwa penting dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara khusus Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk

semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan sudut pandang kearsipan berdasarkan konsideran dalam Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang memberikan poin pada ketentuan bahwa arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Selain itu, tujuan penyelenggaraan kearsipan salah satunya berisi pengaturan untuk menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Lebih luas lagi bahwa makna perpindahan ibu kota negara akan menjadi sebuah memori kolektif bangsa yang merupakan rekaman dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Setiap langkah dan dinamika gerak maju bangsa, masyarakat, dan negara Indonesia ke depan harus didasarkan pada pemahaman, penghayatan, dan catatan atas identitas dan jati diri bangsa tersebut yang terekam dalam bentuk arsip. Dalam konteks ini, arsip perpindahan ibu kota negara menjadi tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang Ibu Kota Negara juga dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Ketentuan ini menjelaskan bahwa

sejak undang-undang ibu kota negara ini diundangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal ini baru akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Kemudian, Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

#### **1. Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Urusan Kearsipan**

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) undang-undang Ibu Kota Negara, bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus. Kewenangan khusus tersebut nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

Saat ini rancangan peraturan pemerintah tentang kewenangan khusus otorita ibu kota nusantara masih dalam proses penyusunan. Dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Terhadap urusan bidang kearsipan, telah diusulkan 3 (tiga) sub urusan yang meliputi:

##### **a. Pengelolaan Arsip, Kewenangan**

Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri atas:

- 1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO).
  - 2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), perusahaan swasta yang kantor pusat usahanya di Ibu Kota Nusantara, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat di Ibu Kota Nusantara.
  - 3) Pengelolaan Ibu Kota Nusantara sebagai simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
- b. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip, Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri atas:
- 1) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
  - 2) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana.
  - 3) Penyelamatan arsip bagian dari struktur organisasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran satuan wilayah di Ibu Kota Nusantara.



IKN.CO.ID

- 4) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
  - 5) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
- c. Perizinan Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Penerbitan izin penggunaan

arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga kearsipan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, ada porsi yang menjadi perhatian khusus terhadap urusan bidang kearsipan yaitu terhadap arsip persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta arsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Terhadap arsip persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sudah dimulai sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Negara telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022, sedangkan arsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara masih menunggu Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Terdapat 3 (tiga) strategi dalam rangka menjalankan kewenangan khusus bidang kearsipan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, yaitu:

- a. Otorita Ibu Kota Nusantara harus melaksanakan pengelolaan arsip persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

- b. Arsip persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup arsip yang diterima dari instansi pusat dan pemerintah daerah terkait pelimpahan kewenangan khusus kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dan arsip yang diciptakan dalam pelaksanaan tugas Otorita Ibu Kota Nusantara.
- c. Penyerahan arsip dari instansi pusat dan pemerintah daerah terkait pelimpahan kewenangan khusus kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak pelimpahan kewenangan khusus Ibu Kota Nusantara ditetapkan telah selesai oleh pemerintah.

Strategi ini mencoba memetakan bagaimana upaya memprediksi arsip yang tercipta dan penyelamatan arsip dalam proses pelaksanaan pengelolaan arsip persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang dalam proses ini terdapat banyak kementerian/ lembaga/pemerintah daerah sebagai pencipta arsip yang terlibat, sehingga diharapkan pencipta arsip tersebut sudah sejak awal akan memahami perlunya mengelola arsip persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sebuah peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

## **2. Proyeksi Penyelenggaraan Kearsipan di Ibu Kota Negara**

Proyeksi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perkiraan tentang keadaan

masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada (sekarang). Proyeksi diperlukan dalam rangka merespon dan mempersiapkan perubahan sistem, merumuskan beberapa pilihan tindakan yang akan diambil untuk mencapai sasaran. Urusan bidang kearsipan di Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara membutuhkan perhatian khusus karena beberapa kewenangan yang diberikan, walaupun sebetulnya di Ibu Kota Negara tentu secara umum juga akan terdapat pencipta arsip lain yaitu kementerian/Lembaga yang pindah ke Ibu Kota Negara.

Jika sekilas kita cek Kembali bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian, hal ini menunjukkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan instansi pusat yang dalam konteks penyerahan arsip statisnya misalkan jika mengikuti ketentuan undang-undang kearsipan tentu harus diserahkan ke ANRI, tetapi disisi lain Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan juga penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang jika diselaraskan dengan konsep dalam undang-undang kearsipan kearsipan diberikan kewenangan untuk membentuk lembaga kearsipan daerah dimana arsip statis dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diserahkan ke lembaga kearsipan daerah.

Artinya penyelenggaraan kearsipan yang secara ruang lingkup meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta

sumber daya lain akan mengalami penyesuaian jika diterapkan pada keberadaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Penetapan kebijakan misalnya, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam bidang kearsipan akan melingkupi dua poros yaitu sebagai pencipta arsip sekaligus sebagai lembaga kearsipan, kecuali peraturan daerah (biasanya ditetapkan juga peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan) karena di Ibu Kota Negara tidak terdapat DPRD. Selanjutnya di pembinaan, akan ada dua model pembinaan yaitu yang dilakukan oleh unit kearsipan sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan pusat kepada unit kerja dan oleh lembaga kearsipan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara kepada perangkat daerah (walupun untuk hal ini masih menunggu organisasi dan tata kerja yang ditetapkan), disisi lain pengawasan juga akan memungkinkan untuk pelaksanaannya oleh Otorita Ibu Kota Nusantara pengawasan internal unit kerja oleh unit kearsipan sekaligus pengawasan internal perangkat daerah oleh lembaga kearsipan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, pengelolaan arsip akan terbagi atas penyerahan arsip statis Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang diserahkan ke lembaga kearsipan nasional/ANRI dan penyerahan arsip statis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara kepada lembaga kearsipan daerah Otorita Ibu Kota Nusantara. Proyeksi atas penyelenggaraan kearsipan ini semoga menjadi catatan guna menguatkan dan memajukan kearsipan di Indonesia. ■

Nita Fitriyah, Bidang kearsipan Universitas Airlangga

# MEWUJUDKAN TERTIB ARSIP MELALUI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PARA ARSIPARIS DENGAN *LEARNING 5.1* MENUJU *SOCIETY 5.0*

VARIA



Pada tanggal 15 Desember 2020 Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi RI. Sebelumnya gerakan ini telah dicanangkan oleh Arsip Nasional RI (ANRI) sejak tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang GNSTA tersebut. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi juga telah mempertegas gerakan tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran tentang pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi RI tertanggal 20 Desember 2021.

Empat peran strategis arsip adalah

yang pertama, sebagai salah satu Agenda Strategis Aspek Manajemen Kearsipan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang dibuat oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan dan pelayanan arsip bagi masyarakat dalam rangka sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa Indonesia. Kedua, sebagai salah satu indikator penilaian terhadap setiap program dan sasaran reformasi birokrasi yang dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran, apakah penataan arsip pada instansi pemerintah telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan. Ketiga, mendukung terselenggaranta Gerakan

Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang dicanangkan sejak tahun 2017 yaitu peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan. Dan keempat, sebagai salah satu target kinerja pada Rencana Strategis Universitas Airlangga tahun 2021-2024 untuk menjadi *SMART UNIVERSITY* yaitu dengan penyelenggaraan *Responsive and Lean Management*. Mengelola universitas berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independen dan keadilan untuk menjamin pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, efektif dan efisien.

Universitas Airlangga sebagai institusi pendidikan tentu saja harus mendukung terelenggaranya empat peran strategis tersebut sebagai bukti penyelenggaraan *good governance* dan merupakan komitmen Universitas Airlangga untuk sadar dan tertib mengelola arsip yang tercipta karena arsip merupakan identitas dan jati diri Universitas Airlangga dan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Komitmen inilah yang akan membentuk budaya tertib arsip hingga untuk masa yang akan datang, dengan diupayakan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Budaya tertib arsip akan memberikan dukungan yang luar biasa dalam sumberdaya manusia, infrastruktur serta informasi dan komunikasi yang akan menjadi nadi dan modal sosial dalam mewujudkan *smart university* menuju *World Class University*.

Dalam penjelasan lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Standar Kualitas hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis dijelaskan bahwa arsiparis kategori keahlian dan keterampilan mempunyai tugas tambahan yang sama yaitu berperan serta dalam kegiatan ilmiah bidang Kearsipan. Tentu saja hal ini akan sangat pendukung penilaian target kinerja para arsiparis yang dilaporkan secara rutin setiap tahun, meskipun pada kenyataannya jumlah arsiparis dari tenaga ASN di Universitas Airlangga sangat terbatas. Hal ini dapat diantisipasi dengan dukungan penyediaan tenaga pengolah arsip dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat para arsiparis di Universitas Airlangga yaitu 1) Tgl. 3 Juni 2021, Pembekalan bagi mahasiswa Universitas Airlangga (online) diikuti 23 peserta, 2) Tgl. 5 Juni 2021, Sosialisasi tentang Arsip Keluarga di wilayah Kalijudan dan

Pasar Kembang Surabaya, diikuti 20 peserta, 3) Tgl. 12 Juni 2021 Webinar Nasional Digitalisasi Arsip Keluarga (zoom meeting dan kanal youtube) diikuti 462 peserta, 4) Tgl. 17-18 Juni 2021, Bimbingan Teknis Digitalisasi Arsip Keluarga dengan Aplikasi Digital Arsip Keluarga (DAK) di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya diikuti 100 peserta. Meskipun jadwal kegiatan pengabdian masyarakat para arsiparis dilaksanakan pada keadaan telah terjadi pandemic covid-19, hal ini tidak menghalangi semangat para arsiparis, dimana selama bulan Juni 2021 kota Surabaya termasuk dalam kategori zona orange dengan tingkat Resiko sedang tetapi harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Sebagai tujuan akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat (*Empowerment Community*).

Pimpinan Universitas Airlangga memberikan dukungan pelaksanaan tugas tambahan para arsiparis di Universitas Airlangga untuk kategori berperan serta dalam kegiatan ilmiah bidang kearsipan dalam bentuk



FOTO: ISTIMEWA



pengabdian kepada masyarakat. Dukungan pimpinan tersebut terdiri dari dukungan kebijakan, anggaran dan sumberdaya dengan ditetapkannya kegiatan pengabdian masyarakat para arsiparis menjadi program kerja tahun 2021. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan pengabdian kepada harus memenuhi standar kegiatan yaitu: a) standar arah, b) standar proses, c) standar hasil, d) standar kompetensi, e) standar pendanaan, f) standar sarana dan prasarana, g) standar outcome.

Hasil survey kuesioner yang telah dibagikan menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan teknis pada pengabdian kepada masyarakat para arsiparis Universitas Airlangga yang diselenggarakan tahun 2021 telah berhasil dengan baik dan diharapkan dapat dilanjutkan dengan materi yang lebih luas di masa yang akan datang. Telah mencapai 69.56% yang memberikan saran untuk kelanjutan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sementara yang memberikan respon baik dan sedang tapi tanpa menyarankan dilanjutkannya kegiatan tersebut dimasa yang akan datang hanya mencapai 27,09% dan yang tidak memberikan masukan hanya

mencapai 4.35%.

Hasil tersebut merupakan bukti implementasi dari metode Learning 5.1 yaitu 1) mengatasi keterbatasan pola pikir (*mindset barrier*) bahwa ilmu kearsipan tidak hanya dapat dipelajari oleh arsiparis atau pengelola arsip saja tetapi merupakan tanggung jawab masing-masing individu atau keluarga, karena arsip keluarga merupakan tulang punggung atau nadi bagi keluarga, 2) telah terjadi perubahan paradigma bahwa pembelajaran tidak hanya di ruang kelas saja, melainkan mengutamakan

penerapan dalam aktivitas keseharian terutama dimasa pandemi dan memasuki era Digitalisasi, 3) telah tercipta lingkungan pembelajaran (*learning environment*) sehingga proses belajar dalam bekerja atau bekerja dalam belajar akan lebih menyenangkan dan tidak terlalu formal, 4) sebagai bukti bahwa era digitalisasi di tengah kondisi pandemi covid-19 tidak merubah hakikat prinsip pendidikan yaitu pendidikan seumur hidup (*longlife education*) dengan metode pembelajaran seumur hidup (*longlife learning*) yaitu pembelajaran merupakan bagian dari sistem kehidupan manusia seumur hidup.

Metode Learning tersebut dapat diakselerasi untuk mempercepat menuju tujuan akhir pengabdian kepada masyarakat agar dapat tumbuh dengan baik yaitu dengan menggunakan teori ACTORS. Implementasi teori ACTORS dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 1) *Authority* (Kewenangan), kewenangan yang dimiliki pimpinan, para arsiparis



dan para mahasiswa Universitas Airlangga telah digunakan untuk tujuan yang mulia yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu juga kewenangan yang dimiliki pejabat setempat di lokasi pelaksanaan kegiatan yaitu camat, lurah, ketua RW, ketua RT, Bintara Pembina Desa TNI AD (Babinsa) dan kepala kepolisian setempat, telah mendukung sepenuhnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat para Arsuparis Universitas Airlangga, 2) *Confident and Competen* (Rasa Percaya Diri/Kemampuan), dukungan para pemegang kewenangan tersebut telah memberikan rasa percaya diri yang lebih kuat pada warganya atau para panitia kegiatan untuk dapat membuktikan kemampuannya dalam belajar tentang kearsipan dan eksekusi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 3) *Trust* (Keyakinan), telah menumbuhkan keyakinan peserta kegiatan ini bahwa yakin dapat mempelajari materi yang disampaikan para narasumber demi mendukung aktivitas keseharian kehidupannya dalam menghadapi era Digitalisasi dimasa pandemic covid-19, 4) *Opportunity* (Peluang), kegiatan ini telah memberikan



FOTO: ISTIMEWA

peluang dan dukungan kepada peserta untuk mempelajari tata kelola dan digitalisasi arsip keluarga yang merupakan nadi bagi keluarga, 5) *Responsibility* (Tanggung jawab), kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pemangku kepentingan kegiatan ini yaitu peserta, panitia dan pemegang kewenangan, demi mencapai tujuan peningkatan pemahaman kearsipan, 6) *Support* (Dukungan), kegiatan ini telah mendapat dukungan kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan yaitu berupa dukungan kebijakan, anggaran, narasumber, peserta dan lokasi kegiatan.

Peningkatan beberapa program kerja bidang kearsipan Universitas Airlangga telah dilaksanakan secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder Universitas Airlangga dan Arsip Nasional RI selaku lembaga Pembina. Implementasi metode Learning 5.1 merupakan indikator penentu akselerasi Universitas Airlangga menuju Smart University. Selain itu juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif untuk peningkatan inovasi bidang kearsipan Universitas Airlangga dimasa yang akan datang.

Pada akhirnya implementasi metode Learning 5.1 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan membimbing masyarakat beradaptasi menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan mengantar masyarakat menuju Society 5.0, yaitu kemajuan teknologi prioritasnya diarahkan pada kepentingan manusia untuk memudahkan aktivitas manusia. Society 5.0 telah menjadi jawaban masalah-masalah lingkungan dan ekonomi dimana teknologi membantu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial serta membantu menyeimbangkan antara solusi masalah ekonomi dan masalah sosial. ■

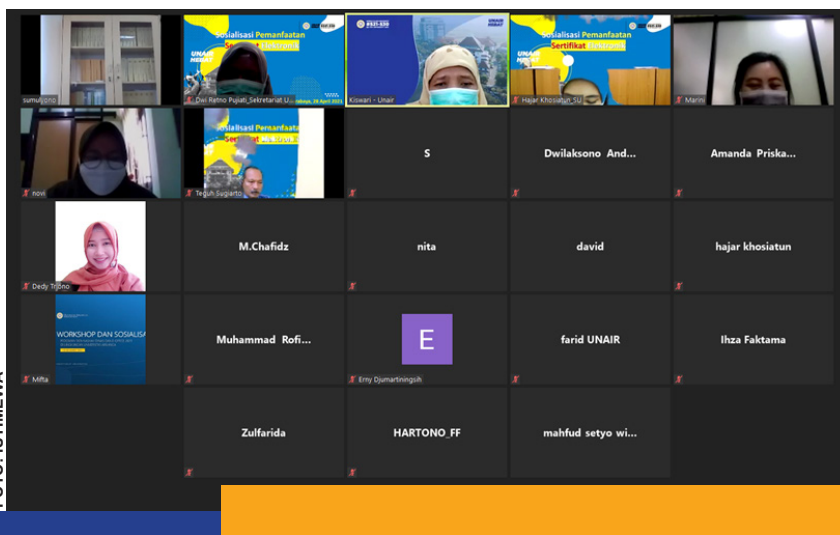


FOTO: ISTIMEWA

# SURAT EMAS DARI TEPI BRANTAS

Oleh: M. Rosyid H.W.

Ketika lonceng berdentang sekali dari gawainya, Nila sedang menghadap sarapannya: seiris *tenderloin*, telur ceplok setengah matang, dan tiga potong wortel rebus. Ia tidak menggubris suara gawainya. Pasti itu pesan dari teman kuliahnya demi mengajaknya pergi ke perpustakaan kampus. Nila tak akan pergi ke kampus hari ini. Ia akan terbang pulang ke Indonesia esok hari.

Sudah tiga bulan ini, tesisnya di Universitas Leiden berjalan di tempat. Profesor Henk, pembimbingnya, mensyaratkan dokumen sejarah tentang pengarang Sastra Jawa. Ia telah menyusuri perpustakaan-perpustakaan megah di seantero negeri Kincir Angin untuk mencari arsip berupa kliping koran, catatan-catatan pengarang atau surat-suratnya. Namun, hasilnya nihil. Menemukannya mustahil.

Meskipun kampus-kampus Belanda terkenal dengan koleksi lengkap tentang Indonesia, ia tak mendapati arsip sejarah yang berguna untuk tesisnya. Ia memang

menemukan karya-karya sastra Jawa, tapi tidak dengan surat atau catatan pengarangnya. Dari sejak zaman penjajahan, Belanda amat sangat serius mempelajari dan mencatat masyarakat dan budaya Indonesia demi usaha menaklukkan bangsa ini. Tak heran, banyak buku-buku penting tentang Indonesia tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Belanda. Tetapi, anehnya, ia tak dapat menemukan satu lembar arsip pun tentang surat-surat pengarang sastra Jawa.

Mencari surat-surat mereka ibarat mencari jarum pada tumpukan jerami. Setelah tak mendapatkannya selama seratus hari di seluruh penjuru Belanda, ia mengadu kepada Profesor Henk.

“Kau mungkin dapat menemukannya di loteng kecil di tepi Sungai Brantas,” kata sang profesor.

“Saya ke sana pada tahun 1970-an. Loteng itu terletak di lantai tiga. Di atas toko. Semoga, sekarang, loteng itu masih berwujud dan kau dapat menemukan surat-surat itu,” katanya sambil menyerahkan selembaar foto

pada Nila. Meski gambarnya kusam dan lusuh, foto itu cukup menyalakan api harap dalam dada Nila.

\*\*\*

Berbekal selembaar foto dari profesornya, Nila mencari loteng tanpa alamat di kota tepi sungai Brantas. Foto deretan toko. Di satu sisi, Nila yakin pasti ada satu dua orang sepuh di kota itu yang masih mengingat deretan toko itu. Tetapi, di sisi lain, ia juga berpikir mungkin toko-toko itu telah dipugar. Mungkin telah digusur demi pelebaran jalan. Mungkin telah berganti jadi mal berlantai lima. Mungkin beralih menjadi kantor partai. Selama perjalanan, harapannya kadang melambung dan terkadang memudar.

Profesor pernah bercerita jika toko dengan loteng penuh buku itu berada di tengah kota dan lumayan dekat dengan stasiun kereta api. Nila sangat hafal tulisan di foto itu: *boekhandel en schryfbehoeften*\*.

“Apakah anda tahu toko buku di sekitar sini?” Nila bertanya kepada seorang penarik becak sesaat setelah

ia keluar dari stasiun kereta api Kota Kediri. Nila sudah bertanya kepada lima orang dan hanya gelengan tanpa jawaban yang ia dapatkan. Tak ada satu pun orang yang mengetahui toko itu.

Siang lekas menjelang. Jarum-jarum sengat mentari tepat menghantam ubun-ubun. Motor dan mobil berlalu lalang. Nila telah berjalan sekitar lima kilometer dan belum menemukan petunjuk tentang loteng misterius itu.

Ia lalu memutuskan untuk mencari warung demi mengisi perutnya yang terus menerus menggonggong kelaparan. Ia terus menyusuri trotoar setapak demi setapak. Di depan sebuah toko, ia berhenti sejenak. Lamat-lamat, ia mengamati deretan huruf di atas pintu toko: SURABAYA. Ingatannya tertumbuk pada nama salah satu toko di foto sang profesor. Toko Soerabaia. Nama toko yang sama, ejaan yang berbeda. Tapi, toko ini nampak tidak seperti toko buku. Mata Nila tertumbuk pada plakat nomor rumah. Satu-empat-semibulan.

“Apakah benar ini bekas rumah Tan Khoen Swie?” tanya Nila ketika melihat lelaki paruh baya berdiri di antara kotak-kotak etalase penuh dengan lodong-lodong kue.

“Ya, benar,” jawabnya datar. Nila bersyukur wujud toko masih utuh. Tak ada pelebaran jalan. Tak jadi mal berlantai lima. Tak jadi kantor partai.

Lelaki itu mengamati Nila dari ujung rambut sampai ke kaki. Nila paham lelaki itu berusaha mengenalinya. Tatapannya menyiratkan agar Nila memperkenalkan diri dan mengutarakan hajatnya.

“Saya Nila dari Jakarta, Pak. Apa benar di sini ada loteng buku?”

“Ya, benar.” Lelaki itu menjawab dengan kata-kata serupa dengan nada datar yang serupa.

“Begini, Om. Saya adalah mahasiswi dari Leiden yang sedang menyelesaikan tesis. Saya dengar dari profesor saya kalau toko ini memiliki loteng dengan ribuan buku dan segudang arsip. Demi tesis saya, mohon saya diperkenankan untuk melihatnya!”

“Mari saya tunjukkan. Di lantai atas.”

Keduanya berjalan melewati tangga menuju lantai dua. Terdapat lorong dengan kamar-kamar yang berhadap-hadapan. Pintu-pintunya dari kayu jati.

“Anda mengambil apa di Leiden?”

“Sastra Jawa.”

“Dulu, pujangga-pujangga Jawa seperti Padmosusastro dan R. Tanoyo pernah menginap di sini. Tan Khoen Swie selain menerbitkan buku-buku mereka, juga memfasilitasi mereka untuk tinggal di sini selama beberapa bulan untuk menulis karya mereka. Ya, semacam residensi penulis kalau sekarang.”

Nila berdecak bangga dan semakin terpesona saat menginjak loteng rumah di lantai tiga. Rak-rak berjejer-jejer penuh debu. Kertas-kertas bertumpuk-tumpuk. Buku-buku tertata rapi meski nampak tidak terawat. Pilar-pilar loteng ini berwarna kuning. Terdapat jendela bundar yang juga berwarna kuning. Tembok dalam loteng berwarna putih dengan garis-garis hitam.

“Ada ribuan buku milik Tan Khoen Swie di sini. Ada yang dicetak, dan ada yang masih *tedhakan*\*. Kau nanti bisa memeriksanya sendiri.”

Nila berjalan menuju balkon.

Tanaman lidah buaya dan bunga kamboja tumbuh di pinggiran balkon. Loteng ini seperti kuil-kuil Cina. Tembok luarnya bercat merah hati dengan garis-garis putih.

“Sayangnya, buku-buku dan arsip-arsip di sini tidak banyak yang mempergunakannya. Sebagai dokter, aku hanya bisa merawatnya.”

“Jadi, Om. Apakah saya bisa tinggal untuk beberapa hari? Saya ingin mengorek harta karun yang luar biasa ini.”

“Dengan senang hati, Nila. Kenalkan, saya Budi.”

Nila melonjak kegirangan. Tersungging senyum di bibirnya. Terbayang beberapa hari ke depan ia hanya menyuntuki buku, tulisan dan aksara. Potret dirinya memakai toga kebesaran universitas tergambar jelas di pikirannya.

“Kau bisa istirahat dulu di sana,” Dokter Budi menunjuk sebuah kamar.

\*\*\*

Setelah seharian membolak-balik puluhan buku, Nila melepas lelah dengan menyandarkan diri pada kursi. Sebuah foto yang terletak di pojok loteng menarik perhatian matanya. Seorang laki-laki dengan rahang tegap, mata tajam, rambut gondrong, kumis panjang melarik kanan-kiri. Sosok Tan Khoen Swie nampak sangat gagah dan berwibawa, batin Nila. Ia sosok yang luar biasa. Mencetak ratusan buku-buku tentang sastra dan budaya Jawa.

“Bagaimana buku dan arsip di sini?” Pak Budi membuyarkan lamunannya.

“Masih belum kutemukan dokumen yang kumaksud. Tetapi buku-buku dan arsip-arsip di sini

sangatlah langka. Benar-benar mutiara yang terpendam,” timpal Nila. “Saya tadi juga menemukan katalog buku-buku yang diterbitkan *Boekhandoel Tan Khoen Swie*.”

“Saya juga masih menyimpan arsip surat-surat Tan Khoen Swie dengan para pengarang. Mereka kerap kali berbalas-balasan surat. Saya lupa menunjukkannya ke kamu!”

“Itu yang kucari!” teriak Nila. Ia seperti menemukan cahaya di tengah kegelapan.

“Surat-surat ini seperti dokumen biografis bagi leluhur kami. Jadi, saya menyimpannya di tempat khusus,” cerita Dokter Budi. Nila hanya manggut-manggut mengiyakan sambil membolak-balik surat-surat. Wajah Nila bersinar terang.

“Kau tentu dibimbing oleh Profesor Henk?” tanya Dokter Budi. Balkon loteng menghadap sungai Brantas dengan pemandangan mempesona. Brantas tampak agung dengan arus yang tenang.

“Benar. Ia pernah bercerita bahwa dia sudah pernah ke sini,” timpal Nila

“Ya, Henk, masih mahasiswa doktoral ketika itu, pada tahun 1971, tinggal di sini hampir selama setahun. Ia selalu bilang ‘Luar biasa! Luar biasa! Luar biasa!’ ketika melihat tumpukan buku-buku dan arsip-arsip. Ia amat mengaguminya.”

“Ia memang dosen yang teramat baik. Membimbing tesis saya dengan jeli dan teliti.”

“Syukurlah! Sekarang ada penerusnya. Kamu! Jarang-jarang lho anak-anak Indonesia yang mempelajari budayanya sendiri. Terutama Sastra Jawa,” puji Dokter Budi.

“Mohon doanya, Om, agar studi

saya segera selesai.”

“Tapi, ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu tentang Henk.” Mimik wajah Dokter Budi berubah serius diterpa sinar lampu kuning. Brantas masih tetap tenang. Dokter Budi membetulkan posisi duduknya. Nila membuka lebar-lebar telinganya.

“Aku sangat sangat sangat menghargai semangat dan kegigihan orang-orang Belanda, seperti Henk, dalam mempelajari sastra dan budaya Jawa yang melebihi orang-orang dari bangsa kita sendiri!” ucap Dokter Budi dengan mata menatap tajam pada Brantas yang tenang.

“Dulu, Henk pernah menawarkan uang yang begitu melimpah untuk memboyong buku dan arsip di sini ke Belanda. Aku bisa beli apa pun dan pergi ke mana pun dengan uang itu. Tetapi, aku tak akan menjual satu buku dan selebar arsip pun yang ada di loteng ini kepada siapa pun.”

Nila masih mendengarkan dengan seksama dan tak tahu harus berbicara bagaimana. Ia membiarkan Dokter Budi terus bercerita.

“Tetapi, selama aku merawat buku dan arsip-arsip di sini. Tak ada orang ke sini yang seserius kamu dalam meneliti. Mereka umumnya hanya melihat-lihat dan cukup mengagumi saja. Aku harap kau bisa menularkan kecintaanmu pada Sastra Jawa kepada generasi selanjutnya.”

Nila mendongak ke langit malam. Ia seperti melihat wajah Tuan Tan: rahang tegap, mata tajam, rambut gondrong, kumis panjang melarik kanan-kiri.

Brantas masih mengalir dengan tenang di permukaan meski arusnya menghebat di kedalaman. Begitu pula kata-kata Dokter Budi.

\*\*\*

“Penghargaan ini untuk Tan Khoen Swie dan Dokter Budi. Apa-apa yang ia lakukan dulu jauh melebihi apa yang telah saya lakukan hari ini. Karya tesis ini, saya dedikasikan untuk mereka.”

Sesekali hening menyelimuti ruangan saat Nila mengambil jeda untuk mengambil napas. Kalimat per kalimat meluncur dari bibirnya. Bercerita tentang bilik kecil di kota kecil di tepi sungai Brantas.

“Dapat dikatakan, tanpa Tuan Tan, tak ada sastra Jawa modern hari ini,” kuteruskan pidatoku. “Karya Ronggowarsito, Yasadipuro, Padmosusastro diterbitkan oleh *Boekhandoel Tan Khoen Swie*. *Babad Kadhiri*, *Serat Kalatida*, *Suluk Gatholoco*, dan *Serat Darmogandhul* adalah sumber-sumber penulisan yang begitu memukau. Arsip surat menyurat Tan Khoen Swie dengan para pengarang tersebut juga masih tersimpan dengan rapi,” tambahnya.

“Tanpa Dokter Budi yang menjaga dan merawat buku-buku terbitan Tan Khoen Swie dan arsip-arsipnya, sungguh saya tak akan pernah berdiri di panggung ini. Penghargaan ini kuhaturkan untuknya,” pungkas Nila.

Tepuk tangan panjang bergema membahana saat ia menutup pidatonya. Kilat-kilat kamera menerpa tubuh Nila dengan toga kebesarannya. Tiba-tiba, sejulur telapak tangan menggamit pundaknya dari belakang. Nila menoleh ke belakang. Wajah dengan kumis melarik dan rambut panjang-rapi-tergerai tersenyum kepadanya. “Tuan Tan!” teriak Nila. Tubuh Nila tiba-tiba bergetar hebat. Bayangan itu lalu menghilang dalam sekejap. ■



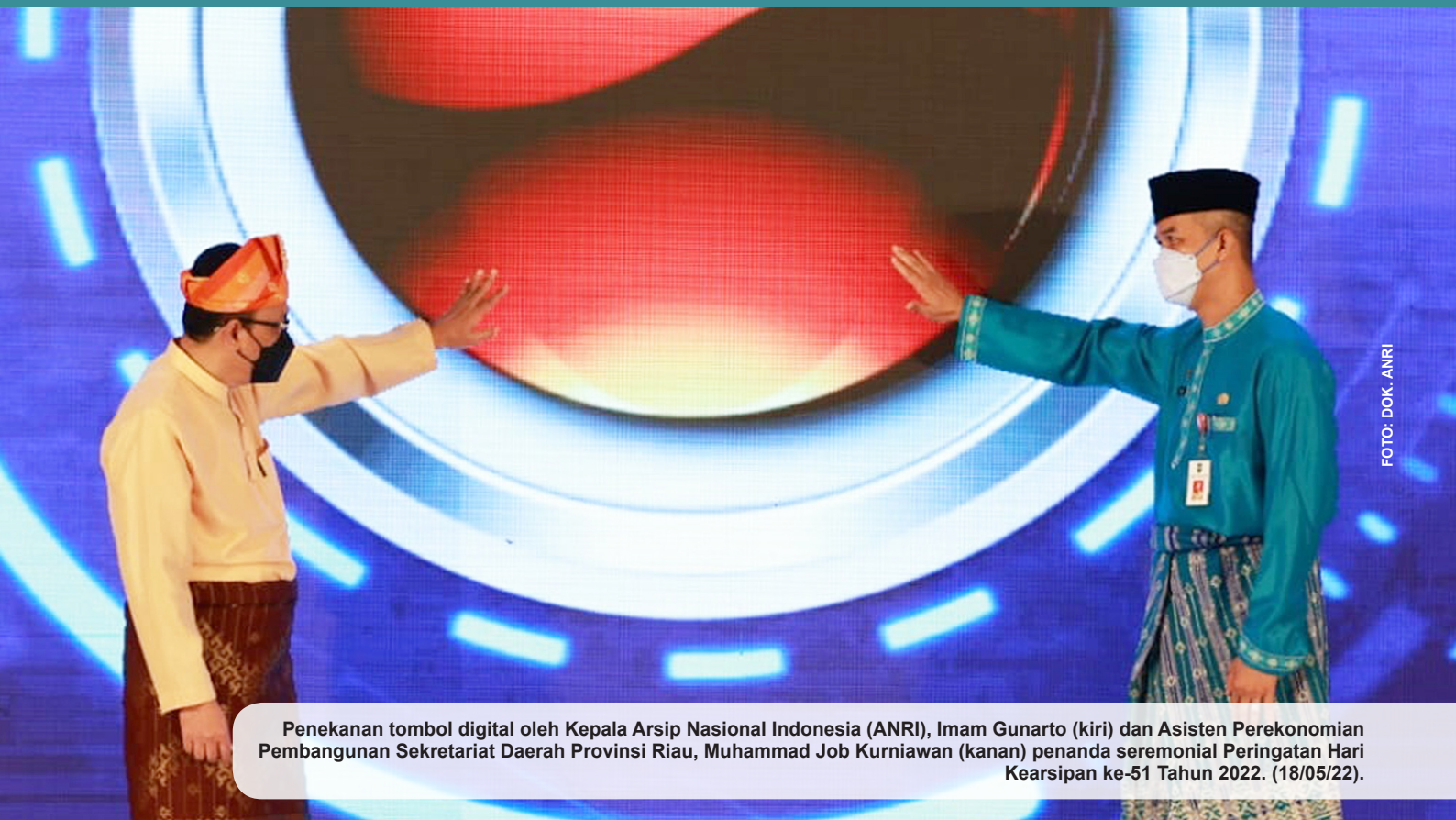


FOTO: DOK. ANRI

Penekanan tombol digital oleh Kepala Arsip Nasional Indonesia (ANRI), Imam Gunarto (kiri) dan Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Muhammad Job Kurniawan (kanan) penanda seremonial Peringatan Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022. (18/05/22).

## SEREMONIAL PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-51 TAHUN 2022

**Pekanbaru (18/05)** - Penekanan tombol digital seremonial Peringatan Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022 oleh Kepala Arsip Nasional Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Muhammad Job Kurniawan, dilaksanakan hari ini, 18 Mei 2022 di Pekanbaru, Riau.

Sebelum dilaksanakan seremonial, Kepala ANRI Imam Gunarto dalam laporannya mengenai Kinerja Kearsipan Nasional tahun 2021, menyampaikan bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan agar

dapat menjamin arsip yang dikelola memiliki autentisitas, reliabilitas, dan kredibilitas yang tinggi.

Dalam paparannya, Kepala ANRI mengatakan bahwa menjalankan mandat perundang-undangan penyelenggaraan kearsipan juga harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang harus menyesuaikan dengan Visi dan Misi Presiden, 7 Agenda Pembangunan Nasional, dan 5 Arahan Presiden tentang Prioritas Pembangunan Nasional. Kearsipan masuk dalam agenda pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (Prioritas Nasional 4) dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam

dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7).

Seremonial peringatan Hari Kearsipan ke-51 dihadiri oleh tamu undangan perwakilan dari Kementerian/Lembaga tingkat pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube Arsip Nasional RI.

Dengan semangat Hari Kearsipan ke-51 yang bertema Sinergi Kearsipan untuk Kemajuan Bangsa: Tertib Arsip, Transformasi Digital Kearsipan, Memori Kolektif Bangsa, marilah kita bersama-sama bersatu padu membangun dunia kearsipan untuk bangsa, negara dan masyarakat. (sa)



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menetapkan lima khazanah arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB). (18/05/22).

## ANRI TETAPKAN LIMA KHAZANAH ARSIP SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA

**Pekanbaru (18/05)** - Bertepatan dengan momen peringatan Hari Kearsipan ke-51, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menetapkan lima khazanah arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB). Adapun kelima khazanah arsip yang ditetapkan sebagai MKB, yaitu:

- Arsip UNESCO Global Geopark (UGG) Ciletuh-Palabuhanratu yang diajukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Jawa Barat;
- Arsip Rehabilitasi Centrum Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Tahun 1950-1980 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Arsip Kamp Pengungsi Pulau Galang "Wajah Humanisme Indonesia" yang diajukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kementerian Sekretariat

Negara, Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia;

- Arsip Konservasi dan Pembangunan Kawasan Segara Anakan Cilacap-Jawa Tengah Tahun 1996-2000 diajukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap;
- Arsip Selokan Mataram yang diajukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penetapan kelima khazanah arsip di atas sebagai MKB didasarkan pada hasil sidang Dewan Pakar yang dituangkan dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 198 Tahun 2022 tentang Penetapan Arsip dalam Register MKB Tahun 2022.

Adapun anggota Dewan Pakar Dewan Pakar di bidang warisan dokumenter yang

terlibat dalam registrasi arsip sebagai MKB ini di antaranya adalah Sejarahwan/Pakar Warisan dokumenter, Mukhlis PaEni, Arsiparis Utama ANRI, M. Taufik, Pakar Kebudayaan, Adrianus Waworuntu, Sejarahwan, Asep Kambali, Pakar Antropologi, Sri Murni, dan Pustakawan Utama, Sri Sumekar.

Sebagai informasi, penyelenggaraan program registrasi MKB meliputi rangkaian tahapan kegiatan permohonan; penilaian; penetapan; dan sosialisasi. Kewajiban yang harus dipenuhi pemohon setelah teregistrasinya arsip MKB adalah memastikan pelestarian dan akses arsip yang teregistrasi termasuk diantaranya perlindungan kondisi sosial, politik, dan keamanan kondusif untuk kelangsungan hidup dokumen jangka pendek dan jangka panjang. **(tk)**



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo hadir dan memberikan penghargaan anugerah kearsipan pada peringatan Hari Kearsipan ke-51 tahun 2022. (18/05/22).

## MENTERI PANRB: ARSIP MENJADI BAGIAN PENTING DALAM REFORMASI BIROKRASI

**Pekanbaru (18/05)** - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo hadir dan memberikan penghargaan anugerah kearsipan pada peringatan Hari Kearsipan ke-51 tahun 2022 didampingi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto di Pekanbaru, Riau.

Dalam arahnya, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa arsip menjadi bagian penting dalam Reformasi Birokrasi (RB). Kearsipan memiliki peranan penting sebagai bagian dari sumber informasi yang terekam dan objektif. "Sekarang

arsip kita sudah mulai menghimpun data-data daerah, sejarah dari seluruh peristiwa-peristiwa, baik dihimpun yang ada di negara kita maupun di negara lain," jelas Tjahjo Kumolo.

Menteri PANRB didampingi Kepala ANRI menyerahkan anugerah kearsipan hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 kepada 10 instansi pemerintah dengan nilai terbaik kategori Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural, dan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Menteri PANRB menambahkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kemampuan Indonesia dalam mengelola arsip harus semakin baik, karena arsip merupakan landasan untuk membuat kebijakan yang cepat dan tepat. Penyelenggaraan kearsipan sangat bergantung pada sinergitas dan kesinambungan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, serta pengelolaan arsip yang harus didukung oleh sumber daya manusia. **(sa)**

## RAPAT KOORDINASI PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN COVID-19

JAKARTA, 26 JULI 2022

FOTO: DOK. ANRI

Dalam rakor penyelamatan arsip penanganan Covid-19 turut diselenggarakan penyerahan arsip statis dan arsip penanganan Covid-19 kepada ANRI dan acara dilanjutkan dengan diskusi panel tentang penyelamatan arsip penanganan Covid-19. (26/07/22).

## ANRI SELENGGARAKAN RAKOR PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN COVID-19

**Jakarta (26/07)** - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 bersama 180 peserta perwakilan 90 lembaga di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Selasa (26/7/2022).

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Kirana Pritasari, MQIH mewakili Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. Pada kesempatan ini, turut hadir Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini.

Dalam sambutannya, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan SE Menteri PANRB Nomor 62 Tahun

2020 merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, karena arsip penanganan Covid-19 tersebut akan menjadi warisan yang sangat berguna di masa yang akan datang.

“Ketika status pandemi Covid-19 telah ditetapkan, ANRI ingin memberikan andil dalam mencari arsip pandemi di sama lalu, namun sangat sulit karena tersebar dan sulit ditemukan. Hal ini tidak ingin kita ulangi lagi. Kita harapkan kelengkapan arsip yang sudah kita selamatkan bersama, diharapkan agar masyarakat menjadi *aware* dan tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, agar terhindar dari hoaks,” papar Kepala ANRI.

Terkait dengan penyelamatan arsip penanganan Covid-19, Kepala ANRI menegaskan bahwa ANRI siap menerima arsip secara digital. Sehingga arsip Covid-19 digital dapat diserahkan ke ANRI. Kepala ANRI juga berterima kasih kepada para

stakeholders atas kerja sama dalam penyelenggaraan penyelamatan arsip penanganan Covid-19 serta kegiatan Rakor Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19.

Upaya pengembangan dan implementasi teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelamatan arsip juga senada dengan Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini. “Dalam SE ditegaskan pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Selain itu dapat menjadi panduan pencipta arsip dalam tahapan penyelamatan arsip penanganan Covid-19. ANRI diharapkan terus mengembangkan dan mengimplementasikan TIK dalam proses penyelamatan arsip penanganan Covid-19,” ujar Rini Widyantini.

Dalam rakor ini, turut diselenggarakan penyerahan arsip statis dan arsip penanganan Covid-19 kepada ANRI dan acara dilanjutkan dengan diskusi panel tentang penyelamatan arsip penanganan Covid-19. (sa)



FOTO: DOK. ANRI

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan) memperlihatkan berkas penandatanganan MoU. (27/07/22).

## ANRI MELAKSANAKAN MOU DENGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**Jakarta (27/07)** - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto, melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyinergikan tugas

dan fungsi serta kewenangan kedua lembaga, dalam bidang agraria/ Pertanahan, Tata Ruang, dan kearsipan.

Arsip Pertanahan salah satu arsip bernilai strategis nasional yang berkaitan dengan hak keperdataan rakyat yang telah dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, negara harus wajib menjamin

ketersediaan arsip pertanahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat terwujud sebuah sistem pengelolaan arsip yang berorientasi pada pelayanan publik khususnya bidang pertanahan. (md)



FOTO: DOK. ANRI

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate beserta jajaran dan Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Imam Gunarto beserta jajaran berfoto bersama se usai melakukan pertemuan membahas percepatan pengembangan aplikasi dan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk aplikasi umum Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). (21/10/22).

## PERCEPATAN IMPLEMENTASI SRIKANDI, KEPALA ANRI AUDIENSI DENGAN MENKOMINFO

**Jakarta (21/10)** - Guna mewujudkan percepatan pengembangan aplikasi dan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk aplikasi umum Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto melakukan audiensi dengan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate. Pertemuan kedua pihak dilakukan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta.

Pada kesempatan ini, Menkominfo, Johnny Gerard Plate menyambut baik kehadiran Kepala ANRI beserta jajaran dan siap mendukung untuk

berkolaborasi dalam percepatan implementasi Srikandi secara nasional.

Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang telah disosialisasikan secara masif dan sudah diterapkan di berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. **(is)**

**Jakarta (07/11)** - Sebagai upaya penyebarluasan informasi arsip Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Nonblok serta membangkitkan kembali semangat Bandung Spirit pada era globalisasi, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Bandung Spirit Scholars dan Social Movement Activists menyelenggarakan konferensi internasional bertema "*Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective: "What Dreams, What Challenges, What Projects, for a Global Future"*" (Bandung-Beograd-Havana dalam Kerangka Sejarah dan Pemikiran Global: Impian, Tantangan dan Perencanaan Masa Depan). Konferensi internasional tersebut dilaksanakan secara berseri di kota Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali.

Pada pembukaan acara, Kepala ANRI, Imam Gunarto dalam sambutannya menyampaikan, eksistensi Indonesia dalam helatan momen penting berskala internasional ini tak lepas atas peran Indonesia pada masa lalu, seperti pada saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang dilanjutkan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Nonblok.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Annas yang menyebutkan bahwa semangat Dasa Sila Bandung menjadi modal bagi bangsa di Asia dan Afrika untuk saling bekerja sama dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing.

Sementara itu, Inisiator dan Koordinator Konferensi Bandung-Belgrade-Havana, Darwis Khudori dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini didasarkan untuk mengingat dan menunjukkan pada dunia terkait pertemuan di 3 (tiga) kota yang bermakna penting bagi perdamaian, yakni Bandung, Belgrade (Beograd), dan Havana.

Penyelenggaraan konferensi ini juga tidak terlepas dari peran pentingnya arsip. Duta Arsip, Rieke Dyah Pitaloka menyampaikan bahwa arsip Bandung-Beograd-Havana menjadi petunjuk untuk membebaskan dunia dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan,



Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidatonya pada kegiatan konferensi internasional "*Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective*". (07/11/22).

## ANRI GELAR KONFERENSI INTERNASIONAL "BANDUNG-BELGRADE-HAVANA IN GLOBAL HISTORY AND PERSPECTIVE"

ketimpangan, dan kehinaan. Rieke menyampaikan bahwa arsip membentangkan perjalanan peradaban dunia.

Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri pun mengajak agar momen ini dapat saling menguatkan solidaritas antarbangsa. Melalui Konferensi Bandung-Belgrade-Havana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menyelesaikan konflik tanpa melalui perang, bisa dengan musyawarah dan mufakat, mengedepankan solidaritas dan kerja sama bangsa-bangsa untuk meningkatkan kualitas kehidupan seluruh umat manusia.

Konferensi internasional *Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective* yang dilaksanakan di Jakarta dikemas dalam tiga sesi diskusi panel. Sesi pertama dan kedua membahas para pemimpin dunia yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Bandung-Beograd-Havana. Sesi ketiga mengulas Konferensi Asia Afrika dan KTT Nonblok dalam Arsip Audiovisual. Pada sesi pertama

mengulas Bandung-Beograd-Havana dalam Sejarah dan Perspektif Global yang disampaikan oleh Social Movement Activists dari University of Le Havre Normandy, Darwis Khudori, dilanjutkan dengan membahas pemimpin dunia yang membahas yang terkait Konferensi Bandung-Beograd-Havana. Dimulai dengan pembahasan Jawaharlal Nehru yang diulas Rityusha Tiwary, Zhou Enlai yang diulas Shi Qing, Sukarno yang akan diulas Rieke Dyah Pitaloka, Gamal Abdel Nasser diulas oleh Magda Refaa, Josip Broz Tito diulas oleh Jovan Cavoski, dan Fidel Castro yang akan diulas Beatriz Bissio.

Sebagai informasi, helatan konferensi internasional "*Bandung- Belgrade-Havana in Global History and Perspective: "What Dreams, What Challenges, What Projects, for a Global Future"*" menjadi bagian dalam peringatan 65 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung, 60 tahun KTT Nonblok di Beograd dan 55 tahun Konferensi Tiga Benua di Havana. Konferensi ini pun menjadi ajang untuk kembali merefleksikan dan membumikan nilai-nilai Bandung Spirit. (tk/sa)

SIONAL SADAR TERTIB ARSIP  
 GAN KE KANTERIA PPN/BA  
 AKAR NOVEMBER 2022

FOTO: DOK. ANRI



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto menyerahkan Inventaris Arsip Kementerian PPN/Bappenas kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa. (28/11/22).

## SUHARSO MONOARFA, MENTERI PPN/BAPPENAS MENERIMA INVENTARIS ARSIP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

**Jakarta (28/11)** - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menyerahkan Inventaris Arsip Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa. Hal ini dilakukan dalam rangka acara Ekspose Inventaris Arsip Kementerian PPN/Bappenas, sebagai salah satu bukti nyata dari Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Penerimaan inventaris oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menjadi pertanda bahwa agenda prioritas kegiatan Direktorat Pengolahan di tahun 2022 itu telah rampung. Setelah melalui proses pengolahan dan penyusunan

inventaris arsip, maka saat ini Arsip Kementerian PPN/Bappenas di ANRI berukuran 128 meter linier yang terdiri dari 638 boks dengan 7848 nomor arsip.

Secara mayoritas, arsip-arsip itu memiliki bentuk dokumen berupa daftar isi proyek (DIP) yang menggambarkan proses implementasi dari perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah hingga panjang oleh pemerintah di masa lalu. Dokumen dengan kurun waktu terua berasal dari tahun 1947, sedangkan yang terbaru adalah arsip dari tahun 2010. Maka dari itu, inventaris ini diberi judul "Inventaris Arsip Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 1947-2010".

Pada kesempatan itu, Imam

Gunarto menyampaikan mengenai pentingnya peran arsip sebagai jati diri dan identitas lembaga serta sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia. Beliau juga menyatakan pentingnya arsip sebagai aset penting.

Kemudian, Suharso Monoarfa dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya tindakan nyata dari komitmen di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terhadap pengelolaan arsip yang baik.

Terselenggarakannya Ekspose Arsip Kementerian PPN/Bappenas, maka dalam waktu dekat masyarakat dapat mengakses arsip tersebut. Diharapkan, arsip-arsip ini dapat mengisi kebutuhan masyarakat berupa informasi strategis dalam hal sejarah perencanaan pembangunan nasional. (mthp)





Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Annas saat membuka acara Seminar Internasional “Menuju Pusat Arsip Pandemi dan Kebencanaan”. (13/12/22).

## ANRI GELAR SEMINAR INTERNASIONAL “MENUJU PUSAT ARSIP PANDEMI DAN KEBENCANAAN”

**Banda Aceh (13/12)** - Dalam rangka memperingati dan merefleksikan 18 tahun tsunami Samudera Hindia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Universitas Syiah Kuala menyelenggarakan Seminar Internasional “Menuju Pusat Arsip Pandemi dan Kebencanaan: Pelajaran dari Tragedi Tsunami Aceh sebagai Pengetahuan dan Warisan Dokumenter”. Seminar tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom cloud meeting dan secara luring di Gedung AAC Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Selasa (13/12).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Annas saat membuka acara menyampaikan pengelolaan arsip merupakan hal yang krusial. Arsip tsunami memiliki monumen dan sejarah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia dan masyarakat di dunia. Instansi pemerintah berperan penting menjaga arsip bencana, perlindungan dan penyelamatan arsip sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan

dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Dalam laporannya Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa sejak dibentuk Balai Arsip Tsunami Aceh pada tahun 2010, ANRI terus aktif dalam menyelenggarakan kegiatan peringatan tsunami Samudra Hindia. Tahun 2019, ANRI bersama Pemerintah Aceh dan Universitas Syiah Kuala juga berkolaborasi mengadakan seminar nasional dalam rangka peringatan tsunami.

Imam Gunarto juga menyampaikan, sebagai upaya penghimpunan arsip pandemi Covid-19, organisasi SARBICA mengembangkan program ASEAN Pandemic Response Archives (APARA) yang merupakan kegiatan menghimpun arsip pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh negara-negara anggota SARBICA.

Penjabat Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama, Iskandar Syukri menyampaikan bahwa arsip tsunami merupakan khazanah yang sangat penting untuk dirawat dan dilestarikan karena memiliki informasi penting bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami yang dapat menjadi sumber pengetahuan, meningkatkan kewaspadaan bencana apalagi arsip tsunami telah mendapatkan register *Memory of the World* (MoW).

Rektor Universitas Syiah Kuala, Marwan dalam sambutannya mengatakan bahwa mentransfer pengetahuan tentang bencana kepada generasi berikutnya dan generasi mendatang adalah hal yang penting. Hal ini memperkuat alasan untuk mengembangkan kapasitas manajemen pengetahuan dalam pengurangan risiko bencana.

Pentingnya acara ini juga disampaikan oleh Ketua SARBICA, Julia Chee. Julia Chee mengatakan bahwa seminar tahunan ini penting karena berfungsi sebagai pengingat peran arsip dalam mendokumentasikan peristiwa penting,

seperti Tsunami Samudera Hindia dan COVID-19.

Seminar internasional ini juga menjadi momentum dalam menyosialisasikan keberhasilan penominasian arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai MoW. Arsip tsunami Samudera Hindia telah diakui UNESCO sebagai MoW pada 30 Oktober 2017. Arsip tersebut merekam peristiwa bencana tsunami, proses mitigasi, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Arsip tsunami Samudera Hindia yang diakui UNESCO terdiri dari arsip tekstual sepanjang 9,3 km linier, arsip foto sebanyak 500 lembar, arsip rekaman suara sebanyak 196 kaset, arsip video magnetik sebanyak 13 kaset, serta arsip elektronik dalam bentuk CD/DVD sebanyak 1.230 keping. Saat itu, penominasian arsip tsunami Samudera Hindia dilakukan melalui nominasi bersama (*joint nomination*) antara Indonesia dan Sri Lanka.

Seminar ini terbagi menjadi dua sesi panel. Pada panel sesi satu menghadirkan Victorino M. Manalo yang membahas APARA *Initiative*, Sanira Karim Gani yang membahas *Methods in Efforts to Provide Protection and Security of Archives, Both in Preventive and Curative Actions*, dan Norsuriaty Awang Hassim yang menyampaikan tentang *Experience on Disaster Affected Archives Management in One of Institutions*. Adapun pada panel sesi kedua menghadirkan Yoshimi Nishi dengan pembahasan *Archival Preservation*, Alfi Rahman yang membahas *Promoting Digital Archives for Sustainable Disaster Awareness in South East Asian Region*, serta Yudo Giri Sucahyo yang membahas tentang *Disaster Archives in the Midst of Digital Transformation Era*. Pada rangkaian acara seminar internasional ini juga dilaksanakan penandatanganan *Executive Program* antara ANRI dan National Archives of Singapore dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara ANRI dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. (sa/tk)



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto (kiri) saat memberikan cenderamata kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla M. Mattalitti sesuai melakukan diskusi pada kunjungan kerja Ketua DPD RI ke ANRI di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari. (16/12/22).

## TELUSURI ARSIP UUD 1945, KETUA DPD RI KUNJUNGI ANRI

**Jakarta (16/12)** - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jl Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022). Kunjungan kerja LaNyalla ke ANRI dalam rangka melihat arsip-arsip yang berkaitan dengan sejarah Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LaNyalla yang datang didampingi Anggota DPD RI Bustami Zainudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan para Kabiro DPD RI, diterima langsung Kepala ANRI Imam Gunarto dan jajarannya.

“Kedatangan kami ke sini dalam rangka pelurusan sejarah. Sesuai perjuangan kami mengembalikan kontitusi bangsa ini ke UUD 45. Kita sengaja hadir ke ANRI untuk melengkapi data pendukung naskah akademik yang kita

buat,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan sudah lama berbicara tentang kembali ke UUD 45 naskah asli. Meski sudah punya data, LaNyalla merasa kurang afdhol jika tidak melihat dokumen-dokumen asli.

“Makanya saya sengaja datang ke ANRI supaya bisa melihat bukti-bukti otentik perjalanan bangsa ini. Baik salinan, risalah rapat sidang BPUPKI, PPKI maupun pertemuan-pertemuan para tokoh perintis kemerdekaan. Dari situlah kami bisa merasakan suasana kebatinan yang sebenarnya. Tentu selain sebagai data pelengkap, hal ini akan menambah kekuatan kami dalam berjuang,” tuturnya.

Ditambahkan LaNyalla, DPD RI juga memerlukan data maupun dokumen yang berkaitan dengan proses Amandemen Konstitusi yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002.

“Kita ingin tahu apa di benak para pelaku amandemen saat itu melalui risalah-risalah sidang di MPR, mengapa bisa mengubah total rumusan para pendiri bangsa menjadi konstitusi baru,” tuturnya.

LaNyalla juga berharap mendapatkan dokumen proses lahirnya negara ini. Yaitu perpindahan kekuasaan dari para Raja dan Sultan Nusantara kepada Republik Indonesia. Sebab menurut LaNyalla, secara formalnya perpindahan kekuasaan saat Proklamasi, bukan dari penjajah ke Indonesia, tetapi dari kerajaan dan kesultanan Nusantara ke republik ini.

Sementara itu, Kepala ANRI, Imam Gunarto siap membantu menelusuri arsip-arsip yang dibutuhkan DPD RI untuk kelengkapan kembalinya UUD 1945.

“Dokumen apa saja yang dibutuhkan beritahu ke kami, nanti akan kami carikan. Nanti bisa bareng-bareng dipilah dan diriset,” terangnya. **(is/hm)**



FOTO: DOK. ANRI

secara sederhana dan ringkas, karena lampirannya tersedia di loker desa,” jelas Taufik.

Pada webinar ini, turut hadir pula sebagai pembicara utama, Duta Arsip Indonesia, Rieke Dyah Pitaloka yang menyampaikan pentingnya tertib arsip di desa untuk mempermudah mencari dan merekam data atas pembangunan yang dilaksanakan di desa. Menurutnya, pembangunan dimulai dari desa, desa bukan pinggiran, desa adalah awal perjuangan dan pusat peradaban. Pembangunan desa yang demokratis salah satunya berbasis pada data yang akurat. Data ini bersumber dari arsip desa. “Berbicara arsip juga berbicara data. Menyelamatkan arsip berarti juga menyelamatkan data. Oleh karenanya ini tidak hanya tugas dari ANRI atau KDPDPTT, tetapi juga butuh dukungan dari berbagai pihak,” tambah Rieke.

Selain itu, turut hadir pula narasumber pada sesi diskusi, yaitu Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Desi Pratiwi; Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan KDPDPTT, Bito Wikantosa; Dosen Sejarah Universitas Gajah Mada, Sri Margana; Pegiat Literasi, Muhidin M. Dahlan, dan Budayawan, Taufik Rhazen serta moderator Arsiparis Madya ANRI, Widhi Setyo Putro.

Sebagai informasi, Surat Edaran Bersama Kepala ANRI dan Menteri DPDPTT Nomor 3 Tahun 2022 tentang Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa telah ditetapkan pada 10 Oktober 2022. Surat Edaran Bersama ini sebagai bagian dari tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. **(tk)**

## GERAKAN TERTIB ARSIP DAN SEJARAH DESA RESMI DIGAUNGKAN

**Jakarta (22/12)** - Sebagai sebuah upaya dalam menciptakan pengelolaan arsip desa dan sejarah desa yang andal, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDPTT) mengeluarkan kebijakan Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa dalam bentuk Surat Edaran Bersama Kepala ANRI dan Menteri DPDPTT Nomor 3 Tahun 2022. Kebijakan tersebut dikupas dalam webinar yang diselenggarakan ANRI dan KDPDPTT.

Menurut Kepala ANRI, Imam Gunarto saat membuka acara, Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa memiliki beberapa urgensi, di antaranya karena desa merupakan ujung tombak pembangunan dan layanan publik. Negara hadir untuk rakyatnya dimulai pada penyelenggaraan layanan publik di desa, sehingga arsip yang tercipta dari kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan di desa perlu dikelola dengan baik. “Gerakan ini juga tidak hanya digencarkan oleh ANRI dan KDPDPTT, tetapi dapat menjadi program bersama dengan Lembaga Kearsipan

Daerah (LKD), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” terang Imam.

Ditambahkan olehnya, dengan adanya desa yang tertib dalam pengelolaan arsip, dapat tercipta memori desa, sehingga dapat memperpanjang ingatan dan sejarah desa. Selain itu, desa tangguh bencana yang sudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam penyelamatan perlindungan arsip dari bencana juga dapat tercipta,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KDPDPTT, Taufik Madjid mengemukakan bahwa pengelolaan arsip yang logis dan teratur menjadi perhatian KDPDPTT. Kementerian Desa PDPTT juga melangkah menggerakkan perbaikan arsip di desa-desa. “Sejak tahun 2021, Kementerian Desa, PDPTT telah menyediakan loker desa, agar desa-desa dapat menyimpan dokumen penting secara daring. Dokumen desa bisa disimpan, tanpa bisa dihapus, agar arsip desa tertata, tersimpan, dan tidak hilang meski berganti kepemimpinan. Penyimpanan elektronik membuka peluang laporan dana desa disusun



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto (kiri) menyerahkan sertifikat pengakuan UNESCO tentang arsip Pusat Rehabilitasi Dr. Suharso Surakarta tahun 1950-1980 kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (29/12/22).

## KEPALA ANRI SERAHKAN SERTIFIKAT UNESCO ARSIP PUSAT REHABILITASI DR SUHARSO KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH

**Jawa Tengah (29/12)** - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menyerahkan sertifikat pengakuan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengenai arsip Pusat Rehabilitasi Dr Suharso Surakarta tahun 1950-1980 Sebagai *Memory of The World Asia Pacific* kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, 29 Desember 2022.

“Nah ini betul-betul perjuangan teman-teman kearsipan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Gubernur bisa memperoleh pengakuan UNESCO,” ungkap Imam.

Imam mengungkapkan bahwa Jateng termasuk provinsi yang berhasil

mengarsipkan dokumen sejarah. Terkait arsip Pusat Rehabilitasi Dr Suharso Surakarta, ia menyampaikan bahwa dokumen tersebut menjelaskan tentang perjuangan kemanusiaan di masa silam.

“Ada 25 negara yang ngevote dan kita termasuk yang berhasil karena semua ngevote karena nilainya arsip suharso ini memanusiakan manusia yang cacat akibat perang waktu itu, sehingga dia bisa hidup kembali, bisa gairah kembali menjalani hidupnya lebih baik,” terangnya.

Sementara itu, Ganjar menjelaskan arsip memiliki peran penting dalam merekam semua kejadian, termasuk soal kemanusiaan.

“Ada sejarah yang tidak boleh hilang

dan manusia harus tahu karena ini peradaban manusia. Ternyata banyak sekali pribadi, lembaga, yang punya dedikasi yang sangat tinggi untuk kemanusiaan dan dunia mengakuinya melalui UNESCO,” ujar Ganjar.

“Dengan arsip yang sangat bagus, dan kemudian kita menunjukkan sebuah sesuatu kepada dunia, apalagi yang punya nilai kemanusiaan, punya nilai mungkin pada pengetahuan, pada lingkungan dan sebagainya,” ungkapnya.

“Kalau ini secara kearsipan bisa ditunjukkan, datanya bagus, kita sampai ke UNESCO, kita bisa mempengaruhi dunia. Bukan dunia yang mempengaruhi Indonesia,” pungkasnya. **(tgh)**



FOTO: DOK. ANRI

Deputi Bidang Konservasi Arsip Nasional RI, Kandar (kiri) menerima arsip penanganan Covid-19 dari Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (kanan) dikantor pusat PP Muhammadiyah Yogyakarta. (29/12/22).

## PENYERAHAN ARSIP PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DARI PP MUHAMMADIYAH KE ANRI

**Yogyakarta (29/12)** - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr Haedar Nashir, M.Si, menyerahkan arsip penanganan pandemi Covid-19 PP Muhammadiyah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diwakili oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip, Dr. Kandar, MAP di kantor pusat Muhammadiyah Yogyakarta pada 29 Desember 2022.

Penyerahan arsip penanganan Covid-19 ini merupakan kegiatan kolaborasi dari unit kerja di Kedepujian

Bidang Konservasi Arsip. Hal ini juga sebagai bukti nyata komitmen dan keseriusan PP Muhammadiyah dalam mendukung penyelamatan arsip penanganan Covid-19 khususnya di lingkungan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Sebagai Ormas yang besar, Muhammadiyah telah terlibat aktif dan mengerahkan semua sumber daya dalam penanganan covid-19, khususnya melalui pembentukan Muhammadiyah Covid-19 *Command Center* (MCCC) pada tahun 2020

yang berperan dalam mengordinasikan pelaksanaan program dan aksi penanganan Covid-19.

Arsip yang diserahkan sebanyak 21 nomor dalam bentuk salinan otentik ini merupakan arsip kebijakan penanganan arsip Covid-19.

Diharapkan melalui penyerahan arsip penanganan Covid-19 ini, terbangun komitmen yang kuat antara ANRI dan PP Muhammadiyah dalam melakukan kerja sama yang lebih erat khususnya dalam bidang kearsipan. (mthp)



FOTO: DOK. ANRI

## KEPALA ANRI SAMPAIKAN REFLEKSI KEARSIPAN TAHUN 2022 MENUJU TAHUN 2023

**Jakarta (30/12)** - Dalam rangka mensosialisasikan capaian program Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2022 dan rencana program tahun 2023, ANRI menyelenggarakan acara dengan tema Refleksi Kearsipan Tahun 2022 Menuju Tahun 2023 secara daring yang juga ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube Arsip Nasional RI, Jumat (30/12).

Dalam paparannya, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan kerja kearsipan semakin berlipat ganda mengingat megatren lingkungan strategis berubah eksponensial karena adanya perkembangan TIK, pandemi covid 19, perang, pemilu, pindah IKN, reformasi birokrasi, dan lain-lain.

Berikut pidato Kepala ANRI, Imam Gunarto pada Refleksi Kearsipan Tahun 2022 Menuju 2023:

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastyastu,  
Nama Buddhaya,  
Salam Kebajikan.

Yang saya banggakan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara Pejuang Kearsipan di seluruh Indonesia.

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita lewati tahun 2022 dengan selamat sentosa menunaikan tugas-tugas kearsipan kita.

Tahun-tahun di masa pandemi, tugas-tugas kearsipan tetap dan terus kita kerjakan. Berkejaran, mencari celah, bermain petak umpet mencari lengah virus covid-19. Banyak sahabat dan saudara pejuang kearsipan yang tidak lagi bersama kita di garis depan kearsipan. Semoga arwah para pejuang kearsipan mendapat tempat yang paling mulia di sisi-NYA.

Penghujung tahun 2022, megatren lingkungan strategis berubah eksponensial. Perkembangan TIK, pandemi covid 19, perang, pemilu, pindah IKN, reformasi birokrasi, dan lain-lain. Kini pandemi covid-19 mereda, kerja kearsipan kita pun semakin berlipat ganda.

Para Pejuang Kearsipan se-Indonesia, Suatu kebanggaan, kehormatan dan kebahagiaan bagi saya kebersamaan Saudara semua. Memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan negara berjalan lancar karena dukungan kearsipan, baik untuk administrasi, akuntabilitas, pelayanan publik, proteksi hukum dan sebagainya, demi transparansi, reformasi birokrasi dan membentuk masyarakat demokratis. Menjaga harta kekayaan negara. Menjamin pewarisan arsip sebagai memori kolektif bangsa maupun dunia. Mempercepat roda digitalisasi kearsipan untuk membentuk masyarakat lebih bijaksana menjalani kekinian melalui pemahaman masa lalu bangsanya.

Komitmen telah kita tegakkan. Tertib arsip di segala lini dan jajaran terus ditingkatkan. Kementerian/Lembaga telah 96% berkinerja minimal baik, namun provinsi baru 70 %, bahkan kabupaten/kota baru 28 %. Akreditasi baru dilakukan terhadap 46 lembaga/instansi. Kondisi kearsipan seperti ini belumlah menggembirakan, khususnya di daerah. Banyak aset milik negara dan daerah yang lepas dipersengketaan, sengketa dan mafia tanah yang masih terus saja ada. Berita penipuan, pemalsuan serta kejahatan arsip dan kearsipan masih saja kita dengar. Terlebih di era digital. Ketika kearsipan harus mengelola analog sekaligus elektronik, teragap pejuang kearsipan bergegas berbenah untuk mentransformasikan segalanya, seketika.

Tiga strategi pokok transformasi digital yaitu: implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang mencapai 221 K/L/D atau 30,77 % dari 718 K/L/D dengan jumlah arsip hampir 6,5 juta arsip tersimpan di pusat data nasional, SIKN-JIKN yang mencapai 340 simpul jaringan, digitisasi arsip analog yang mencapai 30 % belumlah sesuai target, perlu ditingkatkan. Jumlah arsiparis secara nasional sebanyak 10.000 lebih, sebagian besar hasil alih jabatan dari proses penyederhanaan birokrasi, 70 % berusia 40 tahun ke atas juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan untuk menjadikan pelopor perubahan kearsipan digital.

Penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa di tingkat pusat di tahun 2022 mencapai 30.276 arsip, namun kondisi di daerah mengalami tantangan yang berat berkaitan dengan keterbatasan anggaran kearsipan yang hanya 0,05% dari seluruh anggaran urusan pemerintahan di daerah sebanyak Rp. 1.170 T di tahun 2022. Sarana dan prasarana yang sangat terbatas, SDM yang terombang-ambing oleh dinamika politik daerah yang pekat, dan keterbatasan serta problematik lainnya. Sebagian besar daerah mengalami darurat arsip statis, karena yang disimpan hanya arsip kepegawaian dan keuangan. Daerah juga mengalami darurat memori, kehilangan memori masa lalu, karena arsip yang membuktikan itu tiada lagi ada bekasnya.

Apalagi bencana tiada henti terus menerjang. Banjir, gempa bumi, tanah longsor dan segala bencana mengancam warisan dokumenter yang semakin langka. Data BNPB menyebut angka 3.318 lebih peristiwa bencana alam di tahun 2022, dengan puncak bencana gempa bumi dan tanah longsor Cianjur. Tak terkira berapa arsip musnah, hilang tak berbekas. Warisan yang tak tergantung.

Namun tahun 2022, lebih baik dari tahun 2021. Saat itu kita terkunci oleh berbagai kondisi darurat pandemi yang mencekam sejak 2020. Begitu sulit kerja kearsipan secara work from home, begitu rapuh dan rentan keamanan arsip di ruang dan depot-depot penyimpanan. Rentan kebakaran, kerusakan, kehancuran arsip karena pengabaian. Keberhasilan kerja kolosal pemerintah dan masyarakat mengatasi pandemi membawa dampak positif terhadap kearsipan yang mulai nge-gas, bergegas memperbaiki formulasi, desain kebijakan dan strategi.

Penyelamatan arsip penanganan covid 19 sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan warisan dokumenter nasional digeber oleh seluruh kementerian, lembaga, daerah, perguruan tinggi, institusi negara maupun swasta dan masyarakat. Setelah pandemi Covid 19 dinyatakan berakhir lembaga kearsipan harus bersiap menerima penyerahan arsip penanganan covid 19 dan melestarikannya sepanjang masa. Demikian pula penyelamatan arsip statis maupun terjaga akan terus meningkat seiring kesadaran kearsipan yang semakin tinggi.

Pejuang Kearsipan yang Saya Banggakan, "Tinggalkan cara-cara lama dalam mengelola arsip yang tidak efisien, akses yang lambat, dan penyimpanan yang tersebar dimana-mana, menggunakan cara-cara baru berbasis digital," demikian arahan Bapak Presiden Joko Widodo, 9 Juni 2021. Formulasi dan desain program dilakukan dengan re-evaluate value chain atau mengevaluasi kembali rantai nilai untuk meningkatkan kualitas

layanan kearsipan, reconnect with customer atau mengkonstruksi kembali dengan pelanggan, reimagine business atau mengimajinasikan bisnis kearsipan masa depan, dan rebuild organization atau membangun kembali organisasi dan sistem kerja kearsipan. Misalnya, Gerakan Sadar Tertib Arsip sejak 2016, diformulasikan kembali pada 2021 menjadi program inti kearsipan untuk percepatan reformasi birokrasi tidak saja di tingkat pusat tetapi sampai ke tingkat desa/kelurahan/kampung, program transformasi digital kearsipan untuk mendorong terwujudnya satu data Indonesia dan data driven economy, program memori kolektif bangsa (MKB) untuk membentuk dan mengembangkan memori kebangsaan masyarakat, menjaga NKRI melalui memori dan pikiran masyarakatnya. Inovasi dan kreativitas untuk perluasan akses arsip kepada masyarakat sebagai ujung tombak kinerja kearsipan terukur melalui indikator pemanfaatan arsip terus digerakkan, yang pada tahun 2022 mencapai 350.471 akses arsip.

Program penguatan lembaga kearsipan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan di daerah kabupaten/kota belum berhasil maksimal karena upaya pengalokasian dana dekonstruksi belum berhasil di tahun 2023. Penguatan lembaga kearsipan kabupaten/kota untuk mendorong tertib arsip dan sejarah desa yang digulirkan oleh ANRI dengan Kemdesa PDTT harus terus digeriapkan sebagai sebuah gerakan masyarakat desa. Penguatan arsip perguruan tinggi (university archives) terus ditingkatkan. Perbaikan kearsipan harus dimulai dari hulu. Data pengawasan menunjukkan bahwa kualitas penciptaan arsip sampai ke pemeliharaan arsip di unit pencipta masih sangat memprihatinkan. Ibarat mata air, kita harus menjaganya supaya tetap jernih dan terus mengalir melalui batang-batang sungai yang terbuka menuju lautan lepas sebagai kekayaan memori bangsa.

Tahun 2023, kearsipan memiliki kerja besar dengan titik-titik krusial yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, mempersiapkan K/L pindah ke IKN Nusantara dengan target, tidak ada arsip sedikitpun yang tercecer, pindah dengan aman dan nyaman. Kedua, implementasi SRIKANDI di K/L/D untuk menjamin proses administrasi pemerintahan berjalan secara digital ketika ibukota di IKN Nusantara. Ketiga, digitisasi arsip penting dari K/L yang akan pindah untuk menjamin arsip digital diakses dari jarak jauh. Keempat, penyelamatan arsip statis, arsip terjaga, arsip aset dari K/L yang akan pindah ke IKN Nusantara. Kelima, transformasi pengelolaan arsip pertanian bekerja sama dengan Kemen ATR/BPN. Keenam, percepatan digitalisasi memori kolektif bangsa di daerah perbatasan, khususnya Papua. Ke tujuh, gerakan tertib arsip dan sejarah desa. Ke delapan, penguatan lembaga kearsipan provinsi. Ke sembilan, fokus penyelamatan arsip covid 19 dan arsip kemaritiman, dan ke sepuluh, meningkatkan program memori kolektif bangsa dan dunia dalam rangka menjaga dan membangun NKRI melalui memori dan pikiran masyarakatnya.

Kolaborasi adalah menjadi kunci. Kolaborasi di dalam maupun luar negeri. Strategi dasi kupu-kupu, bowtie strategy diterapkan optimal. Penguatan kapasitas kearsipan internal di simpul tengah, kolaborasi dalam negeri di simpul kanan, dan kolaborasi internasional di simpul kiri. Misalnya, dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan kearsipan sebagai ilmu pengetahuan untuk memperkuat fondasi akademik dan sosiologis. Dengan dunia usaha baik pengusaha jasa kearsipan yang telah terbentuk organisasinya di tahun 2022 (dari data terdapat 95 perusahaan jasa kearsipan di Indonesia), maupun dunia usaha lainnya. Dengan komunitas-komunitas dan jaringan kawula muda kearsipan maupun yang bertalian. Dengan lembaga kearsipan internasional maupun lembaga internasional lain untuk membawa kearsipan Indonesia di panggung dunia.

Terima kasih,  
Teruslah menjadi pejuang.  
Selamat Tahun Baru 2023.  
Jakarta, 30 Desember 2022  
Kepala,

Imam Gunarto. (sa)

# Mari Dukung Kami Wujudkan

## PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK YANG BERSIH MELAYANI DALAM

Direktorat Layanan & Pemanfaatan | Pusdiklat Kearsipan  
Pusat Jasa Kearsipan | Direktorat SDM Kearsipan & Sertifikasi  
Pusat Akreditasi

 [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)  [ArsipNasionalRI](https://www.facebook.com/ArsipNasionalRI)  [@arsipnasionalri](https://twitter.com/arsipnasionalri)  [arsipnasionalri](https://www.instagram.com/arsipnasionalri)  [Arsip Nasional RI](https://www.youtube.com/ArsipNasionalRI)

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# DOWNLOAD APLIKASI **klik anri**



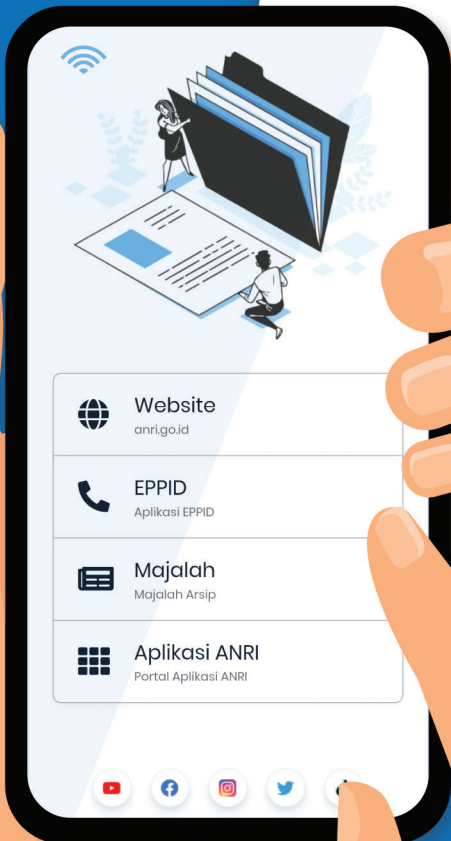
## FITUR:

[www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)

**e-PPID ANRI**

**Unduh Majalah ARSIP**

download sekarang di :



**G20** INDONESIA  
2022

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**